BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara komparatif antara Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan disajikan pula Realisasi Tahun 2022 sampai pada objek rekening. Berikut realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan	1.658.241.332.385,00	1.556.456.910.380,65	93,86	1.518.581.906.124,74
Belanja	1.763.769.820.520,00	1.549.615.259.602,00	87,86	1.697.267.679.056,34
Surplus/(Defisit)	(105.528.488.135,00)	6.841.650.778,65	(6,48)	(178.685.772.931,60)
Penerimaan Pembiayaan	132.628.488.135,00	52.737.933.230,56	39,76	266.413.793.263,16
Pengeluaran Pembiayaan	27.100.000.000,00	27.099.532.196,00	100,00	35.099.532.196,00
Pembiayaan Netto	105.528.488.135,00	25.638.401.034,56	24,30	231.314.261.067,16
SILPA	0,00	32.480.051.813,21	0,00	52.628.488.135,56

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, secara umum anggaran dan realisasi Pendapatan – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan - LRA	1.658.241.332.385,00	1.556.456.910.380,65	93,86	1.518.581.906.124,74

Pendapatan **LRA** Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.658.241.332.385,00 dan terealisasi sebesar Rp1.556.456.910.380,65 atau 93,86%. Pendapatan daerah tidak mencapai target disebabkan oleh hasil capaian/realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target hingga akhir tahun oleh karena sektor ekonomi di Kota Manado yang masih dalam pemulihan pasca pandemi. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar yaitu Rp1.518.581.906.124,74 maka pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.875.004.255,91 atau naik 2,49%. Secara umum realisasi pendapatan mengalami kenaikan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan disajikan menurut jenis 3 Pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	547.348.475.363,00	408.408.994.078,65	74,62	351.829.928.685,74
Pendapatan Transfer – LRA	1.086.675.748.024,00	1.126.380.335.360,00	103,65	1.121.121.253.621,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47	45.630.723.818,00
Jumlah	1.658.241.332.385,00	1.556.456.910.380,65	93,86	1.518.581.906.124,74

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 4 objek pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Transfer terdiri atas 2 objek pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri atas 6 rincian objek yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan komponen dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36	84,84	318.619.315.077,17
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	30.200.000.000,00	18.981.775.388,00	62,85	18.736.286.962,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.970.605.466,00	4.970.605.466,00	100,00	2.965.570.703,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	76.677.869.897,00	14.985.957.566,29	19,54	11.508.755.943,57
Jumlah	547.348.475.363,00	408.408.994.078,65	74,62	351.829.928.685,74

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp547.348.475.363,00 dan direalisasikan sebesar Rp408.408.994.078,65 atau 74,62%. Realisasi pendapatan tidak mencapai target pendapatan disebabkan oleh hasil realisasi PAD berupa Retribusi Daerah tingkat capaiannya hanya mencapai 62,85% dari target yang ditetapkan dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah hanya mencapai 19,54% dari target sehingga mempengaruhi keseluruhan capaian target Pendapatan Daerah. Selain faktor sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan juga oleh karena keterbatasan SDM pemungut pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak serta sarana prasarana pendukung yang kurang menunjang.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp351.829.928.685,74, PAD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.579.065.392,91 atau naik 16,08%. Kenaikan yang terjadi di tahun 2023 disebabkan kondisi perekonomian yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun pelaksanaan penganggaran dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2023 didasarkan atas:

- 1. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu jenis PAD yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36	84,84	318.619.315.077,17

Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebesar Rp435.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp369.470.655.658,36 atau 84,84%.

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 tidak mencapai target karena perekonomian masyarakat Kota Manado masih dalam pemulihan pasca pandemi yang

mempengaruhi tingkat pendapatan objek-objek pajak daerah menjadi relatif rendah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp318.619.315.077,17, pendapatan pajak daerah di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp50.851.340.581,19 atau 15,96%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami kenaikan di tahun 2023 disebabkan oleh kondisi perekonomian yang mulai membaik di tahun 2023 sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan anggaran per objek pendapatan pajak daerah terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel – LRA	47.248.750.000,00	34.024.344.010,35	72,01	29.910.654.789,07
2	Pajak Restoran – LRA	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21	106,44	98.149.816.271,46
3	Pajak Hiburan – LRA	19.500.000.000,00	11.052.005.455,80	56,68	7.353.739.740,64
4	Pajak Reklame – LRA	9.750.000.000,00	6.184.016.378,00	63,43	5.977.534.618,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	82.812.187.500,00	74.311.899.428,00	89,74	67.531.705.944,00
6	Pajak Parkir – LRA	17.684.062.500,00	15.115.247.787,00	85,47	10.714.632.651,00
7	Pajak Air Tanah - LRA	3.000.000.000,00	1.801.658.601,00	60,06	1.515.742.080,00
8	Pajak Sarang Burung Walet –LRA	5.000.000,00	1.360.000,00	27,20	1.360.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA	80.500.000.000,00	58.786.065.926,00	73,03	49.607.642.134,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	70.000.000.000,00	56.430.468.013,00	80,61	47.856.486.849,00
	Jumlah	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36	84,84	318.619.315.077,17

1) Pajak Hotel - LRA

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Hotel Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Realisasi dan Anggaran Pajak Hotel TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hotel – LRA	47.248.750.000,00	34.024.344.010,35	72,01	29.910.654.789,07

Pajak Hotel - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.248.750.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.024.344.010,35 atau 72,01%. Realisasi pendapatan pajak hotel tidak mencapai target pendapatan karena menurunnya tingkat kunjungan yang memanfaatkan jasa penginapan sejak masa pandemi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp29.910.654.789,07 pendapatan

pajak hotel tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.113.689.221,28 atau 13,75%, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang mulai membaik.

2) Pajak Restoran – LRA

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Restoran Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Realisasi dan Anggaran Pajak Restoran TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Restoran-LRA	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21	106,44	98.149.816.271,46

Pajak Restoran - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp105.000.000.000.000,000 dan capaian realisai sebesar Rp111.763.590.059,21 atau 106,44%. Realisasi pendapatan pajak restoran melebihi target pendapatan. Jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2022, realisasi pajak restoran melebihi target karena meningkatnya penjualan pada restoran yang sudah dibuka dengan jam normal, adanya restoran yang baru dibuka dan daya beli dari masyarakat yang meningkat. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp98.149.816.271,46 mengalami kenaikan sebesar Rp13.613.773.787,75 atau naik 13,87%. Pada tahun anggaran 2023 realisasi pajak restoran mengalami kenaikan cukup signifikan karena pengaruh *covid-19* sudah mulai menurun, usaha restoran banyak yang sudah buka, kunjungan konsumen meningkat sehingga ekonomi mulai membaik.

3) Pajak Hiburan - LRA

Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Hiburan Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.9 Realisasi dan Anggaran Pajak Hiburan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hiburan – LRA	19.500.000.000,00	11.052.005.455,80	56,68	7.353.739.740,64

Pajak Hiburan - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp19.500.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp11.052.005.455,80 atau 56,68%. Rendahnya capaian realisasi pendapatan pajak hiburan dari target yang ditetapkan dikarenakan menurunnya omset wajib pajak sejak masa pandemi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.353.739.740,64 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.698.265.715,16 atau naik 50,29%. Realisasi Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan karena tempat hiburan yang ada di Manado pada tahun 2023 sudah banyak yang buka dan bertambahnya usaha hiburan yang baru dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Pajak Reklame - LRA

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Reklame Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.10 Realisasi dan Anggaran Pajak Reklame TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Reklame – LRA	9.750.000.000,00	6.184.016.378,00	63,43	5.977.534.618,00

Pajak Reklame - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.750.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.184.016.378,00 atau 63,43%. Realisasi pajak reklame tidak mencapai target pendapatan karena target anggaran pendapatan pajak reklame belum menggambarkan potensi realistis Pajak Reklame yang ada. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.977.534.618,00 mengalami kenaikan sebesar Rp206.481.760,00 atau naik 3,45%. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan yang signifikan karena jumlah wajib Pajak Reklame cenderung sama.

5) Pajak Penerangan Jalan Umum - LRA

Pajak Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Penerangan Jalan Umum Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11 Realisasi dan Anggaran Pajak Penerangan Jalan Umum TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Penerangan Jalan – LRA	82.812.187.500,00	74.311.899.428,00	89,74	67.531.705.944,00

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) adalah pungutan berupa pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dasar hukum pemungutan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pajak Penerangan Jalan - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp82.812.187.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.311.899.428,00 atau 89,74%. Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan tidak mencapai target pendapatan karena penghematan pemakaian listrik oleh pelanggan listrik dan meningkatnya tunggakan pembayaran listrik oleh pelanggan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp67.531.705.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.780.193.484,00 atau naik 10,04%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan karena meningkatnya konsumsi listrik masyarakat Kota Manado.

6) Pajak Parkir – LRA

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Parkir Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Realisasi dan Anggaran Pajak Parkir TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pa	njak Parkir – LRA	17.684.062.500,00	15.115.247.787,00	85,47	10.714.632.651,00

Pajak Parkir - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.684.062.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.115.247.787,00 atau 85,47%. Pendapatan Pajak Parkir tidak mencapai target karena kurangnya tenaga penagih pajak parkir.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.714.632.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.400.615.136,00 atau naik 41,07%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh bertambahnya volume kendaraan umum dan pengguna jasa parkir serta lebih ketatnya pengawasan parkir di Kota Manado oleh Badan Pendapatan Daerah.

7) Pajak Air Tanah - LRA

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Air Tanah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Realisasi dan Anggaran Pajak Air Tanah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Air Tanah – LRA	3.000.000.000,00	1.801.658.601,00	60,06	1.515.742.080,00

Pajak Air Tanah - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp1.801.658.601,00 atau 60,06%. Pendapatan Pajak Air Tanah tidak mencapai target karena target anggaran pendapatan pajak air tanah belum menggambarkan potensi realistis Pajak Air Tanah yang ada. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.515.742.080,00 mengalami kenaikan sebesar Rp285.916.521,00 atau naik 18,86%. Perbedaan Realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2022 dikarenakan terjadinya lonjakan penggunaan sumur bor oleh masyarakat akibat peningkatan kebutuhan air bersih.

8) Pajak Sarang Burung Walet - LRA

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14 Realisasi dan Anggaran Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Sarang Burung Walet –LRA	5.000.000,00	1.360.000,00	27,20	1.360.000,00

Pajak Sarang Burung Walet - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.360.000,00 atau 27,20%. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target karena menurunnya produksi sarang walet serta target pendapatan yang belum menggambarkan potensi realistis pajak sarang burung walet. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.360.000,00, tidak terdapat perubahan pendapatan, hal tersebut menunjukkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak relatif sama.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.15 Realisasi dan Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA	80.500.000.000,00	58.786.065.926,00	73,03	49.607.642.134,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp58.786.065.926,00 atau 73,03%. Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mencapai target karena target pendapatan yang belum menggambarkan potensi realisasi pajak serta kurangnya penertiban serta pengawasan dari instansi pengelola pendapatan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.607.642.134,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.178.423.792,00 atau 18,50%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Realisasi Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.16 Realisasi dan Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	70.000.000.000,00	56.430.468.013,00	80,61	47.856.486.849,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp70.000.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp56.430.468.013,00 atau 80,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.856.486.849,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.573.981.164,00 atau 17,92%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 tidak terlalu signifikan disebabkan oleh dampak ekonomi setelah Pandemi *Covid-19* transaksi jual beli tanah yang belum terlalu tinggi.

5.1.1.1.b Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan Peraturan Daerah.

Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.17 Realisasi dan Anggaran Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	30.200.000.000,00	18.981.775.388,00	62,85	18.736.286.962,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.200.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp18.981.775.388,00 atau 62,85%. Realisasi pendapatan retribusi tidak mencapai target karena pengelolaan data wajib retribusi yang belum maksimal. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.736.286.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp245.488.426,00 atau naik 1,31%. Kenaikan terjadi karena apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa retribusi yang melebihi target yang ditetapkan. Realisasi dan anggaran per objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00	60.679.250,00	5,06	53.516.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.167.000.000,00	10.797.676.000,00	66,79	11.783.962.470,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	277.000.000,00	252.065.750,00	91,00	127.819.100,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	235.140.000,00	257.700.100,00	109,59	-
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	283.000.000,00	200.750.500,00	70,94	214.322.100,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	68.000.000,00	68.620.000,00	100,91	80.039.000,00
7.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.109.191.200,00	110,92	1.227.049.600,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	498.965.000,00	32.405.000,00	6,49	-
9.	Retribusi Tempat Pelelangan	17.000.000,00	3.500.000,00	20,59	14.290.000,00
10.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.120.000,00	16.783.000,00	111,00	
11.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	73.501.000,00
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	44.000.000,00	45.380.000,00	103,14	63.320.000,00
13.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	26.400.000,00	28.835.000,00	109,22	28.361.000,00
14.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	159.000.000,00	251.300.000,00	158,05	176.300.000,00
15.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.375.000,00	1.125.000,00	12,00	-
16.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.200.000.000,00	5.855.764.588,00	57,41	4.893.806.692,00
	Jumlah	30.200.000.000,00	18.981.775.388,00	62,85	18.736.286.962,00

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,000 dengan realisasi sebesar Rp60.679.250,00 atau 5,06%. Tahun 2023 target pendapatan tidak tercapai karena retribusi pelayanan kesehatan belum sesuai yang ditargetkan perihal jumlah pasien. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp53.516.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.163.250,00 atau naik 13,39%. Kenaikan realisasi tahun 2023 dibanding Tahun 2022 karena adanya peningkatan kinerja dan mulai beroperasinya RSUD dan RSKDGM.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.167.000.000,00 di 11 (sebelas) Kecamatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dengan realisasi sebesar Rp10.797.676.000,00 atau 66,79%. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan tidak mencapai target di tahun 2023 karena kurangnya tingkat kesadaran dan pembayaran dari masyarakat, serta adanya bencana banjir yang melanda beberapa Kecamatan sehingga mempengaruhi kemampuan bayar dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.783.962.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp986.286.470,00 atau turun 8,37%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan Tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya bencana banjir yang melanda beberapa Kecamatan di Kota Manado.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perhubungan Kota Manado sebesar Rp277.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp252.065.750,00 atau 91,00%. Tahun 2023 realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum mencapai target karena kurangnya tingkat kesadaran dan pembayaran dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp127.819.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.246.650,00 atau 97,21%. Perbedaan Realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan antara lain sejak bulan Juli 2021 sebagian titik Parkir sudah dikelola oleh PD. Pasar Kota Manado, adanya perubahan cuaca yang tidak menentu (cenderung hujan), serta masalah sosial seperti munculnya premanisme di beberapa titik parkir.
- 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado sebesar Rp235.140.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp257.700.100,00 atau 109,59%. Realisasi tahun 2023 melebihi target karena bertambahnya alat untuk pengujian kendaraan bermotor (uji KIR). Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi sehingga Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp257.700.100,00 atau naik 100,00% karena pada tahun 2022 alat untuk pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) mengalami kerusakan, sehingga pada tahun 2022 tidak ada realisasi namun di tahun 2023 alat untuk pengujian kendaraan bermotor telah dimiliki oleh Dinas Perhubungan sehingga menambah realisasi tahun 2023.
- 5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Kebakaran sebesar Rp283.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp200.750.500,00 atau 70,94%. Realisasi tahun 2023 yang belum mencapai target karena kurangnya petugas lapangan yang melakukan penagihan serta pengawasan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp214.322.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.571.600,00 ataun turun 6,33%. Penurunan disebabkan kurangnya petugas lapangan yang menagih dan masih banyak tempat usaha yang belum maksimal menyetor retribusi.
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebesar Rp68.000.000,00

dan direalisasikan sebesar Rp68.620.000,00 atau 100,91%. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena meningkatnya pelaku usaha yang melakukan tera-tera ulang dan melakukan kewajiban pembayaran pajak. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp80.039.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.419.000,00 atau 14,27%, penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya meter air baru untuk ditera.

- 7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado sebesar Rp1.000.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp1.109.191.200,00 atau 110,92%. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena meningkatnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk membayar retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.227.049.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp117.858.400,00 atau 9,61%. Penurunan realisasi Tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu berupa penyesuaian realisasi piutang di mana pada tahun 2022 terdapat lebih banyak pembayaran piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dibanding pembayaran tahun 2023.
- 8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp498.965.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp32.405.000,00. Tahun 2023 tidak mencapai target karena kurangnya pelaku retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana tidak ada realisasi sehingga kenaikan terjadi sebesar Rp32.405.000,00 atau 100,00%.
- 9) Retribusi Tempat Pelelangan LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sebesar Rp17.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.500.000,00 atau 20,59%. Tahun 2023 tidak mencapai target karena terdapat tempat pelelangan ikan yang telah beralih fungsi menjadi pasar bersehati. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp14.290.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.790.000,00 atau 75,51%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 disebabkan karena berkurangnya pembayaran retribusi dari pelaku usaha tempat pelelangan ikan.
- 10) Retribusi Terminal LRA Tahun Anggaran 2023 sudah tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi karena adanya peralihan tanggung jawab untuk pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Perhubungan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp73.501.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp73.501.000,00 atau 100,00%. Perbedaan pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat peralihan pengelolaan terminal di mana sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Perhubungan dan telah menjadi tanggung jawab dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

- 11) Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.120.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.783.000,00 atau 111,00%. Tahun 2023 realisasi mencapai target karena meningkatnya pengguna tempat khusus parkir. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada target dan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp16.783.000,00 atau 100,00% disebabkan adanya target pendapatan dan meningkatnya pengguna tempat khusus parkir.
- 12) Retribusi Rumah Potong Hewan LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sebesar Rp44.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.380.000,00 atau 103,14%. Tahun 2023 realisasi mencapai target karena bertambahnya mesin potong hewan yang beroperasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp63.320.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.940.000,00 atau 28,33%, disebabkan Mesin Potong mengalami kerusakan sehingga harus perbaikan menyebabkan berkurangnya realisasi tahun 2023.
- 13) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perhubungan Kota Manado sebesar Rp26.400.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp28.835.000,00 atau 109,22%. Tahun 2023 realisasi mencapai target karena meningkatnya jumlah wisatawan yang menggunakan kapal di pelabuhan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.361.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp474.000,00 atau 1,67%. Perbedaan realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal transportasi lintas antar pulau penyeberangan yang berlokasi di dermaga Kalimas dan dermaga Megamas yang retribusinya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Manado secara komersil.
- 14) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebesar Rp159.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp251.300.000,00 atau 158,05%. Tahun 2023 realisasi mencapai target karena meningkatnya penjualan minuman beralkohol. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp176.300.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp75.000.000,00 atau naik 42,54% disebabkan Tahun 2022 pelaku usaha sudah mulai meningkatkan produksi dan penjualan Minuman Beralkohol.
- 15) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perhubungan Kota Manado sebesar Rp9.375.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.125.000,00 atau 12,00%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena kurangnya pelaku retribusi izin trayek. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.125.000,00 atau 100,00%, disebabkan retribusi izin trayek pada tahun 2022 sudah digratiskan.

16) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.855.764.588,00 atau 57,41%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena target retribusi belum menggambarkan potensi realistis Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 4.893.806.692,00 terjadi kenaikan sebesar Rp961.957.896,00 atau 19,66% disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.

5.1.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Dividen atas kepemilikan Saham Pemerintah Kota Manado pada Bank SulutGo.

Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO) Nomor 03 tanggal 11 Maret 2022, yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank SulutGo tanggal 07 Maret 2022, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	4.970.605.466,00	4.970.605.466,00	100,00	2.965.570.703,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.970.605.466,00 dan terealisasi sebesar Rp4.970.605.466,00 atau 100,00%. Tahun 2023 realisasi sesuai dengan target karena realisasi tersebut berdasarkan pembagian nilai dividen atas saham. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.965.570.703,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.005.034.763,00 atau 67,61%, di mana realisasi di Tahun 2023 merupakan deviden atas kinerja keuangan kepemilikan saham Pemerintah Kota Manado di PT. Bank SulutGo Tahun 2022 yang disetor di Tahun 2023.

5.1.1.1.d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

Realisasi Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	76.677.869.897,00	14.985.957.566,29	19,54	11.508.755.943,57

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dianggarkan sebesar Rp76.677.869.897,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.985.957.566,29 atau 19,54%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena terdapat beberapa pendapatan yang targetnya tidak tercapai antara lain pendapatan bunga deposito tahun 2023 di mana nilai deposito yang disimpan tidak dapat mencapai target realisasi atas bunga deposito. Jika dibandingkan tahun 2022, realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.477.201.622,72 atau naik 30,21% karena terdapat realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan TGR. Realisasi dan Anggaran per objek Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.21 Rincian Realisasi dan Anggaran per Objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Jasa Giro	3.850.799.300,00	1.729.772.434,20	44,92	3.172.312.981,00
Penerimaan Bunga	12.000.000.000,00	992.054.792,00	8,27	2.132.876.703,00
Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah	9.827.070.597,00	4.943.327.817,64	50,30	802.692.880,93
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	3.716.003.971,35	0,00	549.426.972,02
Pendapatan Denda Pajak Daerah	51.000.000.000,00	0,00	0,00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.604.798.551,10	0,00	94.655.140,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.756.791.266,62
Jumlah	76.677.869.897,00	14.985.957.566,29	19,54	11.508.755.943,57

- a. Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.729.772.434,20 atau 44,92% dari anggaran senilai Rp3.850.799.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.172.312.981,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.442.540.546,80 atau turun 45,47%.
- b. Penerimaan Bunga terealisasi sebesar Rp992.054.792,00 atau 8,27% dari anggaran Rp12.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.132.876.703,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.140.821.911,00 atau turun 53,49%.
- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp4.943.327.817,64 atau 50,30% dari anggaran Rp9.827.070.597,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp802.692.880,93, terjadi kenaikan sebesar Rp4.140.634.936,71 atau naik 515,84%.

- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak teranggarkan pada tahun 2023, tetapi terealisasi sebesar Rp3.716.003.971,35. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp549.426.972,02, terjadi kenaikan Rp3.166.576.999,33 atau naik 576,34%.
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak ada realisasi namun dianggarkan sebesar Rp51.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi.
- f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran tidak teranggarkan pada tahun 2023, tetapi terealisasi sebesar Rp3.604.798.551,10. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp94.655.140,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.510.143.411,10 atau naik 3.708,35%.
- g. Lain-lain PAD yang Sah lainnya pada tahun 2023 tidak ada anggaran dan tidak ada realisasi tetapi terdapat realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.756.791.266,62. Jika dibandingkan, terjadi penurunan sebesar nilai realisasi tahun 2022.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.22 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer – LRA	1.086.675.748.024,00	1.126.380.335.360,00	103,65	1.121.121.253.621,00

Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.086.675.748.024,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.126.380.335.360,00 atau 103,65%. Tahun 2023 mencapai target karena terdapat beberapa pendapatan yang realisasinya melebihi alokasi dan target yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.121.121.253.621,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.259.081.739,00 atau naik 0,47%. Kenaikan dari periode sebelumnya karena naiknya realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil, realisasi pendapatan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk formasi PPPK yang diterima di bulan Desember 2023, realisasi pendapatan DAK Non Fisik untuk Dana BOS yang sebelumnya dianggarkan di Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetapi ditahun 2023 dianggarkan di Pendapatan Transfer DAK Non Fisik.

Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan pada APBD Kota Manado Tahun 2023. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Realisasi dan Anggaran Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.926.941.000,00	989.947.263.026,00	104,65	989.162.838.208,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.748.807.024,00	136.433.072.334,00	96,93	131.958.415.413,00
Jumlah	1.086.675.748.024,00	1.126.380.335.360,00	103,65	1.121.121.253.621,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Penganggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.24 Rincian Realisasi dan Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Bagi Hasil Pajak	38.284.346.000,00	43.283.962.786,00	113,06	46.517.539.226,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.510.490.000,00	9.046.990.370,00	120,46	21.887.121.652,00
Dana Alokasi Umum	705.768.202.000,00	749.852.642.000,00	106,25	702.057.099.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	36.401.021.000,00	35.004.243.654,00	96,16	137.660.653.767,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.962.882.000,00	152.759.424.216,00	96,71	81.040.424.563,00
Jumlah	945.926.941.000,00	989.947.263.026,00	104,65	989.162.838.208,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp945.926.941.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp989.947.263.026,00 atau 104,65%. Tahun 2023 realisasi mencapai target karena naiknya realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil, realisasi pendapatan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk formasi PPPK yang diterima di bulan Desember 2023, realisasi pendapatan DAK Non Fisik untuk Dana BOS yang sebelumnya dianggarkan di Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetapi ditahun 2023 dianggarkan di Pendapatan Transfer DAK Non Fisik. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp989.162.838.208,00 mengalami kenaikan sebesar Rp784.424.818,00 atau 0,08%. Kenaikan terjadi karena naiknya realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21, Dana Bagi Hasil SDA Mineral Batubara dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.25 Realisasi dan Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Bagi Hasil Pajak	38.284.346.000,00	43.283.962.786,00	113,06	46.517.539.226,00

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dianggarkan sebesar Rp38.284.346.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp43.283.962.786,00 atau 113,06%. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena realisasi yang diterima berdasarkan penerimaan langsung dari pusat. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.517.539.226,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.233.576.440,00 atau turun 6,95%. Penurunan dari periode sebelumnya karena nilai alokasi Dana Bagi Hasil Pajak terjadi penurunan.

Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	986.829.000,00	4.905.539.950,00	497,10	5.950.925.596,00
DBH PPh Pasal 21	37.297.517.000,00	38.378.422.836,00	102,90	33.777.368.958,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	0,00	0,00	0,00	6.789.244.672,00
Jumlah	38.284.346.000,00	43.283.962.786,00	113,06	46.517.539.226,00

Realisasi DBH Pajak tahun 2023 meliputi realisasi DBH Pajak sesuai realisasi Alokasi Tahun 2023 dan realisasi pendapatan TDF tahun 2022 – DBH Pajak yang disalurkan ke RKUD di tahun 2023 senilai Rp4.861.810.181,00. Realisasi TDF 2022 tersebut dicatat pada akun DBH PPh Pasal 21 tanpa memperhatikan alokasi penyaluran TDF Tahun 2022. Pemerintah Pusat pada tahun 2023 juga menyalurkan pendapatan remunerasi atas TDF 2022 tersebut senilai Rp157.876.455,00. Realisasi penerimaan remunerasi tersebut dicatat pada DBH Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, terdapat kesalahan pencatatan realiasi pendapatan DBH, dimana realisasi DBH senilai Rp20.069.850,00 dicatat di Lain-Lain PAD yag Sah – Pendapatan atas Pengembalian.

5.1.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.27 Realisasi dan Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.510.490.000,00	9.046.990.370,00	120,46	21.887.121.652,00

Dana Bagi Hasil (DBH) SDA dianggarkan sebesar Rp7.510.490.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.046.990.370,00 atau 120,46%. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena berdasarkan penerimaan dari pusat. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp21.887.121.652,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp12.840.131.282,00 atau turun 58,67%. Penurunan terjadi karena nilai penetapan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Kota Manado terjadi penurunan.

Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 5.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.509.470.000,00	1.660.105.022,00	109,98	2.577.688.418,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	17.350.216.234,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	4.439.105.000,00	5.613.119.171,00	126,45	0,00
DBH SDA Kehutanan – PSDH	28.647.000,00	28.744.966,00	100,34	906.000,00
DBH SDA Perikanan	1.533.268.000,00	1.745.021.211,00	113,81	1.958.311.000,00
Jumlah	7.510.490.000,00	9.046.990.370,00	120,46	21.887.121.652,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 meliputi realisasi DBH SDA sesuai realisasi alokasi Tahun 2023 dan realisasi pendapatan TDF tahun 2022 – DBH SDA yang disalurkan ke RKUD di tahun 2023 senilai Rp1.536.500.370,00

5.1.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Alokasi Umum	705.768.202.000,00	749.852.642.000,00	106,25	702.057.099.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp705.768.202.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp749.852.642.000,00 atau 106,25%. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena nilai realisasi berdasarkan penerimaan dari pusat. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp702.057.099.000,00

mengalami kenaikan sebesar Rp47.795.543.000,00 atau naik 6,81%. Kenaikan pada tahun 2023 dikarenakan terdapat realisasi pendapatan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Formasi PPPK dan adanya DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah yang masuk di RKUD pada bulan Desember 2023.

Berikut rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023:

Tabel 5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaanya	567.638.032.000,00	567.638.032.000	100,00	702.057.099.000,00
Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya, SEKALIGUS, Alokasi DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	0,00	4.859.038.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya (DAU Specific Grant)	138.130.170.000,00	177.355.572.000	128,40	0,00
- Penggajian Formasi PPPK	12.012.000.000,00	51.237.402.000,00	426,55	0,00
- Pendanaan Kelurahan	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	100,00	0,00
- Bidang Pendidikan	51.907.915.000,00	51.907.915.000,00	100,00	0,00
- Bidang Kesehatan	49.510.255.000,00	49.510.255.000,00	100,00	0,00
- Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	100,00	0,00

Pemerintah Kota Manado pada tahun anggaran 2023 mendapat anggaran DAU sebesar Rp705.768.202.000,00. Realisasi DAU 2023 sebesar Rp749.852.642.000,00 terdiri dari DAU yang tidak ditentukan Penggunannya Rp567.638.032.000,00, DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp4.859.038.000,00 dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grant*) Rp177.355.572.000 dan terjadi pemotongan langsung sebesar Rp12.802.807.343,00 yang terdiri dari:

- Pemotongan DAU untuk pembayaran Bunga Pinjaman Bulan Desember 2022 sampai dengan November 2023 (KMK No 45/KM.07/2022) sebesar Rp12.794.484.771,00.
- Pemotongan Sisa Dana DAK Non Fisik PK2UMK sebesar Rp7.340.772,00 dan Adminduk sebesar Rp981.800,00 (KMK No. 29/KM.07/2023).

Dana Alokasi Umum SG Bidang Penggajian PPPK pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp51.237.402.000,00 dengan jumlah PPPK 1.182 orang. Namun pada APBD Perubahan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp39.225.402.000,00 dengan jumlah PPPK 610 orang sehingga nilai anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp12.012.000.000,00 untuk 572 orang. Pengurangan tersebut terjadi karena jumlah PPPK yang lulus pada saat pembukaan formasi berjumlah 572 orang. Sehingga pada saat APBD Perubahan disesuaikan hanya untuk penerimaan DAU SG Penggajian PPPK.

5.1.1.2.1.d Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Alokasi Khusus Fisik	36.401.021.000,00	35.004.243.654,00	96,16	137.660.653.767,00
Jumlah	36.401.021.000,00	35.004.243.654,00	96,16	137.660.653.767,00

Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp35.004.243.654,00 atau mencapai 96,16% dari anggaran sebesar Rp36.401.021.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp137.660.653.767,00. Maka pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp102.656.410.113,00 atau turun 74,57%. Perbedaan realisasi tahun 2023 dan tahun 2022 karena pada tahun 2023 ada beberapa Bidang yang tidak lagi mendapatkan alokasi DAK Fisik yaitu Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Reguler dan Penugasan, Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Reguler dan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Reguler (Dinas PUPR), Bidang Perdagangan Sub Bidang Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Kefarmasian (Dinas Kesehatan).

Rincian Dana Alokasi Khusus tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
DAK FISIK			
DAK REGULER:			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD	1.071.999.000,00	1.035.119.081,00	96,56
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.152.547.000,00	664.388.500,00	57,65
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.845.715.000,00	1.744.284.988,00	94,50
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	344.671.000,00	222.180.000,00	64,46
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i> (KB)	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.238.405.000,00	7.699.438.620,00	93,46
DAK PENUGASAN:			
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.545.778.000,00	2.524.446.273,00	99,16
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan- Perdagangan	0,00	0,00	
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.053.013.000,00	1.053.000.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.365.732.000,00	3.365.724.780,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	2.598.850.000,00	2.596.350.840,00	99,90

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-Penugasan	14.184.311.000,00	14.099.310.572,00	99,40
Jumlah	36.401.021.000,00	35.004.243.654,00	96,16

Penerimaan DAK Fisik tahun 2023 tidak mencapai target dibeberapa Bidang. Uraian lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD dengan anggaran sebesar Rp1.071.999.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.035.119.081,00, tidak mencapai target karena ada penawaran dari penyedia saat pelaksanaan tender sehingga Dinas Pendidikan hanya membuat kontrak sesuai hasil tender dan dana yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- b. Kegiatan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD dengan anggaran sebesar Rp1.152.547.000,00 dan realisasi sebesar Rp664.388.500,00, tidak mencapai target karena Dinas Pendidikan tidak membuat kontrak dikarenakan kondisi lahan yang memerlukan anggaran lebih apabila mau dikerjakan kegiatan pembangunan, sehingga yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- c. Kegiatan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP dengan anggaran sebesar Rp1.845.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.744.284.988,00, tidak mencapai target karena ada penawaran dari penyedia saat pelaksanaan tender sehingga Dinas Pendidikan hanya membuat kontrak sesuai hasil tender dan dana yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- d. Kegiatan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga berencana dengan anggaran sebesar Rp344.671.000,00 dan realisasi sebesar Rp222.180.000,00, tidak mencapai target karena pada saat pengadaan harga barang yang tersedia lebih murah dari harga yang ada di DPA sehingga yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- e. Kegiatan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp8.238.405.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.699.438.620,00 tidak mencapai target karena dalam proses ikatan kontrak, harga barang per 1 unit di bawah pagu anggaran sehingga yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- f. Kegiatan Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan anggaran sebesar Rp2.545.778.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.524.446.273,00, tidak mencapai target karena pada saat lelang terjadi penawaran dari penyedia sehingga tidak terserap sepenuhnya sesuai pagu dari kementerian yang tercantum dalam DPA dan dana yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;

- g. Kegiatan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pengendalian Penyakit dengan anggaran sebesar Rp2.598.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.596.350.840,00 tidak mencapai target karena dalam proses ikatan kontrak, harga barang per 1 unit di bawah pagu anggaran sehingga yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP;
- h. Kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah sub bidang Industri dan Menengah -Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan anggaran sebesar Rp14.184.311.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.099.310.572,00, tidak mencapai target karena nilai yang dikontrak hanya sesuai dengan hasil tender sehingga yang masuk di RKUD hanya sesuai dengan apa yang dikontrakan dan yang telah disetujui oleh APIP.

5.1.1.2.1.e Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK - Non Fisik) merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.962.882.000,00	152.759.424.216,00	96,71	81.040.424.563,00
Jumlah	157.962.882.000,00	152.759.424.216,00	96,71	81.040.424.563,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp152.759.424.216,00 atau mencapai 96,71% dari anggaran sebesar Rp157.962.882.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp81.040.424.563,00, maka pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.718.999.653,00 atau naik 88,50%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena pada tahun 2023 terdapat Dana BOS yang masuk di Rincian DAK Non Fisik dimana tahun sebelumnya masuk di Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2023

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
DA	K NON FISIK:			
	BOS Reguler	55.271.300.000,00	55.781.934.832,00	100,92
	BOS Kinerja	2.097.500.000,00	2.097.500.000,00	100,00
	TPG PNSD	71.211.256.000,00	69.148.197.820,00	97,10
	Tamsil Guru PNSD	1.111.500.000,00	1.111.500.000,00	100,00
	BOP PAUD	3.154.800.000,00	3.252.846.000,00	103,11
	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.492.700.000,00	1.493.900.000,00	100,08
	BOKKB-BOK dan Pengawasan Obat dan Makanan	5.498.354.000,00	4.183.671.770,00	76,09
	BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.489.210.000,00	7.489.210.000,00	100,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
BOKKB-BOKB	4.638.962.000,00	2.551.462.900,00	55,00
Pelayanan Kepariwisataan	984.225.000,00	937.162.800,00	95,22
Fasilitasi Penanaman Modal	354.700.000,00	328.203.839,00	92,53
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	391.739.255,00	89,28
Ketahanan Pangan Dan Pertanian	219.575.000,00	219.575.000,00	100,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000,00	3.772.520.000,00	94,31
Jumlah	157.962.882.000,00	152.759.424.216,00	96,71

Rincian Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 beserta nilai kurang/lebih salur dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Nilai Lebih/Kurang Salur 2023
(Dalam Rupiah)

(Daiam Kupian)				
Uraian	Anggaran 2023	Sisa TAYL	Lebih/(Kurang) Salur	Realisasi 2023
DAK NON FISIK:				
BOS Reguler	55.271.300.000,00	0,00	510.634.832,00	55.781.934.832,00
BOS Kinerja	2.097.500.000,00	0,00	0,00	2.097.500.000,00
TPG PNSD	71.211.256.000,00	398.773.080,00	(1.664.285.100,00)	69.148.197.820,00
Tamsil Guru PNSD	1.111.500.000,00	34.750.000,00	34.750.000,00	1.111.500.000,00
BOP PAUD	3.154.800.000,00	0,00	98.046.000,00	3.252.846.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.492.700.000,00	0,00	1.200.000,00	1.493.900.000,00
BOKKB-BOK dan Pengawasan Obat dan Makanan	5.498.354.000,00	1.314.682.230,00	0,00	4.183.671.770,00
BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.489.210.000,00	0,00	0,00	7.489.210.000,00
BOKKB-BOKB	4.638.962.000,00	2.087.499.100,00	0,00	2.551.462.900,00
Pelayanan Kepariwisataan	984.225.000,00	47.062.200,00	0,00	937.162.800,00
Fasilitasi Penanaman Modal	354.700.000,00	26.496.161,00	0,00	328.203.839,00
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	47.060.745,00	0,00	391.739.255,00
Ketahanan Pangan Dan Pertanian	219.575.000,00	0,00	0,00	219.575.000,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000,00	227.480.000,00	0,00	3.772.520.000,00
Jumlah	157.962.882.000,00	4.183.803.516,00	(1.019.654.268,00)	152.759.424.216,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi Sulawesi Utara dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	140.748.807.024,00	136.433.072.334,00	96,93	131.958.415.413,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp140.748.807.024,00 dan terealisasi sebesar Rp136.433.072.334,00 atau 96,93%. Tahun 2023 tidak mencapai target karena pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang tidak terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp131.958.415.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.474.656.921,00 atau naik 3,39%. Kenaikan dari tahun sebelumnya karena terdapat pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	130.748.807.024,00	131.433.072.334,00	100,52	131.958.415.413,00
Bantuan Keuangan – LRA	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00	0,00
Jumlah	140.748.807.024,00	136.433.072.334,00	96,83	131.958.415.413,00

5.1.1.2.2.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan transfer antara daerah dimana Pengalokasian Dana Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 baru disalurkan sampai dengan bulan Mei 2023. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	130.748.807.024,00	131.433.072.334,00	100,52	131.958.415.413,00

Penerimaan ini merupakan Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp131.433.072.334,00 atau mencapai 100,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.748.807.024,00. Tahun 2023 realisasi melebihi target karena adanya keringanan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mendorong masyarakat untuk membayar pajak yang menunggak. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp525.343.079,00 atau turun 0,40%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan karena Pemerintah Provinsi baru menyalurkan pendapatan transfer sampai dengan bulan Mei 2023. Berikut rincian realisasi dan anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023:

Tabel 5.39 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Kendaraan Bermotor	41.231.454.017,00	43.533.728.318,05	105,58	42.224.683.130,91
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.777.417.467,00	25.468.790.821,58	85,53	27.456.092.328,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.989.318.110,00	36.937.799.270,14	115,47	35.897.433.227,36
Pajak Air Permukaan	116.844.427,00	115.810.228,23	99,11	146.013.552,73
Pajak Rokok	27.633.773.003,00	25.376.943.696,00	91,83	26.234.193.174,00
Jumlah	130.748.807.024,00	131.433.072.334,00	100,52	131.958.415.413,00

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp43.533.728.318,05 atau 105,58% dari anggaran sebesar Rp41.231.454.017,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp42.224.683.130,91 terjadi kenaikan sebesar Rp1.309.045.187,14 atau naik 3,10%.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp25.468.790.821,58 atau 85,53% dari anggaran sebesar Rp29.777.417.467,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp27.456.092.328,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.987.301.506,42 atau turun 7,24%.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp36.937.799.270,14 atau 115,47% dari anggaran sebesar Rp31.989.318.110,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp35.897.433.227,36 terjadi kenaikan sebesar Rp1.040.366.042,78 atau naik 2,90%.
- 4) Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp115.810.228,23 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp116.844.427,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp146.013.552,73 terjadi penurunan sebesar Rp30.203.324,50 atau turun 20,69%.
- 5) Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp25.376.943.696,00 atau 91,83% dari anggaran sebesar Rp27.633.773.003,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp26.234.193.174,00 terjadi penurunan sebesar Rp857.249.478,00 atau turun 3,27%.

5.1.1.2.2.b Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan merupakan kebijakan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

76

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bantuan Keuangan – LRA	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00	0,00

Bantuan Keuangan – LRA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,000 atau 50,00%. Tahun 2023 tidak mencapai target karena realisasi penerimaan sesuai dengan yang disalurkan oleh Provinsi Sulawesi Utara. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak dianggarkan

dan tidak ada realisasi, terjadi kenaikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%. Rincian realisasi dan anggaran Bantuan Keuangan Tahun 2023 ada sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00	0,00
Jumlah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00	0,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5.1.1.3.a Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Lain-lain Pendapatan				
Sesuai dengan	04 047 400 000 00	04 007 500 040 00	00.47	45.630.723.818,00
Ketentuan Peraturan	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47	45.030.723.010,00
Perundang-Undangan				

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA terealisasi sebesar Rp21.667.580.942,00 atau mencapai 89,47% dari anggaran sebesar Rp24.217.108.998,00. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena nilai realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak sesuai target. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp45.630.723.818,00, maka pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.963.142.876,00 atau turun 52,52%. Penurunan terjadi di tahun 2023 karena pos anggaran dan realisasi pendapatan hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dianggarkan di Pendapatan Transfer Pusat DAK Non Fisik. Berikut rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Tabel 5.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	30.352.731.509,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47	15.277.992.309,00
Jumlah	24.217.108.998,00	21.667.580.942,00	89,47	45.630.723.818,00

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2023 dianggarkan di Pendapatan Transfer Pusat DAK Non Fisik. Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp30.352.731.509,00.
- b) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan sebesar Rp24.217.108.998,00 dan terealisasi sebesar Rp21.667.580.942,00 atau 89,47%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena realisasi penerimaan sesuai dengan penyaluran dari pusat. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp15.277.992.309,00 terjadi kenaikan sebesar Rp6.389.588.633,00 atau naik 41,82%.

Tabel 5.44 Rincian Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi JKN TA 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Kapitasi	Non Kapitasi	Jumlah
1	PUSKESMAS TONGKAINA	436.024.664,00	0,00	436.024.664,00
2	PUSKESMAS WAWONASA	1.023.175.210,00	0,00	1.023.175.210,00
3	PUSKESMAS TIKALA BARU	1.650.343.320,00	0,00	1.650.343.320,00
4	PUSKESMAS TUMINTING	2.120.856.675,00	0,00	2.120.856.675,00
5	PUSKESMAS SARIO	651.558.038,00	0,00	651.558.038,00
6	PUSKESMAS MINANGA	822.314.029,00	0,00	822.314.029,00
7	PUSKESMAS PANIKI BAWAH	1.584.266.128,00	0,00	1.584.266.128,00
8	PUSKESMAS WENANG	823.599.759,00	0,00	823.599.759,00
9	PUSKESMAS BAILANG	719.458.572,00	0,00	719.458.572,00
10	PUSKESMAS RANOTANA WERU	1.338.970.115,00	0,00	1.338.970.115,00
11	PUSKESMAS BENGKOL	649.580.198,00	0,00	649.580.198,00
12	PUSKESMAS BAHU	1.559.258.758,00	0,00	1.559.258.758,00
13	PUSKESMAS TELING ATAS	1.125.906.911,00	0,00	1.125.906.911,00
14	PUSKESMAS RANOMUUT	1.415.326.081,00	0,00	1.415.326.081,00
15	PUSKESMAS KOMBOS	1.215.138.281,00	0,00	1.215.138.281,00
16	PUSKESMAS BUNAKEN	318.790.742,00	0,00	318.790.742,00
17	RSUD KOTA MANADO	0,00	1.634.632.300,00	1.634.632.300,00
18	RSKDGM KOTA MANADO	0,00	1.037.386.700,00	1.037.386.700,00
19	DINAS KESEHATAN	0,00	1.540.994.461,00	1.540.994.461,00
	Jumlah	17.454.567.481,00	4.213.013.461,00	21.667.580.942,00

5.1.2 BELANJA

Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SILPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja	1.763.769.820.520,00	1.549.615.259.602,00	87,86	1.697.267.679.056,34

Belanja Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.763.769.820.520,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.549.615.259.602,00 atau 87,86%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai pagu anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.697.267.679.056,34 mengalami penurunan sebesar Rp147.652.419.454,34 atau turun sebesar 8,70%. Perbedaan realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan oleh realisasi belanja pegawai dan belanja modal di tahun 2023 yang berkurang. Penjelasan pos-pos belanja didasarkan pada jenis belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap penjelasan pos belanja merujuk kepada Rincian Realisasi APBD berdasarkan Obyek belanja pada masing-masing fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2023 belanja disajikan menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
а	Belanja Operasi	1.376.077.821.635,00	1.272.156.189.006,00	92,45	1.207.180.913.062,06
b	Belanja Modal	376.620.020.916,00	276.644.202.315,00	73,45	484.832.027.194,28
С	Belanja Tak Terduga	11.071.977.969,00	814.868.281,00	7,36	5.254.738.800,00
	Jumlah	1.763.769.820.520,00	1.549.615.259.602,00	87,86	1.697.267.679.056,34

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	1.376.077.821.635,00	1.272.156.189.006,00	92,45	1.207.180.913.062,06

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.376.077.821.635,00 direalisasikan sebesar Rp1.272.156.189.006,00 atau 92,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.207.180.913.062,06 mengalami kenaikan sebesar Rp64.975.275.943,94 atau naik 5,38%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan karena bertambahnya belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja hibah.

Belanja Operasi diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	625.918.296.480,00	586.938.577.305,80	93,77	592.491.807.529,00
2	Belanja Barang dan Jasa	626.372.901.767,00	581.630.263.139,20	92,86	560.338.936.215,06
3	Belanja Bunga	18.200.000.000,00	17.090.246.155,00	93,90	11.792.961.630,00
4	Belanja Hibah	97.857.022.481,00	82.599.102.406,00	84,41	40.959.707.688,00
5	Belanja Bantuan Sosial	7.729.600.907,00	3.898.000.000,00	50,43	1.597.500.000,00
Jumlah		1.376.077.821.635,00	1.272.156.189.006,00	92,45	1.207.180.913.062,06

Rincian masing-masing jenis belanja diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Manado. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	625.918.296.480,00	586.938.577.305,80	93,77	592.491.807.529,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp625.918.296.480,00 dan direalisasikan sebesar Rp586.938.577.305,80 atau 93,77%. Anggaran belanja pegawai tidak terserap seluruhnya karena adanya mutasi keluar pegawai, pegawai yang memasuki masa purna bakti, pegawai yang meninggal serta potongan perhitungan tambahan penghasilan PNS (bobot displin antara lain penilaian beban kerja dan kondisi kerja). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp592.491.807.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.553.230.223,20 atau 0,94%. Penurunan terjadi karena adanya efisiensi belanja.

Anggaran dan Realisasi per Komponen Akun Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Komponen Akun TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	361.129.103.923,00	337.511.870.257,00	93,46	346.146.750.095,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	129.888.472.761,00	124.979.109.891,00	96,22	123.793.540.163,00

No.	Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.509.819.545,00	101.863.944.911,80	92,18	100.173.210.346,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.498.409.251,00	20.834.148.472,00	92,60	20.771.947.736,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	982.009.000,00	947.903.774,00	96,53	804.759.189,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	910.482.000,00	801.600.000,00	88,04	801.600.000,00
	Jumlah	625.918.296.480,00	586.938.577.305,80	93,77	592.491.807.529,00

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp361.129.103.923,00 dan direalisasikan sebesar Rp337.511.870.257,00 atau 93,46%. Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN tidak terserap seluruhnya karena adanya mutasi keluar pegawai pindah ke daerah lain, adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti dan pegawai yang meninggal. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 346.146.750.095,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.634.879.838,00 karena adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti, adanya mutasi pegawai dan adanya pegawai yang meninggal.

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji Pokok ASN	268.140.631.281,00	255.321.963.044,00	95,22	259.303.267.945,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.075.230.228,00	21.733.631.316,00	94,19	21.965.414.981,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.570.244.793,00	9.887.139.900,00	93,54	9.274.118.714,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.686.529.298,00	13.329.179.170,00	90,76	13.745.888.550,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.974.634.075,00	4.220.130.000,00	84,83	4.282.355.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	13.418.949.835,00	12.435.072.767,00	92,67	12.632.220.660,00
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	519.377.870,00	318.471.038,00	61,32	322.154.011,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.648.470,00	3.460.971,00	74,45	3.478.422,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.303.583.242,00	18.194.011.842,00	78,07	22.495.931.857,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	735.607.170,00	517.202.553,00	70,31	530.479.987,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.699.667.661,00	1.551.607.656,00	91,29	1.591.439.968,00
Jumlah	361.129.103.923,00	337.511.870.257,00	93,46	346.146.750.095,00

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp129.888.472.761,00 dan direalisasikan sebesar Rp124.979.109.891,00 atau 96,22%. Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN tidak terserap seluruhnya karena adanya mutasi keluar pegawai pindah ke daerah lain, adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti, adanya pegawai yang meninggal serta perhitungan

potongan disiplin pada ASN. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi Rp123.793.540.163,00 terjadi kenaikan sejumlah Rp1.185.569.728,00 karena adanya mutasi keluar pegawai pindah ke daerah lain, adanya pegawai yang memasuki masa purna bakti dan pegawai yang meninggal.

Tabel 5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	116.328.928.950,00	111.766.623.508,00	96,08	112.860.606.308,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	13.559.543.811,00	13.212.486.383,00	97,44	10.932.933.855,00
Jumlah	129.888.472.761,00	124.979.109.891,00	96,22	123.793.540.163,00

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp110.509.819.545,00 dan direalisasikan sebesar Rp101.863.944.911,80 atau 92,18%. Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak terserap seluruhnya karena terdapat realisasi belanja tunjangan profesi guru (TPG) dan belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi Rp100.173.210.346,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.690.734.565,80 atau 1,69% karena belanja insentif dan belanja honorarium yang meningkat.

Tabel 5.53 Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.699.047.657,00	11.439.547.652,00	97,78	10.342.778.371,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	687.666.814,00	389.558.072,00	56,65	364.392.567,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	71.211.256.000,00	66.550.344.520,00	93,45	71.734.295.220,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.111.500.000,00	1.089.000.000,00	97,98	439.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.942.625.074,00	12.317.251.667,80	82,43	9.459.801.688,00
Belanja Honorarium	9.653.884.000,00	8.975.258.000,00	92,97	6.569.842.500,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.203.840.000,00	1.102.985.000,00	91,62	1.262.600.000,00
Jumlah	110.509.819.545,00	101.863.944.911,80	92,18	100.173.210.346,00

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp22.498.409.251,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.834.148.472,00 atau 92,60%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena realisasi belanja tunjangan yang tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

sebesar Rp20.771.947.736,00 terjadi kenaikan sebesar Rp62.200.736,00 atau naik 0,30.% karena realisasi belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota serta belanja tunjangan transportasi yang meningkat.

Tabel 5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	100,00	887.565.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.877.800,00	75.175.800,00	88,57	72.813.300,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.499.040,00	92.118.240,00	84,13	92.263.080,00
Belanja Uang Paket DPRD	87.954.300,00	76.482.000,00	86,96	76.167.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	100,00	1.286.969.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	300.304.104,00	282.757.178,00	94,16	320.815.981,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	67.416.480,00	52.236.976,00	77,48	49.353.785,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	100,00	5.019.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	100,00	1.270.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	180.595.938,00	177.822.964,00	98,46	142.385.788,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.027.890.779,00	5.553.044.814,00	92,12	5.539.764.552,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.103.696.260,00	6.038.400.000,00	85,00	6.011.200.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.064.050,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Jumlah	22.498.409.251,00	20.834.148.472,00	92,60	20.771.947.736,00

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp982.009.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp947.903.774,00 atau 96,53%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena secara umum belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah tidak mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp804.759.189,00, terdapat kenaikan sebesar Rp143.144.585,00 atau naik 17,79% karena belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah mengalami kenaikan dibanding tahun 2022.

Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	50.700.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.218.900,00	3.822.000,00	90,59	4.116.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	91.260.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.007.100,00	4.707.300,00	94,01	4.707.200,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	470.000,00	437.515,00	93,09	453.969,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.960,00	65,33	2.020,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	821.650.000,00	796.974.999,00	97,00	642.600.000,00
Jumlah	982.009.000,00	947.903.774,00	96,53	804.759.189,00

f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp910.482.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp801.600.000,00 atau 88,04%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena belanja dana operasional pimpinan DPRD tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp801.600.000,00 tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan terhadap realisasi.

Tabel 5.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	708.882.000,00	600.000.000,00	84,64	600.000.000,00
Jumlah	910.482.000,00	801.600.000,00	88,04	801.600.000,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah TA 2023

(Dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228.139.977.352,00	215.009.722.493,00	94,24	226.954.603.864,00
Dinas Kesehatan	91.464.510.287,00	87.162.885.279,80	95,30	79.294.014.208,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.133.328.000,00	8.616.355.938,00	94,34	9.068.637.345,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.000.214.455,00	4.807.056.387,00	96,14	4.346.131.676,00
Dinas Kebakaran	6.916.810.000,00	5.580.065.319,00	80,67	4.730.183.897,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.403.677.360,00	8.106.538.765,00	86,21	9.665.435.954,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.630.894.000,00	2.526.127.328,00	96,02	2.497.112.317,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.618.608.605,00	3.452.693.863,00	95,41	3.426.460.192,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.612.356.000,00	4.416.088.701,00	95,74	4.871.241.805,00
Dinas Ketenagakerjaan	3.813.623.000,00	3.570.138.190,00	93,62	3.076.850.423,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	3.605.528.000,00	3.454.227.623,00	95,80	3.414.710.680,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Perlindungan Anak				
Dinas Pangan	3.128.900.706,00	3.026.484.012,00	96,73	2.887.582.530,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.201.356.400,00	4.170.896.432,00	99,27	4.874.518.222,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.793.658.590,00	3.654.518.723,00	96,33	3.791.529.542,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.794.455.000,00	3.372.646.929,00	88,88	3.643.819.313,00
Dinas Perhubungan	10.838.564.020,00	10.410.170.428,00	96,05	11.379.702.326,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.787.640.202,00	3.641.241.254,00	96,13	3.723.873.050,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.509.878.800,00	3.242.853.564,00	92,39	2.715.943.914,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.180.296.945,00	6.993.405.728,00	97,40	6.890.006.800,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	3.145.396.000,00	3.063.792.289,00	97,41	3.169.139.415,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.544.869.200,00	3.065.907.627,00	86,49	3.092.863.878,00
Dinas Pariwisata	4.563.963.000,00	4.491.516.212,00	98,41	4.289.276.609,00
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	7.798.928.880,00	7.502.613.478,00	96,20	7.886.974.189,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.289.237.000,00	5.138.169.791,00	97,14	4.979.952.549,00
Sekretariat Daerah	22.211.581.159,00	21.122.882.852,00	95,10	20.232.154.514,00
Inspektorat	8.328.373.935,00	7.907.452.554,00	94,95	8.136.108.048,00
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4.583.333.455,00	4.450.921.960,00	97,11	4.940.804.748,00
Badan Pendapatan Daerah	21.888.838.471,00	21.236.703.304,00	97,02	20.011.376.873,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	34.724.788.332,00	28.995.753.553,00	83,50	32.790.109.426,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.652.353.062,00	6.475.005.272,00	97,33	6.031.726.938,00
Sekretariat DPRD	27.338.343.251,00	25.574.878.757,00	93,55	25.502.668.163,00
Kecamatan Bunaken	5.029.392.234,00	4.099.697.256,00	81,51	3.594.170.066,00
Kecamatan Singkil	5.696.732.416,00	5.607.947.117,00	98,44	4.958.437.962,00
Kecamatan Tikala	3.947.039.515,00	3.826.265.153,00	96,94	4.033.204.567,00
Kecamatan Wanea	6.806.158.560,00	6.279.295.023,00	92,26	6.309.643.611,00
Kecamatan Malalayang	8.411.780.560,00	8.138.237.294,00	96,75	8.772.254.014,00
Kecamatan Bunaken Kepulauan	4.011.139.260,00	3.781.748.102,00	94,28	3.873.231.705,00
Kecamatan Tuminting	6.826.730.585,00	6.287.796.414,00	92,11	5.310.085.221,00
Kecamatan Wenang	7.182.279.060,00	6.938.650.344,00	96,61	6.172.900.421,00
Kecamatan Sario	5.189.857.865,00	4.204.136.894,00	81,01	4.088.745.783,00
Kecamatan Mapanget	8.105.728.408,00	7.607.265.738,00	93,85	7.547.676.544,00
Kecamatan Paal Dua	6.067.174.550,00	5.927.823.365,00	97,70	5.515.944.227,00
Jumlah	625.918.296.480,00	586.938.577.305,80	93,77	592.491.807.529,00

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa	626.372.901.767,00	581.630.263.139,20	92,86	560.338.936.215,06

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp626.372.901.767,00 dan direalisasikan sebesar Rp581.630.263.139,20 atau 92,86%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp560.338.936.215,06 mengalami kenaikan sebesar Rp21.291.326.924,14 atau naik 3,80%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena ada peningkatan belanja barang, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas sepanjang tahun 2023.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Akun TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang Pakai Habis	204.830.791.181,00	189.072.449.147,20	92,31	182.892.046.085,00
Belanja Barang tak habis pakai	0,00	0,00	0,00	4.641.794.300,00
Belanja Jasa Kantor	236.931.981.454,00	223.886.542.472,00	94,49	218.278.401.147,06
Belanja luran Jaminan/Asuransi	17.212.480.647,00	16.550.302.244,00	96,15	13.369.463.794,00
Belanja Sewa Tanah	437.100.000,00	396.402.000,00	90,69	29.751.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.995.583.597,00	5.309.269.215,00	88,55	4.189.405.293,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.911.727.400,00	5.145.834.300,00	87,04	3.927.261.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.939.584.926,00	10.822.399.221,00	90,64	13.677.107.007,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.754.446.720,00	4.011.208.018,00	84,37	1.659.077.210,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	520.000.000,00	172.010.000,00	33,08	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.597.000.000,00	1.536.563.430,00	96,22	597.636.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	49.480.741,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	2.640.835.000,00	2.533.886.000,00	95,95	198.413.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.248.373.509,00	10.184.256.486,00	83,15	10.660.434.861,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.236.406.806,00	8.746.800.611,00	85,45	10.634.027.276,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.526.762.464,00	13.129.268.166,00	97,06	18.727.651.925,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.807.303.586,00	57.296.339.642,00	91,23	35.978.682.259,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.859.184.000,00	1.556.876.730,00	83,74	702.371.717,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.019.280.000,00	936.406.000,00	91,87	891.320.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.780.344.400,00	5.420.998.400,00	93,78	9.568.125.471,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	26.123.716.077,00	24.922.451.057,00	95,40	29.666.486.129,00
Jumlah	626.372.901.767,00	581.630.263.139,20	92,86	560.338.936.215,06

Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp204.830.791.181,00 dan direalisasikan sebesar Rp189.072.449.137,20 atau 92,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp182.892.046.085,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.180.403.052,20 atau naik 3.38%.
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.641.794.300,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.641.794.300,00 atau 100,00%.
- c) Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp236.931.981.454,00 dan direalisasikan sebesar Rp223.886.542.472,00 atau Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebesar Rp218.278.401.147,06 mengalami kenaikan sebesar Rp5.608.141.324,94 atau naik 2,57%.
- d) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.212.480.647,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.550.302.244,00 atau 96,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.369.463.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.180.838.450,00 atau 23,79%.
- e) Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp437.100.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp396.402.000,00 atau 90,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp29.751.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp366.651.000,00 atau 1.232,40%.
- f) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.995.583.597,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.309.269.215,00 atau 88,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.189.405.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.119.863.922,00 atau 26,73%.
- g) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.911.727.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.145.834.300,00 atau 87,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.927.261.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.218.573.300,00 atau naik 31,03%.
- h) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.939.584.926,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.822.399.221,00 atau 90,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.677.107.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.854.707.786,00 atau 20,87%.

- i) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.754.446.720,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.011.208.018,00 atau 84,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.659.077.210,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.352.130.808,00 atau 141,77%.
- j) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp172.010.000,00 atau 33,08%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi, maka terjadi kenaikan sebesar Rp172.010.000,00 atau naik 100,00%.
- k) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.597.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.536.563.430,00 atau 96,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp597.636.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp938.927.430,00 atau naik 157,11%.
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp49.480.741,00 mengalami penurunan sebesar 100,00%.
- m) Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.640.835.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.533.886.000,00 atau 95,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp198.413.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.335.473.000,00 atau naik 1.177,08%.
- n) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp12.248.373.509,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.184.256.486,00 atau 83,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.660.434.861,00 terjadi penurunan sebesar Rp476.178.375,00 atau turun 4,47%
- o) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.236.406.806,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.746.800.611,00 atau 85,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.634.027.276,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.887.226.665,00 atau turun 17,75%.
- p) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.526.762.464,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.129.268.166,00 atau 97,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.727.651.925,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.598.383.759,00 atau turun 29,89%.
- q) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp62.807.303.586,00 dan direalisasikan sebesar Rp57.296.339.642,00 atau 91,23%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp35.978.682.259,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.317.657.383,00 atau naik 59,25%.
- r) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.859.184.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.556.876.730,00 atau 83,74%.

- Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp702.371.717,00 mengalami kenaikan sebesar Rp854.505.013,00 atau naik 121,66%.
- s) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.019.280.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp936.406.000,00 atau 91,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp891.320.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.086.000,00 atau naik 5.06%.
- t) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.780.344.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.420.998.400,00 atau 93,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp9.568.125.471,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.147.127.071,00 atau turun 43,34%.
- u) Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.123.716.077,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.922.451.057,00 atau 95,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp29.666.486.129,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.744.035.072,00 atau turun 15,99%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah
TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.685.851.237,00	47.905.305.411,00	87,60	57.284.982.662,00
Dinas Kesehatan	63.421.215.568,00	54.048.057.802,20	85,22	54.103.038.979,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.187.936.430,00	24.993.579.377,00	88,67	33.261.863.137,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	111.121.751.800,00	105.313.700.367,00	94,77	98.237.784.820,00
Dinas Kebakaran	6.461.219.180,00	6.186.426.368,00	95,75	5.727.740.342,00
Satuan Polisi Pamong Praja	17.199.853.929,00	16.893.409.236,00	98,22	15.406.886.443,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.768.873.019,00	1.445.286.615,00	81,71	1.122.865.963,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.891.003.400,00	1.649.729.481,00	87,24	972.201.800,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.019.582.469,00	7.813.922.087,00	86,63	4.876.861.204,00
Dinas Ketenagakerjaan	8.511.595.285,00	8.046.418.784,00	94,53	5.837.010.025,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.362.364.400,00	2.220.666.215,00	94,00	1.664.747.432,00
Dinas Pangan	1.065.529.700,00	1.024.747.231,00	96,17	1.292.340.168,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.942.256.210,00	17.803.370.838,00	93,99	17.798.190.658,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.313.797.710,00	2.225.084.375,00	96,17	1.890.029.906,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.989.268.043,00	4.756.112.087,00	79,41	2.496.740.653,00
Dinas Perhubungan	4.006.144.718,00	3.894.000.013,00	97,20	3.279.494.639,00

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.305.254.977,00	15.151.206.343,00	98,99	15.006.149.236,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	791.593.346,00	764.324.761,00	96,56	1.682.971.819,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.180.038.676,00	2.139.060.155,00	98,12	1.917.579.258,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	4.734.465.948,00	4.676.643.525,00	98,78	3.905.735.289,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	624.391.630,00	533.277.462,00	85,41	588.068.639,00
Dinas Pariwisata	7.478.447.122,00	7.277.181.491,00	97,31	3.844.620.870,00
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2.213.463.724,00	1.877.785.787,00	84,83	2.952.478.665,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.998.631.467,00	7.775.018.432,00	86,40	11.706.724.199,00
Sekretariat Daerah	87.395.943.343,00	83.282.623.739,00	95,29	76.253.033.327,00
Inspektorat	6.467.293.822,00	6.297.570.848,00	97,38	4.771.449.475,06
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6.100.415.300,00	5.767.903.870,00	94,55	3.454.896.017,00
Badan Pendapatan Daerah	7.315.969.140,00	6.771.294.355,00	92,55	6.335.484.869,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.471.815.370,00	11.837.497.083,00	81,80	11.041.103.034,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.627.302.398,00	4.622.630.755,00	69,75	4.116.898.174,00
Sekretariat DPRD	43.293.155.300,00	42.657.952.931,00	98,53	32.153.423.287,00
Kecamatan Bunaken	3.887.327.344,00	3.829.198.639,00	98,50	3.773.942.218,00
Kecamatan Singkil	6.069.701.382,00	5.950.367.275,00	98,03	6.026.534.114,00
Kecamatan Tikala	5.253.977.140,00	4.824.089.740,00	91,82	5.759.931.168,00
Kecamatan Wanea	9.131.531.324,00	9.051.451.639,00	99,12	9.092.855.130,00
Kecamatan Malalayang	9.116.877.484,00	9.066.280.734,00	99,45	9.194.357.012,00
Kecamatan Bunaken Kepulauan	3.346.068.530,00	3.309.108.988,00	98,90	2.997.860.544,00
Kecamatan Tuminting	6.648.995.041,00	6.560.169.746,00	98,66	6.246.700.125,00
Kecamatan Wenang	9.259.122.317,00	8.892.862.267,00	96,04	9.081.625.384,00
Kecamatan Sario	5.247.808.010,00	5.168.296.007,00	98,48	4.836.686.989,00
Kecamatan Mapanget	9.461.493.664,00	9.386.884.476,00	99,21	9.530.033.632,00
Kecamatan Paal Dua	8.003.574.870,00	7.939.765.804,00	99,20	8.815.014.910,00
Jumlah	626.372.901.767,00	581.630.263.139,20	92,86	560.338.936.215,06

5.1.2.1.c Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang. Secara ringkas Belanja Bunga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bunga	18.200.000.000,00	17.090.246.155,00	93,90	11.792.961.630,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp18.200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.090.246.155,00 atau 93,90%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena realisasi belanja bunga di tahun 2023 sesuai dengan nilai tagihan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan nilai yang langsung dipotong

dari realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.792.961.630,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.297.284.525,00 atau naik 44,92%. Kenaikan realisasi terjadi karena pembayaran bunga untuk pinjaman PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur pada Tahun 2022 hanya dilakukan 6 (enam) kali pembayaran, sedangkan untuk tahun 2023 sudah dimulai sejak bulan Januari dan terdapat 12 (dua belas) kali pembayaran bunga untuk pinjaman reguler dan pinjaman PEN.

Berikut rincian pembayaran kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kota Manado kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	Metode Pembayaran
20/01/2023	000380/SP2D-LS/5- 02.0-00.0- 00.02/I/2023	Kewajiban Bunga Pinjaman kepada PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Periode Januari 2023	1.299.558.066,00	SP2D
12/04/2023	003823/SP2D-LS/5- 02.0-00.0- 00.02/IV/2023	Kewajiban Bunga Pinjaman kepada PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Periode April 2023	SP2D	
18/07/2023	009779/SP2D-LS/5- 02.0-00.0- 00.02/VII/2023	Kewajiban Bunga Pinjaman kepada PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Periode Juli 2023	999.780.781,00	SP2D
23/10/2023			SP2D	
02/01/2023	23 KMK No. Kewajiban Bunga Pinjaman 1.086.654.871,00 45/KM.7/2022 Potong langsung DAU Januari 2023		Potongan Langsung DAU	
31/01/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/01/2023 potong langsung DAU Februari 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU
28/02/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 28/02/2023 potong langsung DAU Maret 2023	981.494.722,00	Potongan Langsung DAU
31/03/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/03/2023 potong langsung DAU April 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU
28/04/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 30/04/2023 potong langsung DAU Mei 2023	1.051.601.488,00	Potongan Langsung DAU
31/05/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/05/2023 potong langsung DAU Juni 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU
27/06/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 30/06/2023 potong langsung DAU Juli 2023	1.051.601.488,00	Potongan Langsung DAU
31/07/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/07/2023 potong langsung DAU Agustus 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	Metode Pembayaran
31/08/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/08/2023 potong langsung DAU September 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU
29/09/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	=		Potongan Langsung DAU
31/10/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 31/10/2023 potong langsung DAU November 2023	1.086.654.871,00	Potongan Langsung DAU
30/11/2023	KMK No. 45/KM.7/2022	Kewajiban Bunga Pinjaman PEN jatuh tempo 30/11/2023 potong langsung DAU Desember 2023	1.051.601.488,00	Potongan Langsung DAU
		Jumlah	17.090.246.155,00	

5.1.2.1.d Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Secara ringkas Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah	97.857.022.481,00	82.599.102.406,00	84,41	40.959.707.688,00

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp97.857.022.481,00 dan direalisasikan sebesar Rp82.599.102.406,00 atau 84,41%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena realisasi belanja hibah kepada badan lembaga organisasi kemasyarakatan yang tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp40.959.707.688,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.639.394.718,00 atau naik 101,66%. Perbedaan realisasi belanja hibah tahun 2022 dan tahun 2023 karena realisasi belanja hibah atas Dana BOS Swasta dicatat di tahun 2023 yang sebelumnya tidak dicatat ditahun 2022.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun 2022 dan 2021 berdasarkan klasifikasi penerimanya.

Tabel 5.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	498.918.000,00	498.918.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2022
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	95.455.816.481,00	80.197.896.406,00	84,02	39.792.654.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.902.288.000,00	1.902.288.000,00	100,00	1.167.053.688,00
Jumlah	97.857.022.481,00	82.599.102.406,00	84,41	40.959.707.688,00

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp498.918.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp498.918.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak ada realisasi. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan hibah kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah No:00.7.7.1/D.08/DUKCAPIL/450/2023.
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp95.455.816.481,00 dan direalisasikan sebesar Rp80.197.896.406,00 atau 84,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp39.792.654.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.405.242.406,00 atau naik 101,54%. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah antara lain Satuan Pendidikan Swasta, rumah-rumah ibadah, KONI, pihak terkait Pemilu, pihak terkait pengamanan, serta badan dan lembaga yang bersifat nirlaba. Rincian terkait besaran hibah per lembaga terdapat pada Lampiran.
- c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.902.288.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.902.288.000,00 atau 100,00%. Tahun 2023 realisasi sesuai dengan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.167.053.688,00 terdapat kenaikan sebesar Rp735.234.312,00 atau naik 63%.

Tabel 5.65 Rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2022
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	486.848.000,00	486.848.000,00	100,00	298.681.248,00
Partai Golongan Karya	169.488.000,00	169.488.000,00	100,00	103.980.888,00
Partai Demokrat	321.496.000,00	321.496.000,00	100,00	197.237.796,00
Partai Nasional Demokrat	271.928.000,00	271.928.000,00	100,00	166.827.828,00
Partai Perindo	94.712.000,00	94.712.000,00	100,00	58.105.812,00
Partai Keadilan Sejahtera	85.936.000,00	85.936.000,00	100,00	52.721.736,00
Partai Hanura	107.432.000,00	107.432.000,00	100,00	65.909.532,00
Partai Solidaritas Indonesia	58.328.000,00	58.328.000,00	100,00	35.784.228,00
Partai Gerindra	160.840.000,00	160.840.000,00	100,00	98.675.340,00
Partai Amanat Nasional	145.280.000,00	145.280.000,00	100,00	89.129.280,00
Jumlah	1.902.288.000,00	1.902.288.000,00	100,00	1.167.053.688,00

5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Secara ringkas Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial	7.729.600.907,00	3.898.000.000,00	50,43	1.597.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.729.600.907,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.898.000.000,00 atau 50,43%. Tahun 2023 realisasi tidak sesuai anggaran karena yang terealisasi untuk belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat hanya sesuai yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat lanjut usia. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.597.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.300.500.000,00 atau naik 144,01% karena kenaikan jumlah yang terdaftar di DTKS. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.729.600.907,00	3.898.000.000,00	50,43	1.597.500.000,00
Jumlah	7.729.600.907,00	3.898.000.000,00	50,43	1.597.500.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Belanja Aset Tetap Lainnya. Secara ringkas Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal	376.620.020.916,00	276.644.202.315,00	73,45	484.832.027.194,28

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp376.620.020.916,00 dan direalisasikan sebesar Rp276.644.202.315,00 atau 73,45%. Anggaran Belanja Modal tidak terserap seluruhnya karena ada pekerjaan/pengadaan

belanja modal yang belum selesai per 31 Desember 2023 sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp484.832.027.194,28 mengalami penurunan sebesar Rp208.187.824.879,28 atau turun 42,94%. Realisasi tahun 2023 turun dibanding tahun 2022 karena adanya efisiensi anggaran. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tanah	6.019.160.000,00	5.806.080.000,00	96,46	4.648.762.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.441.003.737,00	47.399.056.283,00	92,14	42.971.412.083,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.884.497.100,00	128.072.927.886,00	94,25	208.704.289.954,67
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.386.206.426,00	92.448.932.428,00	51,25	227.037.193.461,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.889.153.653,00	2.917.205.718,00	100,97	1.470.369.695,00
Jumlah	376.620.020.916,00	276.644.202.315,00	73,45	484.832.027.194,28

5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan tanah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	6.019.160.000,00	5.806.080.000,00	96,46	4.648.762.000,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.019.160.000,00 dan direalisasikan sejumlah Rp5.806.080.000,00 atau 96,46%. Tahun 2023 realisasi tidak sesuai anggaran karena realisasi belanja modal tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terserap seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.648.762.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.157.318.000,00 atau 24,90%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena meningkatnya realisasi belanja modal tanah untuk pembayaran ganti rugi dan penyerahan/pelepasan hak tanah untuk pekerjaan pembebasan lahan jalan dan untuk bangunan industri.

Adapun rincian Belanja Modal Tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.71 Rincian Belanja Modal Tanah Per SKPD TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	799.999.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.019.160.000,00	3.806.080.000,00	94,70	1.931.263.000,00

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.917.500.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.019.160.000,00	5.806.080.000,00	96,46	4.648.762.000,00

5.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.441.003.737,00	47.399.056.283,00	92,14	42.971.412.083,61

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp51.441.003.737,00 dan direalisasikan sebesar Rp47.399.056.283,00 atau 92,14%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp42.971.412.083,61 mengalami kenaikan sebesar Rp4.427.644.199,39 atau 10,30%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena pembelian peralatan dan mesin ditahun 2023 yang lebih banyak dibanding tahun 2022.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per akun dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Akun TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Alat Besar	612.823.000,00	575.760.200,00	93,95	2.941.877.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan	10.633.480.081,00	10.165.400.000,00	95,60	11.871.028.550,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.541.000,00	11.025.000,00	62,85	798.023.400,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.191.367.653,00	12.763.796.091,00	89,94	10.153.968.858,61
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	900.975.000,00	829.297.000,00	92,04	188.029.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.222.038.397,00	12.917.596.412,00	97,70	3.333.871.288,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	322.530.580,00	120.228.000,00	37,28	141.946.000,00
Belanja Modal Komputer	11.106.998.736,00	9.597.704.580,00	86,41	12.051.405.843,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	378.152.850,00	366.699.000,00	96,97	899.204.644,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	95.238.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	89.680.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Rambu- rambu	34.410.000,00	34.100.000,00	99,10	76.121.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.686.440,00	17.450.000,00	84,35	331.018.000,00
Jumlah	51.441.003.737,00	47.399.056.283,00	92,14	42.971.412.083,61

- 1) Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp612.823.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp575.760.200,00 atau 93,95%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.941.877.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.366.117.300,00 atau 80,43%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado mengurangi jumlah pembelian alatalat besar.
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.633.480.081,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.165.400.000,00 atau 95,60%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.871.028.550,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.705.628.550,00 atau 14,37%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado mengurangi jumlah pembelian angkutan.
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.541.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.025.000,00 atau 62,85%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp798.023.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp786.998.400,00 atau 98,62%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado mengurangi jumlah pembelian alat bengkel dan alat ukur.
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp14.191.367.653,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.763.796.091,00 atau 89,94%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.153.968.858,61 mengalami kenaikan sebesar Rp2.609.827.232,39 atau 25,70%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado menambah volume pembelian alat kantor dan rumah tangga yang sudah rusak.
- 5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp900.975.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp829.297.000,00 atau 92,04%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp188.029.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp641.268.000,00 atau naik 341,05%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado menambah volume pembelian alat studio, komunikasi dan pemancar.
- 6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.222.038.397,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.917.596.412,00 atau 97,70%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.333.871.288,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.583.725.124,00 atau 287,47%. Perbedaan realisasi

- tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado menambah volume yang besar untuk pembelian peralatan kedokteran dan kesehatan.
- 7) Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp322.530.580,00 dan direalisasikan sebesar Rp120.228.000,00 atau 37,28%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp141.946.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.718.000,00 atau 15,30%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena Pemerintah Kota Manado mengurangi volume pembelian peralatan laboratorium.
- 8) Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.106.998.736,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.597.704.580,00 atau 86,41%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.051.405.843,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.453.701.263,00 atau 20,36%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya penghematan anggaran pengadaan komputer di tahun 2023.
- 9) Belanja Modal Alat Eksplorasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp378.152.850,00 dan direalisasikan sebesar Rp366.699.000,00 atau 96,97%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp899.204.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp532.505.644,00 atau turun 59,22%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya penghematan anggaran pengadaan alat eksplorasi di tahun 2023.
- 10) Belanja Modal Alat Pengeboran Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran dan tidak ada realisasi tetapi Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp95.238.000,00. Tahun 2023 tidak ada anggaran dan tidak ada realisasi karena adanya penghematan.
- 11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran dan tidak ada realisasi tetapi Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp89.680.000,00. Tahun 2023 tidak ada anggaran dan tidak ada realisasi karena adanya penghematan.
- 12) Belanja Modal Rambu-rambu Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp34.410.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.100.000,00 atau 99,10%. Tahun 2023 realisasi tidak terserap seluruhnya dari anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp76.121.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.021.000,00 atau turun 55,20%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya efisiensi anggaran pengadaan rambu-rambu.
- 13) Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.686.440,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.450.000,00 atau 84,35%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp331.018.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp313.568.000,00 atau turun 94,73%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya efisiensi anggaran pengadaan peralatan olahraga.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.74 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

				(Dalam Rupiah)
SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.705.002.935,00	6.460.168.975,00	96,35	2.073.523.493,00
Dinas Kesehatan	22.205.834.575,00	19.294.035.013,00	86,89	7.594.262.445,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.372.228.000,00	1.335.695.200,00	97,34	5.018.266.030,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.346.009.081,00	2.282.372.200,00	97,29	482.472.000,00
Dinas Kebakaran	392.786.000,00	390.700.000,00	99,47	321.903.200,00
Satuan Polisi Pamong Praja	825.332.000,00	806.140.000,00	97,67	477.882.900,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.953.000,00	119.443.000,00	59,74	710.290.600,00
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	16.330.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	916.396.000,00	617.779.000,00	67,41	309.142.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	161.054.340,00	83.517.000,00	51,86	43.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan &	0,00	0,00	0,00	23.360.000,00
Perlindungan Anak Dinas Pangan	63.823.724,00	63.000.000,00	98,71	53.672.120,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.942.925.750,00	3.884.018.500,00	98,51	8.001.620.410,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	515.494.040,00	502.606.000,00	97,50	185.732.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	79.065.000,00	79.000.000,00	99,92	234.000.000,00
Berencana Dinas Perhubungan	75.523.000,00	75.020.000,00	99,33	1.535.879.000,00
Dinas Komunikasi dan	1.528.034.150,00	1.525.073.500,00	99,81	3.457.692.290,00
Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	60.205.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	184.899.000,00	184.310.000,00	99,68	18.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	119.600.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108.420.000,00	108.263.000,00	99,86	56.221.000,00
Dinas Pariwisata	250.629.000,00	250.366.000,00	99,90	29.385.000,00
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	21.908.000,00	21.900.000,00	99,96	68.460.400,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.537.055.000,00	2.527.445.760,00	99,62	7.313.000,00
Sekretariat Daerah	2.505.341.050,00	2.385.843.125,00	95,23	7.054.037.794,61
Inspektorat	243.657.090,00	230.600.000,00	94,64	113.529.900,00
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	132.500.750,00	130.953.400,00	98,83	92.517.880,00
Badan Pendapatan Daerah	680.652.000,00	673.966.000,00	99,02	1.075.320.130,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	723.663.057,00	690.200.000,00	95,38	737.213.740,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	305.576.895,00	301.151.000,00	98,55	645.624.436,00
Sekretariat DPRD	1.012.203.000,00	993.980.300,00	98,20	2.139.342.800,00
Kecamatan Bunaken	96.510.060,00	96.510.060,00	100,00	0,00
Kecamatan Singkil	16.594.500,00	14.650.000,00	88,28	18.100.000,00
Kecamatan Tikala	257.781.960,00	257.352.500,00	99,83	770.000,00
Kecamatan Wanea Kecamatan Malalayang	134.543.100,00	134.291.750,00	99,81 0,00	14.436.400,00 11.998.800,00
	3,50	3,50	3,00	

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Kecamatan Bunaken Kepulauan	106.338.000,00	105.904.000,00	99,59	0,00
Kecamatan Tuminting	82.451.340,00	80.974.000,00	98,21	0,00
Kecamatan Wenang	364.899.180,00	362.664.000,00	99,39	93.723.015,00
Kecamatan Sario	133.938.150,00	133.928.000,00	99,99	0,00
Kecamatan Mapanget	75.660.010,00	75.500.000,00	99,79	79.460.000,00
Kecamatan Paal Dua	119.991.000,00	119.735.000,00	99,79	12.654.000,00
Jumlah	51.441.003.737,00	47.399.056.283,00	92,14	42.971.412.083,61

5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan gedung dan bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.884.497.100,00	128.072.927.886,00	94,25	208.704.289.954,67

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp135.884.497.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp128.072.927.886,00 atau 94,25%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya kegiatan dan pengadaan yang tidak terlaksana ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp208.704.289.954,67 mengalami penurunan sebesar Rp80.631.362.068,67 atau turun 38,63%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena menurunnya alokasi pendapatan transfer DAK Fisik di tahun 2023 yang menyebabkan anggaran belanja modal gedung bangunan yang mengalami penurunan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per akun diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Akun TA 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.930.803.100,00	107.317.453.286,00	95,03	208.205.959.954,67
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	21.982.194.000,00	19.783.974.600,00	90,00	0,00
Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas	971.500.000,00	971.500.000,00	100,00	498.330.000,00
Jumlah	135.884.497.100,00	128.072.927.886,00	94,25	208.704.289.954,67

 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp112.930.803.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp107.317.453.286,00 atau 95,03%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp208.205.959.954,67 mengalami penurunan sebesar Rp100.888.506.668,67 atau turun 48,46%. Perbedaan

- realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena menurunnya alokasi DAK Fisik di tahun 2023 yang diperuntukkan langsung untuk belanja modal.
- 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.982.194.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.783.974.600,00 atau 90,00%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pembangunan Rusunawa.
- 3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp971.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp971.500.000,00 atau 100,00%. Tahun 2023 realisasi sesuai dengan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp498.330.000,00,00 mengalami kenaikan sebesar Rp473.170.000,00 atau naik 94,95%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pembuatan pagar lahan milik Pemerintah Kota Manado di Kelurahan Tingkulu.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.77 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.141.165.729,00	18.576.008.886,00	97,05	9.217.502.048,00
Dinas Kesehatan	11.759.967.779,00	11.734.444.452,00	99,78	41.657.254.329,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.657.758.748,00	84.072.453.054,00	93,77	74.861.265.958,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	139.860.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	463.112.650,00	92,62	1.749.832.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	575.781.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	99.973.300,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.396.187.000,00
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	398.800.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.825.604.844,00	13.226.908.844,00	89,22	75.030.297.223,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.577.536.896,67
Jumlah	135.884.497.100,00	128.072.927.886,00	94,25	208.704.289.954,67

5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.386.206.426,00	92.448.932.428,00	51,25	227.037.193.461,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp180.386.206.426,00 dan direalisasikan sebesar Rp92.448.932.428,00 atau 51,25%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2023 dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp227.037.193.461,00 mengalami penurunan sebesar Rp134.588.261.033,00 atau 59,28%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena menurunnya alokasi DAK Fisik di tahun 2023 yang diperuntukkan langsung untuk belanja modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per akun diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per Akun TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Jalan	31.488.728.086,00	30.954.642.682,00	98,30	168.086.061.553,00
Belanja Modal Jembatan	1.420.220.000,00	1.349.209.000,00	95,00	3.175.615.434,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	21.598.694.768,00	15.719.748.946,00	72,78	25.285.632.179,00
Bbelanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggunglangan Bencana Alam	22.863.331.263,00	21.310.537.495,00	93,21	20.895.853.418,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	917.500.000,00	613.275.000,00	66,84	
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.195.506.072,00	1.165.506.072,00	97,49	
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	968.000.000,00	902.047.000,00	93,19	
Belanja Modal Jaringan Air Minum	80.918.986.237,00	1.418.986.233,00	1,75	3.310.967.877,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	19.015.240.000,00	19.014.980.000,00	100,00	6.283.063.000,00
Jumlah	180.386.206.426,00	92.448.932.428,00	51,25	227.037.193.461,00

1) Belanja Modal Jalan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp31.488.728.086,00 dan direalisasikan sebesar Rp30.954.642.682,00 atau 98,30%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena nilai realisasi berdasarkan nilai yang dibelanjakan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp168.086.061.553,00 mengalami penurunan sebesar Rp137.131.418.871,00 atau 81,58%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya efisiensi anggaran dan penghematan.

- 2) Belanja Modal Jembatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.420.220.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.349.209.000,00 atau 95,00%. Tahun 2022 realisasi tidak mencapai anggaran karena nilai realisasi berdasarkan nilai yang dibelanjakan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.175.615.434,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.826.406.434,00 atau turun 57,51%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya efisiensi anggaran dan penghematan.
- 3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.598.694.768,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.719.748.946,00 atau 72,78%. Tahun 2022 realisasi tidak mencapai anggaran karena nilai realisasi berdasarkan nilai yang dibelanjakan dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.285.632.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.565.883.233,00 atau turun 37,83%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya efisiensi anggaran dan penghematan.
- 4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp22.863.331.263,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.310.537.495,00 atau 93,21%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena nilai realisasi berdasarkan nilai yang dibelanjakan dan adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.895.853.418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp414.684.077,00 atau naik 1,98%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena meningkatnya pembangunan penanggulangan bencana ditahun 2023.
- 5) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp917.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp613.275.000,00 atau 66,84%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan dan kegiatan yang tidak terlaksana. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pengadaan air bersih (IPAB) di puskesmas.
- 6) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.195.506.072,00 dan diirealisasikan sebesar Rp1.165.506.072,00 atau 97,49%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pengadaan instalasi air limbah dan konstruksi TPS limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 7) Belanja Modal Pembangkit Listrik Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp968.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp902.047.000,00 atau 93,19%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pengadaan instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

- 8) Belanja Modal Jaringan Air Minum Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.918.986.237,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.418.986.233,00 atau 1,75%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena tidak terealiasinya penerimaan pembiayaan pinjaman daerah yang menjadi sumber dana belanja modal jaringan air minum untuk kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan . Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.310.967.877,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.891.981.644,00 atau 57,14%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena sumber dana belanja modal jaringan air minum tidak terealisasi.
- 9) Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp19.015.240.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.014.98.000,00 atau 100,00%. Tahun 2023 realisasi sesuai dengan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.283.063.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.731.917.000,00 atau naik 202,64%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena meningkatnya pengadaan penerangan jalan umum PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Kesehatan	3.063.506.072,00	2.663.553.072,00	86,94	611.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.389.960.354,00	68.925.654.356,00	44,07	220.754.130.461,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.915.240.000,00	20.842.450.000,00	99,65	5.653.650.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.500.000,00	17.275.000,00	98,71	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	17.813.000,00
Jumlah	180.386.206.426,00	92.448.932.428,00	51,25	227.037.193.461,00

5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.889.153.653,00	2.917.205.718,00	100,97	1.470.369.695,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.889.153.653,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.917.205.718,00 atau 100,97%. Tahun 2023 realisasi melebihi anggaran karena terdapat realisasi yang berasal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pendapatannya melebihi alokasi yang

dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.470.369.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.446.836.023,00 atau naik 98,40%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena pada tahun 2022 penganggaran untuk belanja modal aset tetap lainnya sumber dana BOS dianggarkan seluruhnya di belanja barang dan jasa, sedangkan di tahun 2023 anggaran dengan sumber dana BOS sudah dipisah dan dianggarkan di belanja modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per akun diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Akun TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.869.173.653,00	2.899.805.718,00	101,07	1.470.369.695,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	19.980.000,00	17.400.000,00	87,09	0,00
Jumlah	2.889.153.653,00	2.917.205.718,00	100,97	1.470.369.695,00

- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.869.173.653,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.899.805.718,00 atau 101,07%. Tahun 2023 realisasi melebihi anggaran karena terdapat realisasi yang berasal dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pendapatannya melebihi alokasi yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.470.369.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.429.436.023,00 atau naik 97,22%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena pada tahun 2022 penganggaran untuk belanja modal aset tetap lainnya sumber dana BOS dianggarkan seluruhnya di belanja barang dan jasa, sedangkan di tahun 2023 anggaran dengan sumber dana BOS sudah dipisah dan dianggarkan di belanja modal.
- 2) Belanja Modal Aset Tidka Berwujud Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp19.980.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.400.000,00 atau 87,09%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena adanya penghematan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya pengadaan software.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.769.173.653,00	2.799.950.718,00	101,11	1.149.843.695,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000.000,00	99.855.000,00	99,86	199.512.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.980.000,00	17.400.000,00	87,09	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	111.014.000,00

SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah	2.889.153.653,00	2.917.205.718,00	100,97	1.470.369.695,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.a Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tidak Terduga	11.071.977.969,00	814.868.281,00	7,36	5.254.738.800,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp11.071.977.969,00 dengan realisasi sebesar Rp814.868.281,00 atau 7,36%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena tidak ada kegiatan yang mendesak dan realisasi ditahun 2023 merupakan pengembalian Dana BOS ke RKUN atas sekolah yang mengalami penggabungan/merger di tahun 2022 sebesar Rp803.452.576,00, pengembalian sisa dana pinjaman PEN yang tidak terserap Tahun 2021 sebesar Rp3.093.133,00 dan pemotongan langsung dari DAU atas pengembalian dana transfer ke pusat yang terdiri dari:

- Sisa Dana DAK Non Fisik PK2UMK Tahun Anggaran 2022 potong langsung DAU Oktober 2023 sesuai KMK NO.29/KM.7/2023 sebesar Rp981.800,00
- Sisa Dana DAK Non Fisik Adminduk Tahun Anggaran 2021 potong langsung DAU Oktober 2023 sesuai KMK NO.29/KM.7/2023 sebesar Rp7.340.772,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.254.738.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.439.870.519,00 atau turun 84,49%. Perbedaan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 karena pada tahun 2022 terdapat penggantian atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dipotong langsung DAU tahun 2022 sedangkan tahun 2023 sudah tidak ada.

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Realisasi Anggaran tahun 2023 mengalami surplus yang berarti bahwa realisasi Pendapatan lebih besar dari realisasi Belanja.

Tabel 5.85 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit
TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
SURPLUS/DEFISIT	(105.528.488.135,00)	6.841.650.778,65	(6,48)	(178.685.772.931,60)

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan defisit sebesar Rp105.528.488.135,00 dan terealisasi surplus sebesar Rp6.841.650.778,65 atau 6,48%. Tahun 2023 realisasi tidak sesuai anggaran karena realisasi pendapatan tidak sesuai target dan belanja yang tidak mencapai anggaran. Realisasi mengalami surplus karena Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 lebih besar dari Realisasi Belanja Daerah. Tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp178.685.772.931,60. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp185.527.423.710,25 atau 103,83% karena adanya penghematan belanja.

5.1.4 PEMBIAYAAN

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, hasil divestasi dan penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Secara ringkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan	132.628.488.135.00	52.737.933.230.56	39.76	266.413.793.263.16
pembiayaan	132.020.400.133,00	32.737.933.230,30	33,70	200.413.793.203,10

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp132.628.488.135,00 dan direalisasikan sebesar Rp52.737.933.230,56 atau 39,76%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai anggaran karena penerimaan pinjaman daerah yang tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp266.413.793.263,16 mengalami penurunan sebesar Rp213.675.860.032,60 atau turun 80,20%. Perbedaan realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah di Tahun 2022 terdapat realisasi penerimaan pinjaman PEN dari PT. Sarana Multi Infrastruktur.

5.1.4.1.a Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun sebelumnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah penghematan belanja-belanja operasi atau sisa belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.628.488.135,00	52.628.488.135,56	100,00	62.943.377.020,16

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp52.628.488.135,00 dan direalisasikan sebesar Rp52.628.488.135,56 atau 100,00 sesuai dengan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp62.943.377.020,16 terjadi penurunan sebesar Rp10.314.888.884,60 atau turun 16,39%. Perbedaan realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah pada Tahun 2022 sisa lebih pembiayaan anggaran lebih besar dibanding Tahun 2023.

5.1.4.1.b Koreksi SiLPA

Koreksi SiLPA akibat Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring), serta koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan pengurangan kas) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan menambah maupun mengurangi posisi kas.

Tabel 5.88 Anggaran dan Realisasi Koreksi SiLPA TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Koreksi SiLPA	0,00	109.445.095,00	0,00	(394.169.443,00)

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp109.445.095,00 sebagai penambah SiLPA, dan pada tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp394.169.443,00 sebagai pengurang SiLPA tahun 2022. Jika dibandingkan Tahun 2022 dan Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp503.614.538,00 atau 127,77%.

5.1.4.1.c Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas.

Tabel 5.89 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Pinjaman Daerah	80.000.000.000,00	0,00	0,00	203.864.585.686,00

Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Manado Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp80.000.000.000,000 tapi tidak terealisasi. Anggaran penerimaan pinjaman daerah tersebut merupakan pinjaman kepada PT. Bank SulutGo namun tidak terealisasi karena belum mendapat persetujuan pinjaman di Tahun 2023. Jika dibandingkan pada realisasi Tahun 2022 sebesar Rp203.864.585.686,00 terdapat penurunan sebesar nilai realisasi Tahun 2022.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Secara ringkas Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pengeluaran	27.100.000.000.00	27.099.532.196,00	100,00	35.099.532.196.00
Pembiayaan	27.100.000.000,00	27.099.552.190,00	100,00	33.099.332.190,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.100.000.000,000 dan direalisasikan sebesar Rp27.099.532.196,00 atau terealisasi 100% sesuai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp35.099.532.196,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 22,79%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena anggaran dan realisasi penyertaan modal daerah kepada BUMD di Tahun 2022 sebesar Rp8.000.000.000,00 tapi di Tahun 2023 tidak ada anggaran dan realisasi. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penyertaan Modal	0.00	0.00	0,00	8.000.000.000,00
Daerah pada BUMD	5,55	3,00	0,00	0.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan				
Pokok Utang yang Jatuh	27.100.000.000,00	27.099.532.196,00	100,00	27.099.532.196,00
Tempo				
Jumlah	27.100.000.000,00	27.099.532.196,00	100,00	35.099.532.196,00

5.1.4.2.a Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan daerah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.92 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00		8.000.000.000,00

Pada Tahun 2023 tidak ada anggaran dan realisasi penyertaan modal daerah pada BUMD tetapi pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp8.000.000.000,000 yaitu penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar nilai realisasi Tahun 2022 karena adanya penghematan.

5.1.4.2.b Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan akun yang digunakan untuk membayar pokok utang pinjaman. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.93 Anggaran dan Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.100.000.000,00	27.099.532.196,00	100,00	27.099.532.196,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada tahun 2023 terdapat anggaran sebesar Rp27.100.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.099.532.196,00 atau 100,00% mencapai anggaran. Realisasi Tahun 2023 merupakan pembayaran cicilan pokok utang pinjaman reguler kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang terdiri dari:

- 20 Januari 2023 sebesar Rp6.774.883.049,00
- 12 April 2023 sebesar Rp6.774.883.049,00
- 18 Juli 2023 sebesar Rp6.774.883.049,00
- 23 Oktober 2023 sebesar Rp6.774.883.049,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp27.099.532.196,00 tidak ada kenaikan atau penurunan karena pada tahun 2022 adanya 4 kali pembayaran cicilan pokok utang ke PT. SMI.

5.1.5 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pembiayaan Netto	105.528.488.135,00	25.638.401.034,56	24,30	231.314.261.067,16

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp105.528.488.135,00 dan direalisasikan sebesar Rp25.638.401.034,56 atau 24,30%. Tahun 2023 realisasi tidak mencapai target karena penerimaan pembiayaan yang tidak dibandingkan dengan realisasi mencapai target. Jika Tahun 2022 Rp231.314.261.067,16 mengalami penurunan sebesar Rp205.675.860.032,60 atau turun 88,92%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena penerimaan pinjaman yang berkurang.

5.1.6 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.95 Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	32.480.051.813,21	0,00	52.628.488.135,56

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp32.480.051.813,21. Tahun 2023 realisasi tidak sesuai anggaran karena adanya penghematan belanja atau sisa belanja yang tidak terserap ditahun anggaran 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp52.628.488.135,56 mengalami penurunan sebesar Rp20.148.436.322,35 atau turun 38,28%, Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena penyerapan belanja ditahun 2022 lebih kecil dari pada tahun 2023. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
TA 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	SiLPA Tahun 2023	SiLPA Tahun 2022
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56
Jumlah	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56

SiLPA terdiri dari Rincian Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Setara Kas dikurangi Kewajiban Utang Perhitungan Fihak Ketiga, sehingga Saldo Akhir Kas (SiLPA) sebesar Rp32.480.051.813,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian SILPA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	31.560.512.075,21
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	229.537.431,00

No	Uraian	Jumlah
4	Kas Dana BOS	21.019.882,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	194.680.758,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	542.634.032,00
7	Kas Lainnya	1.604.733.579,00
Saldo Kas Akhir		34.153.117.757,21
Saldo	Akhir Utang PFK Tahun 2023	101.647.113,00
Utang Belanja yang dicatat pada Kas Lainnya		1.571.418.831,00
Saldo	Akhir SiLPA	32.480.051.813,21

Berikut ini adalah Rincian SILPA Tahun 2023 berdasarkan sumber pendapatan:

Tabel 5.98 Rincian SILPA Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Pendapatan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(54.237.577.126,00)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	6.916.094.913,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya	4.859.038.000,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG)	52.802.372.182,00
5	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK - Fisik)	1.618.151.348,00
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK - Non Fisik)	8.418.172.839,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	9.513.014.682,00
8	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.492.230.922,00
9	SILPA 2022	98.554.053,21
	Jumlah	32.480.051.813,21

Pada tahun 2023 terdapat SILPA sebesar Rp32.480.051.813,21 dengan rincian berdasarkan sumber pendapatannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pusat, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan SILPA 2022.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan LP-SAL per 31 Desember 2023 dengan LP-SAL tahun sebelumnya:

Tabel 5.99 Perbandingan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	52.628.488.135,56	62.943.377.020,16
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52.737.933.230,56	62.549.207.577,16
Sub Total	(109.445.095,00)	394.169.443,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56
Sub Total	32.370.606.718,21	53.022.657.578,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	109.445.095,00	(394.169.443,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.100 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	52.628.488.135,56	62.943.377.020,16

Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp52.628.488.135,56 adalah SILPA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 dan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp62.943.377.020,16 adalah SILPA Tahun Anggaran 2021.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

		(····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Uraian	2023	2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52.737.933.230,56	62.549.207.577,16

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp52.737.933.230,56 merupakan SAL tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk pembiayaan anggaran belanja Pemerintah Kota Manado di Tahun Anggaran 2023.

5.2.3 SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102 Saldo SILPA dan SIKPA Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp32.480.051.813,21 berasal dari surplus/defisit ditambah pembiayaan netto di tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	
Surplus/Defisit	6.841.650.778,65	
Pembiayaan Netto	25.638.401.034,56	
SiLPA	32.480.051.813,21	

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 5.104 Saldo Koreksi Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	109.445.095,00	(394.169.443,00)

Pada tahun anggaran 2023 terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp109.445.095,00 dan tahun 2022 sebesar Rp394.169.443,00. Jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp503.614.538,00 atau 127,77%.

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Tabel 5.105 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	2022
Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Akhir	32.480.051.813,21	52.628.488.135,56

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.480.051.813,21 mengalami penurunan sebesar Rp20.148.436.322,35 atau turun dibandingkan dengan 38,28% realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp52.628.488.135,56.

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.105 Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Aset	5.520.939.334.151,33	5.157.569.873.477,69

Saldo aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.520.939.334.151,33 dibandingkan dengan tahun 2022 Saldo Aset sebesar Rp5.157.569.873.477,69 terdapat kenaikan sebesar Rp363.369.460.673,64 atau sebesar 7,05%. Adapun kenaikan nilai Aset secara keseluruhan dikarenakan bertambahnya aset lancar, bertambahnya investasi jangka panjang, dan bertambahnya aset tetap.

Saldo aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.520.939.334.151,33 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

		(=rr
Jenis Aset	31 Des 2023	31 Des 2022
Aset Lancar	385.191.009.926,04	302.444.511.451,89
Investasi Jangka Panjang	244.610.991.051,89	233.825.572.347,57
Aset Tetap	4.680.121.655.522,79	4.379.549.279.550,32
Aset Lainnya	211.015.677.650,61	241.750.510.127,91
Jumlah	5.520.939.334.151,33	5.157.569.873.477,69

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset lain selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Aset Lancar	385.191.009.926,04	302.444.511.451,89

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp385.191.009.926,04 dibandingkan dengan tahun 2022 saldo Aset Lancar sebesar Rp302.444.511.451,89 terdapat kenaikan sebesar Rp82.746.498.474,15 atau sebesar 27,36%. Adapun kenaikan nilai Aset Lancar dikarenakan bertambahnya Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara FKTP, Piutang serta Persediaan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
a.Kas di Kas Daerah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56
b.Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	35.000.000,00
c.Kas di Bendahara Penerimaan	229.537.431,00	4.564.774,00
d.Kas Dana BOSP	21.019.882,00	854.503.050,00
e.Kas Dana Kapitasi pada FKTP	194.680.758,00	5.517.084,00
f. Kas Dana BOK Puskesmas	542.634.032,00	138.343,00
g. Kas Lainnya	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00
h.Piutang Pajak	180.297.675.602,18	162.708.368.481,53
i.Piutang Retribusi	8.545.069.080,00	7.642.387.978,00
j. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.240.166.674,00	0,00
k. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	521.437.361,00	533.144.350,88
I.Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	57.982.424.139,41	66.519.506.466,00
m.Piutang Lainnya	616.453.570,00	619.653.570,00
n.Penyisihan Piutang	(115.560.947.279,20)	(117.626.933.718,75)
o.Persediaan	213.395.613.021,44	127.068.091.982,67
Jumlah Aset Lancar	385.191.009.926,04	302.444.511.451,89

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Pemegang Kas Umum Daerah Kota Manado, berupa uang dana yang ditempatkan di Kas Umum Daerah dalam bentuk rekening giro dengan saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.560.512.075,21 dan 2022 sebesar Rp51.728.764.884,56 atau terdapat penurunan sebesar Rp20.168.252.809,35 atau turun 38,99%. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.109 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas di Kas Daerah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56

Rincian saldo kas di kas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.110 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Rekening/Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
PT Bank SulutGo Cabang Manado 01101.12.000095-3	31.560.512.075,21	51.905.895.281,36
Utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus dibayar	0,00	(177.777.460,00)
Kelebihan Pencairan SP2D	0,00	539.072,00
Rekening Giro BRI atas Dana Swakelola Sekolah yang disetor ke Kasda 07-03-2023	0,00	107.991,20
Jumlah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56

Rekening Giro yang dimiliki Pemerintah Kota Manado, yaitu Rekening Giro No. 01101.12.000095-3. Rekening ini merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditetapkan berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Kota Manado dengan PT. BANK SULUTGO Nomor 900/B.02.03/BKAD/38/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Manado. Ini merupakan rekening utama Pemerintah Kota Manado yang menampung semua penerimaan daerah baik dari PAD maupun dana transfer pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain sampai dengan Desember 2023. Saldo akhir per 31 Desember 2023 berdasarkan Rekening Koran dari PT. BANK SULUTGO adalah sebesar Rp31.560.512.075,21.

Saldo RKUD tersebut sampai dengan tahun anggaran 2023 termasuk didalamnya Utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus disetor. Saldo di tahun 2022 sebesar Rp177.777.460,00 terjadi penurunan sebesar Rp109.445.095,00 sehingga sisa yang masih harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp68.332.365,00 yang sebelumnya dicatat di Kas Lainnya namun pada tahun 2023 dicatat kembali di Kas di Kas Daerah. Penurunan sebesar Rp109.445.095,00 dari saldo di tahun 2022 sebesar Rp177.777.460,00 berdasarkan Surat Konfirmasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Nomor S-537/KPP.1601/2023 Tanggal 6 Juli 2023 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Daftar serta Data Pendukung Terkait Catatan Utang PFK Pemerintah Kota Manado, Surat PT. TASPEN (Persero) Nomor SRT-161/C.6.1/062023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Konfirmasi Penerimaan IWP 8% Tahun 2022 yang menyampaikan bahwa Iuran Wajib Pegawai atas gaji induk tahun 2022 telah diterima seluruhnya, dan Surat BPJS Kesehatan Nomor 1511/X-01/0723 tanggal 3 Juli 2023 perihal Konfirmasi atas Tindak Lanjut Temuan BPK yang menyatakan bahwa tidak terdapat utang atas penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Atas saldo Tahun 2022 kelebihan pencairan SP2D sebesar Rp539.072,00 merupakan kelebihan pencairan atas SP2D nomor 000039/LS/2.11.0.00.0.00.15.000/P.02/4/2022 Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp539.000,00 dan SP2D nomor 001440/LS/4.01.0.00.0.00.01.000/P.03/5/2022 sebesar Rp72,00 yang lebih disetor ke penerima. Kelebihan pencairan tersebut sudah dikembalikan ke RKUD pada tanggal 14 Februari 2023.

Atas Rekening Giro di Bank BRI sebesar Rp107.991,20 merupakan sisa dana atas rekening Swakelola Sekolah yang sudah tidak digunakan di tahun 2022. Sisa dana tersebut sudah disetor ke RKUD pada tanggal 07 Maret 2023.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo sisa UP/TU pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor pada tanggal neraca. Secara ringkas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.111 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	35.000.000,00	

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo, dibandingkan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp35.000.000,00 merupakan Uang Persediaan pada Kecamatan Bunaken yang tidak digunakan dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 Januari 2023.

Rincian saldo kas yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Des 2023	31 Des 2022	Tanggal Setor	Keterangan
1.	Kecamatan Bunaken	0,00	35.000.000,00	11 Januari 2023	UP
2.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	-	-
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	-	-
4.	PPKD	0,00	0,00	-	-
	Jumlah	0,00	35.000.000,00	-	-

Adapun daftar nomor rekening giro yang digunakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113 Daftar Nomor Rekening Pengeluaran Giro SKPD

No	Nama Perangkat Daerah	Bank	No Rekening
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BSG	01101120012809
2	Dinas Kesehatan	BSG	01101120012883
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BSG	01101120012811
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BSG	01101120012951
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BSG	01101120000011
6	Dinas Kebakaran	BSG	01101120012822
7	Satuan Polisi Pamong Praja	BSG	01101120012743
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BSG	01101120012001
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BSG	01101120012755
10	Dinas Ketenagakerjaan	BSG	01101120012900
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BSG	01101120012122
12	Dinas Pangan	BSG	01101120098821
13	Dinas Lingkungan Hidup	BSG	01101120012846
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BSG	01101120012998
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BSG	01101120012974
16	Dinas Perhubungan	BSG	01101120012048
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	BSG	01101120012834
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BSG	01101120012870
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	BSG	01101120098871
20	Dinas Pemuda dan olahraga	BSG	01101120012969
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BSG	01101120012568
22	Dinas Pariwisata	BSG	01101120012949
23	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	BSG	01101120098844
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BSG	01101120012986
25	Sekretariat Daerah	BSG	01101120012036
26	Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	BSG	01101120014068
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	BSG	01101120012306
28	Bagian Hukum	BSG	01101120012115
29	Bagian Pembangunan	BSG	01101120014071
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BSG	01101120014141
31	Bagian Perekonomian dan SDA	BSG	01101120012227
32	Bagian Infrastruktur Kawasan Perkotaan	BSG	01101120014044
33	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah	BSG	01101120012073
34	Bagian Umum	BSG	01101120012971
35	Bagian TUP dan Protokol	BSG	01101120000262
36	Bagian Keuangan	BSG	01101120013139

No	Nama Perangkat Daerah	Bank	No Rekening
37	Bagian Perlengkapan	BSG	01101120012982
38	Sekretariat DPRD		01101120012962
39	Kecamatan Bunaken	BSG	01101120012024
40	Kecamatan Malalayang	BSG	01101120012781
41	Kecamatan Mapanget	BSG	01101120012767
42	Kecamatan Sario	BSG	01101120012779
43	Kecamatan Singkil	BSG	01101120012691
44	Kecamatan Tikala	BSG	01101120012792
45	Kecamatan Tuminting	BSG	01101120012721
46	Kecamatan Wanea	BSG	01101120013012
47	Kecamatan Wenang	BSG	01101120012718
48	Kecamatan Bunaken Kepulauan	BSG	01101120000173
49	Kecamatan Paal Dua	BSG	01101120000185
50	Inspektorat	BSG	001101120012051
51	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BSG	01101120012730
52	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BSG	01101120078888
53	Badan Pendapatan Daerah	BSG	01101120012913
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BSG	01101120012925

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2023 sebesar Rp229.537.431,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.564.774,00 terdapat kenaikan sebesar Rp224.972.657,00 atau naik 4.928,45%. Terjadinya kenaikan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 karena terdapat saldo pendapatan yang belum disetor ke RKUD sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 5.114 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	229.537.431,00	4.564.774,00

Pada akhir tahun anggaran 2023 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah yang merupakan penerimaan pajak di rekening penerimaan Giro Badan Pendapatan Daerah, namun sudah disetor ke RKUD pada bulan Januari 2023.

Pada tahun anggaran 2022 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.564.774,00 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 02 Januari 2023. Adapun rincian saldo yang terdapat pada Bendahara Penerimaan SKPD pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Tanggal Setor
		Pajak PBB	16.724.040,00	0,00	02/01/2024
	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	3.482.572,00	0,00	02/01/2024
		Pajak Reklame	64.762.500,00	0,00	02/01/2024
1		ВРНТВ	143.930.319,00	0,00	26/02/2024
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	638.000,00	0,00	04/01/2024
		Pajak Restoran	0,00	4.564.774,00	02-01-2023
	•	Jumlah	229.537.431,00	4.564.774,00	

Adapun daftar nomor rekening giro yang digunakan SKPD yang mengelola pendapatan asli daerah di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.116 Daftar Nomor Rekening Penerimaan Giro SKPD

No	Nama SKPD	Bank	Nomor Rekening
1	Badan Pendapatan Daerah	Bank SulutGo	01101120022222
2	Badan Pendapatan Daerah	Bank BCA	0263581111
3	Badan Pendapatan Daerah	Bank Mandiri	1500080222209

5.3.1.1.d Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas Dana BOSP pada Tahun 2023 sebesar Rp21.019.882,00,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp854.503.050,00 terdapat penurunan sebesar Rp833.483.168,00 atau turun 97,54%.

Tabel 5.117 Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	
Kas Dana BOSP	21.019.882,00	854.503.050,00	

Penerimaan Dana BOS oleh Sekolah Negeri SD dan SMP milik Pemerintah Kota Manado berupa penyaluran langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Semua rekening bank yang mengelola Dana BOS wajib dilaporkan kepada BUD sehingga saldo kas akibat penerimaan pada rekening tersebut juga wajib dilaporkan kepada BUD. Adapun rincian saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Satuan Pendidikan	Saldo 31 Des 2022	Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Setoran Ke RKUD	Pendapatan Jasa Giro	Saldo 31 Des 2023
SD Negeri	840.705.264,00	17.949.634.100,00	17.969.526.685,00	805.332.835,00	137.426,00	15.617.270,00
SMP Negeri	13.797.786,00	12.070.650.326,00	12.080.271.400,00	1.083.022,00	2.308.922,00	5.402.612,00

Satuan Pendidikan	Saldo 31 Des 2022	Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Setoran Ke RKUD	Pendapatan Jasa Giro	Saldo 31 Des 2023
SD Swasta	0,00	17.580.854.721,00	17.580.854.721,00	0,00	0,00	0,00
SMP Swasta	0,00	10.278.295.685,00	10.278.295.685,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	854.503.050,00	57.879.434.832,00	57.908.948.491,00	806.415.857,00	2.446.348,00	21.019.882,00

Pada Tahun 2022 terdapat pada 118 Sekolah Dasar Negeri dan 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan total saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp854.503.050,00. Di Tahun 2022 Wali Kota Manado mengeluarkan Keputusan Wali Kota Manado nomor 174/KEP/D.01/DIKBUD/2022 tentang Penggabungan (Regrouping) dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri pada tanggal 16 Juni 2022 sehingga terdapat 18 SD Negeri yang ditutup dan menambah 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMP Negeri 16 Manado, sehingga sampai dengan Tahun 2023 terdapat 100 SD Negeri, 16 SMP Negeri, 124 SD Swasta dan 72 SMP Swasta yang menerima Dana BOS. Penerimaan Dana BOS di Tahun 2023 disalurkan melalui 2 tahap dengan total penerimaan sebesar Rp57.879.434.832,00 dan pengeluaran selama tahun 2023 sebesar Rp57.908.948.491,00.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Manado melakukan pengembalian dana yang merupakan saldo kas satuan pendidikan negeri yang mengalami penggabungan, sebesar Rp803.452.576,00 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sesuai dengan Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4757/C/PR.04.01/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pengembalian Dana atas Satuan mengalami penggabungan/penutupan/menolak PAUD/BOS/BOP Kesetaraan TA 2022 dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-19/PK/PK.3/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Pemantauan Pengembalian Dana BOSP TA. 2020-2022. Pengembalian dana ke RKUN dibayarkan dengan pos anggaran Belanja Tidak Terduga pada tanggal 21 Juli 2023 dengan SP2D senilai Rp803.452.576,00.

Rincian Sekolah Merger dan Jumlah Pengembalian Saldo ke RKUN adalah sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Sekolah Merger dan Jumlah Pengembalian

(Dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah Merger	Tahun Merger	Sisa Kas Sekolah Merger 31 Des 2022	Nilai Setoran ke RKUD di 2023	Tanggal Setor ke RKUD
1	SD INPRES BUNAKEN (MERGER KE SD NEGERI 01	2022	30.598.561,00	30.552.100,00	24/02/2023
	BUNAKEN)			46.461,00	27/02/2023
2	SD NEGERI 04 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 05)	2022	41.719.620,00	41.719.620,00	27/02/2023
	(MERGER RE OB RECERT 00)			6.889,00	27/02/2023
3	SD NEGERI 08 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 17)	2022	34.332.959,00	34.322.700,00	27/02/2023
	(MERCER RESERVED)			10.259,00	27/02/2023
4	SD NEGERI 13 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 01)	2022	35.909.434,00	35.909.434,00	27/02/2023
5	SD NEGERI 15 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 05)	2022	111.786.330,00	111.786.660,00	04/03/2023
6	SD NEGERI 34 MANADO	2022	55.326.300,00	55.326.300,00	13/02/2023

No	Nama Sekolah Merger	Tahun Merger	Sisa Kas Sekolah Merger 31 Des 2022	Nilai Setoran ke RKUD di 2023	Tanggal Setor ke RKUD
	(MERGER KE SD NEGERI 125)				
7	SD NEGERI 37 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 36)	2022	19.867.129,00	19.863.066,00	27/02/2023
				4.063,00	27/02/2023
8	SD NEGERI 54 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 55)	2022	44.741.800,00	44.741.800,00	17/02/2023
9	SD NEGERI 57 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 09)	2022	42.126.449,00	41.295.569,00	14/02/2023
				1.100.880,00	07/02/2023
10	SD NEGERI 70 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 36)	2022	40.533.000,00	40.533.000,00	27/02/2023
11	SD NEGERI 74 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 49)	2022	46.318.474,00	46.318.474,00	27/02/2023
12	SD NEGERI 77 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 76)	2022	43.472.500,00	43.472.500,00	24/02/2023
13	SD NEGERI 87 SINGKIL (MERGER KE SD NEGERI 88)	2022	45.246.000,00	45.246.000,00	27/02/2023
14	SD NEGERI 89 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 115)	2022	24.944.253,00	24.944.253,00	20/02/2023
15	SD NEGERI 114 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 49)	2022	45.691.462,00	45.454.955,00	27/02/2023
				14.007,00	02/03/2023
16	SD NEGERI 119 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 28)	2022	55.754.974,00	45.745.893,00	28/02/2023
				10.000.000,00	28/02/2023
				3.761,00	28/02/2023
				5.320,00	28/02/2023
17	SD NEGERI 120 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 02)	2022	32.419.770,00	32.471.620,00	15/02/2023
18	SD NEGERI 121 MANADO (MERGER KE SD NEGERI 21)	2022	47.812.578,00	47.812.578,00	24/02/2023
				61.314,00	28/02/2023
19	SD NEGERI 59 MANADO (MERGER DENGAN SD NEGERI 4)	2019	19.800,00	19.800,00	08/02/2023
20	SD NEGERI 79 MANADO (MERGER DENGAN SD NEGERI 64)	2019	4.663.300,00	4.663.300,00	28/02/2023
	Total		803.284.693,00	803.452.576,00	

5.3.1.1.e Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana kapitasi pada FKTP adalah Sisa Kas Dana Kapitasi JKN dan Dana Non Kapitasi yang telah dibayarkan oleh BPJS serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang telah disalurkan oleh Kementerian Kesehatan namun sampai dengan akhir periode masih terdapat dana yang belum terpakai di FKTP.

Saldo kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp194.680.758,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.517.084,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp189.163.674,00 atau 3.428,69%. Terjadinya kenaikan tersebut karena pada tahun 2023 terdapat sisa dana kapitasi dan non kapitasi yang belum terpakai di FKTP sampai akhir tahun 2023.

Tabel 5.120 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	194.680.758,00	5.517.084,00

Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Tarif kapitasi JKN untuk setiap puskesmas ditentukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan mengacu pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dana Kapitasi JKN dikelola dan dimanfaatkan oleh puskesmas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dana Non Kapitasi yang diklaim dan telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Terdapat Kas Dana Kapitasi pada FKTP per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp194.680.758,00. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per tanggal 31 Desember 2023 pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	TONGKAINA	103.746,00	460.892.764,00	460.380.688,00	615.822,00
2	WAWONASA	311.847,00	1.049.290.710,00	1.049.552.459,00	50.098,00
3	TIKALA BARU	15.628,00	1.749.567.445,00	1.569.574.412,00	180.008.661,00
4	TUMINTING	80.000,00	2.299.910.375,00	2.299.990.375,00	0,00
5	SARIO	2.089.957,00	679.863.038,00	681.939.357,00	13.638,00
6	MINANGA	0,00	833.882.029,00	833.882.029,00	0,00
7	PANIKI BAWAH	0,00	1.655.453.331,00	1.655.441.645,00	11.686,00
8	WENANG	311,00	837.866.759,00	837.866.551,00	519,00
9	BAILANG	0,00	756.210.672,00	756.210.672,00	0,00
10	RANOTANA WERU	870,00	1.347.567.215,00	1.347.568.085,00	0,00
11	BENGKOL	0,00	701.336.498,00	701.336.498,00	0,00
12	BAHU	4.275,00	1.704.459.858,00	1.704.464.133,00	0,00
13	TELING ATAS	2.041.115,00	1.146.518.911,00	1.135.269.499,00	13.290.527,00
14	RANOMUUT	847.691,00	1.532.815.305,00	1.532.988.130,00	674.866,00
15	KOMBOS	20.497,00	1.442.460.994,00	1.442.475.382,00	6.109,00

No	Puskesmas	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
16	BUNAKEN	1.147,00	326.020.742,00	326.013.057,00	8.832,00
	Jumlah	5.517.084,00	18.524.116.646,00	18.334.952.972,00	194.680.758,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP senilai Rp194.680.758,00 terbagi atas Kas Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.

Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per tanggal 31 Desember 2023 pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.122 Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

No	Kapitasi	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	PUSKESMAS TONGKAINA	103.746,00	436.024.664,00	435.512.588,00	615.822,00
2	PUSKESMAS WAWONASA	3.747,00	1.023.175.210,00	1.023.176.959,00	1.998,00
3	PUSKESMAS TIKALA BARU	15.628,00	1.722.543.945,00	1.542.550.912,00	180.008.661,00
4	PUSKESMAS TUMINTING	80.000,00	2.120.856.675,00	2.120.936.675,00	0,00
5	PUSKESMAS SARIO	9.957,00	651.558.038,00	651.567.857,00	138,00
6	PUSKESMAS MINANGA	0,00	822.314.029,00	822.314.029,00	0,00
7	PUSKESMAS PANIKI BAWAH	0,00	1.584.266.128,00	1.584.265.628,00	500,00
8	PUSKESMAS WENANG	311,00	823.599.759,00	823.599.551,00	519,00
9	PUSKESMAS BAILANG	0,00	719.458.572,00	719.458.572,00	0,00
10	PUSKESMAS RANOTANA WERU	36,00	1.338.970.115,00	1.338.970.151,00	0,00
11	PUSKESMAS BENGKOL	0,00	649.580.198,00	649.580.198,00	0,00
12	PUSKESMAS BAHU	4.275,00	1.559.258.758,00	1.559.263.033,00	0,00
13	PUSKESMAS TELING ATAS	115,00	1.125.906.911,00	1.113.089.289,00	12.817.737,00
14	PUSKESMAS RANOMUUT	28.591,00	1.415.326.081,00	1.415.291.330,00	63.342,00
15	PUSKESMAS KOMBOS	20.497,00	1.215.138.281,00	1.215.157.882,00	896,00
16	PUSKESMAS BUNAKEN	147,00	318.790.742,00	318.782.057,00	8.832,00
	Jumlah	267.050,00	17.526.768.106,00	17.333.516.711,00	193.518.445,00

Rincian Kas Dana Non Kapitasi pada FKTP per tanggal 31 Desember 2023 pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Rincian Saldo Kas Dana Non Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan

(Dalam Rupiah)

No	Non Kapitasi	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PUSKESMAS TONGKAINA	0,00	24.868.100,00	24.868.100,00	0,00

No	Non Kapitasi	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
3	PUSKESMAS WAWONASA	308.100,00	26.115.500,00	26.375.500,00	48.100,00
4	PUSKESMAS TIKALA BARU	0,00	27.023.500,00	27.023.500,00	0,00
5	PUSKESMAS TUMINTING	0,00	179.053.700,00	179.053.700,00	0,00
6	PUSKESMAS SARIO	2.080.000,00	28.305.000,00	30.371.500,00	13.500,00
7	PUSKESMAS MINANGA	0,00	11.568.000,00	11.568.000,00	0,00
8	PUSKESMAS PANIKI BAWAH	0,00	71.187.203,00	71.176.017,00	11.186,00
9	PUSKESMAS WENANG	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00
10	PUSKESMAS BAILANG	0,00	36.752.100,00	36.752.100,00	0,00
11	PUSKESMAS RANOTANA WERU	834,00	8.597.100,00	8.597.934,00	0,00
12	PUSKESMAS BENGKOL	0,00	51.756.300,00	51.756.300,00	0,00
13	PUSKESMAS BAHU	0,00	145.201.100,00	145.201.100,00	0,00
14	PUSKESMAS TELING ATAS	2.041.000,00	20.612.000,00	22.180.210,00	472.790,00
15	PUSKESMAS RANOMUUT	819.100,00	117.489.224,00	117.696.800,00	611.524,00
16	PUSKESMAS KOMBOS	0,00	227.322.713,00	227.317.500,00	5.213,00
17	PUSKESMAS BUNAKEN	1.000,00	7.230.000,00	7.231.000,00	0,00
	Jumlah	5.250.034,00	997.348.540,00	1.001.436.261,00	1.162.313,00

5.3.1.1.f Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan Kas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang menampung penerimaan puskesmas dan membayar pengeluaran puskesmas. Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Dana BOK Puskesmas disalurkan langsung ke puskesmas berdasarkan besaran alokasi Dana BOK Puskesmas yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp542.634.032,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp138.343,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp542.495.689,00 atau 392.138,16%. Terjadinya kenaikan tersebut karena pada tahun 2023 terdapat penyaluran dana BOK Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan dan dana tersebut sampai dengan akhir periode masih terdapat dana yang belum terpakai di FKTP.

Tabel 5.120 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Dana BOK Puskesmas	542.634.032,00	138.343,00

Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per tanggal 31 Desember 2023 pada masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.124 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	TONGKAINA	0,00	443.444.000,00	428.660.242,00	14.783.758,00
2	WAWONASA	13.714,00	443.486.000,00	375.530.084,00	67.969.630,00
3	TIKALA BARU	0,00	426.888.000,00	407.924.901,00	18.963.099,00
4	TUMINTING	100.000,00	476.297.000,00	469.162.496,00	7.234.504,00
5	SARIO	0,00	492.677.000,00	442.129.355,00	50.547.645,00
6	MINANGA	0,00	542.082.000,00	483.550.657,00	58.531.343,00
7	PANIKI BAWAH	0,00	492.658.000,00	468.121.229,00	24.536.771,00
8	WENANG	0,00	493.152.000,00	465.188.782,00	27.963.218,00
9	BAILANG	861,00	410.554.000,00	383.858.279,00	26.696.582,00
10	RANOTANA WERU	0,00	509.071.000,00	484.782.326,00	24.288.674,00
11	BENGKOL	0,00	459.824.000,00	323.438.258,00	136.385.742,00
12	BAHU	21.000,00	492.663.000,00	492.271.026,00	412.974,00
13	TELING ATAS	2.270,00	443.461.000,00	404.247.403,00	39.215.867,00
14	RANOMUUT	0,00	377.708.000,00	354.888.434,00	22.819.566,00
15	KOMBOS	0,00	426.843.000,00	416.765.336,00	10.077.664,00
16	BUNAKEN	498,00	558.402.000,00	546.195.503,00	12.206.995,00
	Jumlah	138.343,00	7.489.210.000,00	6.946.714.311,00	542.634.032,00

5.3.1.1.g Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan saldo kas selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan, yang dapat berupa pendapatan yang belum disetor ke Kas Negara, belanja yang sudah dicairkan namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Saldo Kas Lainnya tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00

Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.604.733.579,00 dan kas lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.351.804.206,00, jika dibandingkan terjadi penurunan Rp747.070.627,00 atau turun 31,77%.

Di Tahun 2023 sebesar Rp2.137.735.481,00 telah disetor utang PFK ke Kas Negara selang bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023.

Untuk Kas Lainnya sejumlah Rp36.291.265,00 merupakan saldo utang PFK 2022 yang berasal dari Dana Kapitasi pada FKTP telah disetor sebesar saldo terutang selang bulan Januari 2023. Sampai akhir Tahun 2023 terdapat saldo utang PFK 2023 yang berasal dari Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp33.314.748,00 dan sudah terbayar selang bulan Januari sampai Februari Tahun 2024.

Senilai Rp177.777.460,00 saldo di tahun 2022 merupakan utang PFK sampai dengan tahun 2021 yang masih harus dibayar yang berada di RKUD tapi berdasarkan Surat Konfirmasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Nomor S-537/KPP.1601/2023 Tanggal 6 Juli 2023 perihal Jawaban atas Permintaan Konfirmasi Daftar serta Data Pendukung Terkait Catatan Utang PFK Pemerintah Kota Manado, Surat PT. TASPEN (Persero) Nomor SRT-161/C.6.1/062023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Konfirmasi Penerimaan IWP 8% Tahun 2022 yang menyampaikan bahwa Iuran Wajib Pegawai atas gaji induk tahun 2022 telah diterima seluruhnya, dan Surat BPJS Kesehatan Nomor 1511/X-01/0723 tanggal 3 Juli 2023 perihal Konfirmasi atas Tindak Lanjut Temuan BPK yang menyatakan bahwa tidak terdapat utang atas penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di lingkungan Pemerintah Kota Manado, maka sebesar Rp109.445.095,00 telah direklas ke Kas di Kas Daerah sehingga saldo utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus dibayar di tahun 2023 sebesar Rp68.332.365,00 dan di tahun 2023 dicatat di Kas di Kas Daerah.

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 terdapat utang pihak ketiga lainnya yang merupakan saldo di rekening bendahara/pihak ketiga atas SP2D yang belum disalurkan ke rekening penerima sampai dengan akhir tahun 2023. Pada rekening bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat saldo sebesar Rp1.209.993.331,00 yang merupakan SP2D yang belum disalurkan ke pegawai/pihak ketiga sampai dengan tahun 2023. Terdapat saldo sebesar Rp361.425.500,00 di rekening PPK kegiatan swakelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum disalurkan ke penerima. Adapun rincian saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.126 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	31 Des 2023	31 Des 2022	Tanggal Setor/ Pengembalian	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah/PPKD	0,00	2.137.735.481,00	Januari - Maret 2023	Saldo Utang PFK
Dinas Kesehatan	33.314.748,00	36.291.265,00	Januari – Februari 2024	Saldo Utang PFK dari Dana Kapitasi FKTP
PPKD	0,00	177.777.460,00	-	Utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus dibayar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.209.993.331,00	0,00	Januari 2024	Utang PFK Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.425.500,00	0,00	Januari 2024	Utang PFK Lainnya
Jumlah	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00		

5.3.1.1.h Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan

pengukuran jenis piutang berdasarkan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu kualitas piutang lancar, kualitas piutang kurang lancar, kualitas piutang diragukan, dan kualitas piutang macet.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.636.092.061,31 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp162.708.368.481,53 maka terdapat kenaikan sebesar Rp12.927.723.579,78 atau naik 7,95%. Adapun terjadinya kenaikan Piutang Pajak Daerah karena mulai beroperasi kembali pelaku usaha dengan jam operasional yang lebih lama, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang meningkat, serta pelaksanaan tugas SKPD dalam mengawai wajib retribusi yang dianggap tidak membayar retribusi sesuai keharusan.

Tabel 5.127 Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Pajak Daerah	180.297.675.602,18	162.708.368.481,53

Mutasi Piutang Pajak Daerah selama Tahun 2023 dengan saldo Rp180.297.675.602,18 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.128 Mutasi Piutang Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2023
Piutang Pajak Hotel	4.236.176.639,34	766.419.404,02	1.326.623.200,15	3.675.972.843,21
Piutang Pajak Restoran	9.199.662.848,00	1.751.536.630,06	2.692.066.440,98	8.259.133.037,08
Piutang Pajak Hiburan	3.686.798.262,28	179.248.739,00	327.122.200,00	3.538.924.801,28
Piutang Pajak Reklame	5.173.732.448,91	6.525.147.766,00	6.184.016.478,00	5.514.863.736,91
Piutang PPJ	6.056.014.312,00	74.920.506.769,00	74.311.816.722,00	6.664.704.359,00
Piutang Pajak Parkir	2.098.121.586,00	295.258.161,02	7.221.622,32	2.386.158.124,70
Piutang Pajak Air Tanah	528.023.284,00	2.591.616.740,00	1.801.658.601,00	1.317.981.423,00
Piutang Pajak PBB-P2	131.729.839.101,00	74.876.773.830,00	57.666.675.654,00	148.939.937.277,00
Jumlah	162.708.368.481,53	161.906.508.039,10	144.317.200.918,45	180.297.675.602,18

Pada tahun 2022, terdapat penetapan piutang pajak hotel BWL senilai Rp543.278.071,00 dan piutang pajak restoran BWL senilai Rp898.855.433,00. Atas penetapan piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran tersebut, terindikasi terdapat *double* penetapan dan perlu dilakukan penghapusan atas piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran serta akumulasi penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.1.1.i Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarannya dalam Surat

Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.545.069.080,00 dibandingkan dengan Piutang Retribusi TA 2022 sebesar Rp7.642.387.978,00 atau naik sebesar Rp902.681.102,00 atau naik 11,81%. Terdapatnya kenaikan Piutang Retribusi karena masih banyak Wajib Retribusi yang belum melakukan penyetoran di RKUD.

Tabel 5.129 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Retribusi Daerah	8.545.069.080,00	7.642.387.978,00

Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp8.545.069.080,00 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.130 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Des	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des
Retribusi	2022			2023
Piutang Retribusi Persampahan	2.155.080.001,00	5.382.720.000,00	4.741.245.000,00	2.796.555.001,00
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	779.330.118,00	1.128.822.600,00	1.109.191.200,00	798.961.518,00
Piutang Retribusi IMB	3.355.463.400,00	0,00	0,00	3.355.463.400,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.322.913.131,00	0,00	0,00	1.322.913.131,00
Piutang Retribusi Ijin Trayek	16.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	16.500.000,00
Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.000.000,00	242.300.000,00	251.300.000,00	0,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.101.328,00	6.104.494.478,00	5.853.919.776,00	254.676.030,00
Jumlah	7.642.387.978,00	12.859.462.078,00	11.956.780.976,00	8.545.069.080,00

5.3.1.1.j Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Pajak Asli Daerah selain piutang pajak dan piutang retribusi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.131 Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.240.166.674,00	0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp5.240.166.674,00 merupakan pengakuan atas pendapatan Deviden PT. Bank SulutGo

Tahun Buku 2023 berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Derah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 2024.

5.3.1.1.k Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pajak Asli Daerah selain piutang pajak dan piutang retribusi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.131 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	521.437.361,00	533.144.350,88

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp521.437.361,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp521.437.361,00. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penerbitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), tapi di tahun 2023 terdapat pembayaran TGR atas nama Drs. Arnold A. Kewas sebesar Rp10.155.205,00 yang telah dicatat dalam Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa an. Arnold K pada tanggal 06 Juli 2020 di Rekening Kas Umum Daerah Kota Manado Bank BRI dan penerimaan di tahun 2023 atas pendapatan bunga remunerasi transfer TDF tahun 2022 sebesar Rp1.551.784,88 sehingga mengurangi saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 menjadi sebesar Rp521.437.361,00 dari sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp533.144.350,88.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan yang dibebankan kepada bendahara, bukan bendahara dan pihak ketiga (perusahaan) yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Pernyataan untuk segera melunasi ganti rugi tersebut sesuai waktu yang ditentukan.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sampai dengan tahun anggaran 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.132 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Piutang Tuntutan Ganti Rugi	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang TGR Tahun Anggaran 2014:	439.054.691,00	449.209.896,00
- Sekretariat DPRD	317.630.457,00	317.630.457,00
- Dinas Pekerjaan Umum	94.218.134,00	94.218.134,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	885.500,00	885.500,00
- Drs. Arnold A. Kewas	0,00	10.155.205,00
- Christian Nelson Pangkey	24.711.400,00	24.711.400,00
- Henny Tome	1.560.000,00	1.560.000,00
- Christian Mambu	49.200,00	49.200,00
Piutang TGR Tahun Anggaran 2015:	60.000,00	60.000,00
- Dinas Kebersihan	60.000,00	60.000,00
Piutang TGR Tahun Anggaran 2016:	57.342.500,00	57.342.500,00
- Dinas Pendidikan	13.968.000,00	13.968.000,00
- Bagian Hukum	1.029.500,00	1.029.500,00
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan	42.345.000,00	42.345.000,00
Piutang TGR Tahun Anggaran 2017:	24.980.170,00	24.980.170,00

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.980.170,00	24.980.170,00
Bunga remunerasi transfer pusat ke daerah	0,00	1.551.784,88
Jumlah	521.437.361,00	533.144.350,88

5.3.1.1.1 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah pendapatan yang daerah yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.982.424.139,41 dibandingkan dengan Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 sebesar Rp66.519.506.466,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.537.082.326,59 atau turun 12,83% karena pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya baru disalurkan sampai dengan bulan Mei TA. 2022.

Tabel 5.133 Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	57.982.424.139,41	66.519.506.466,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun anggaran 2023 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp57.982.424.139,41.

Tabel 5.134 Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang Transfer Pemda Lainnya	Saldo 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2023
	2022			
Piutang Pajak Rokok	0,00	25.376.943.696,00	25.376.943.696,00	0,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	27.635.632.608,09	38.208.914.458,18	43.533.728.318,05	22.310.818.748,22
Piutang Pajak BBNKB	16.380.220.358,00	23.189.636.953,90	25.468.790.821,58	14.101.066.490,32
Piutang Pajak BBKB	22.421.200.033,64	36.014.755.503,63	36.937.799.270,14	21.498.156.267,13
Piutang Pajak PP - Air Permukaan	82.453.466,27	105.739.395,70	115.810.228,23	72.382.633,74
Jumlah	66.519.506.466,00	122.895.990.007,41	131.433.072.334,00	57.982.424.139,41

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp57.982.424.139,41 merupakan piutang transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di mana dasar pengakuan Piutang adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023, sehingga terdapat hak Pemerintah Daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2023.

5.3.1.1.m Piutang Lainnya

Pada tahun anggaran 2023 terdapat saldo piutang lainnya sebesar Rp616.453.570,00 dan saldo tahun 2022 sebesar Rp619.653.570,00 dan jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp3.200.000,00 atau turun 0,52%.

Tabel 5.135 Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Lainnya	616.453.570,00	619.653.570,00

Secara rinci Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Jenis Piutang Retribusi	Saldo 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2023
Piutang BPJS	116.320.647,00	0,00	0,00	116.320.647,00
Piutang Dem Kendaraan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Piutang Denda Keterlambatan	103.531.869,00	0,00	0,00	103.531.869,00
Piutang Lainnya PFK	392.601.054,00	0,00	0,00	392.601.054,00
Piutang Lainnya Atas Kelebihan Bayar Utang	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Jumlah	619.653.570,00	0,00	3.200.000,00	616.453.570,00

Pada tahun anggaran 2023, terdapat pengurangan piutang lainnya berupa kelebihan bayar utang di Dinas Kesehatan atas Utang Belanja Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor pada Dinas Kesehatan TA 2022 yang telah disetor ke RKUD tanggal 01 Maret 2023.

5.3.1.1.n Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang). Saldo akhir Penyisihan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp115.560.947.279,20 dibandingkan dengan

saldo Penyisihan TA 2022 sebesar Rp117.626.933.718,75 mengalami penurunan sebesar Rp2.065.986.439,55 atau 1,76%.

Penyisihan piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu kualitas piutang lancar, kualitas piutang kurang lancar, kualitas piutang diragukan, dan kualitas piutang macet. Untuk kualitas piutang lancar dengan umur piutang di bawah 1 tahun taksiran piutang tak tertagih sebesar 0,5%, untuk kualitas piutang kurang lancar dengan umur piutang lebih dari 1 sampai 2 tahun taksiran piutang tak tertagih sebesar 10%, untuk kualitas piutang diragukan dengan umur piutang lebih dari 2 sampai 4 tahun taksiran piutang tak tertagih sebesar 50%, dan untuk kualitas piutang macet dengan umur piutang di atas 4 tahun taksiran piutang tak tertagih sebesar 100%.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Adapun saldo penyisihan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp115.560.947.279,20 dan tahun 2022 sebesar Rp117.626.933.718,75.

Tabel 5.137 Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang	(115.560.947.279,20)	(117.626.933.718,75)

Saldo penyisihan piutang tahun 2023 adalah sebesar Rp115.560.947.279,20 dan tahun 2022 sebesar Rp117.626.933.718,75 yang terbagi atas beberapa jenis piutang.

Rincian penyisihan per jenis piutang untuk tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.138 Rincian Penyisihan per Jenis Piutang Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(104.817.275.237,33)	(107.459.801.087,29)
Penyisihan Piutang Retribusi	(6.706.659.903,80)	(5.888.468.335,11)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(521.437.361,00)	(531.670.155,00)
Penyisihan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(2.899.121.207,07)	(3.325.975.323,30)
Penyisihan Piutang Lainnya	(616.453.570,00)	(421.018.818,05)
Jumlah	(115.560.947.279,20)	(117.626.933.718,75)

Saldo penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp104.817.275.237,33 dan tahun 2022 sebesar Rp107.459.801.087,29. Rincian penyisihan piutang pajak daerah tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Pajak	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(1.367.705.346,67)	(1.676.540.367,40)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(3.393.813.432,00)	(3.541.242.072,40)

Penyisihan Piutang Pajak	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(3.203.450.095,08)	(155.369.859,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(2.620.423.384,25)	(1.227.939.388,15)
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(333.235.217,95)	(37.446.551,30)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.120.015.689,89)	(1.281.702.417,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(247.125.573,20)	(79.567.006,00)
Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	(92.531.506.498,29)	(99.459.993.426,04)
Jumlah	(104.817.275.237,33)	(107.459.801.087,29)

Saldo penyisihan piutang retribusi tahun 2023 adalah sebesar Rp6.706.659.903,80 dan tahun 2022 sebesar Rp5.888.468.335,11. Rincian penyisihan piutang retribusi tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Retribusi	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Retribusi Persampahan	(1.427.071.383,30)	(1.141.480.500,05)
Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(673.527.188,00)	(366.014.668,00)
Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(3.253.914.400,00)	(3.041.110.036,06)
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	(1.322.913.131,00)	(1.322.913.131,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek	(16.500.000,00)	(16.500.000,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan	0,00	(450.000,00)
Minuman Beralkohol		
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Persetujuan	(12.733.801,50)	0,00
Bangunan Gedung		
Jumlah	(6.706.659.903,80)	(5.888.468.335,11)

Saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp521.437.361,00 di tahun 2023 dan Rp531.670.155,00 di tahun 2022 dengan rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang TGR TA 2014	(439.054.691,00)	(449.209.896,00)
Penyisihan Piutang TGR TA 2015	(60.000,00)	(60.000,00)
Penyisihan Piutang TGR TA 2016	(57.342.500,00)	(57.342.500,00)
Penyisihan Piutang TGR TA 2017	(24.980.170,00)	(24.980.170,00)
Penyisihan Bunga remunerasi transfer pusat ke	0,00	(77.589,00)
daerah		
Jumlah	(521.437.361,00)	(531.670.155,00)

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya di tahun 2023 sebesar Rp2.899.121.207,07 dan tahun 2022 sebesar Rp3.325.975.323,30 dengan rincian penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142 Rincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Transfer Pemda Lainnya	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(1.115.540.937,50)	(1.381.781.630,38)
Penyisihan Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan	(705.053.324,52)	(819.011.017,90)
Bermotor		
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan	(1.074.907.813,36)	(1.121.060.001,72)

Bermotor		
Penyisihan Piutang Pajak Pengambilan dan	(3.619.131,69)	(4.122.673,30)
Pemanfaatan Air Permukaan		
Jumlah	(2.899.121.207,07)	(3.325.975.323,30)

Saldo penyisihan piutang lainnya di tahun 2023 adalah sebesar Rp616.453.570,00 dan saldo tahun 2022 adalah sebesar Rp421.018.818,05. Rincian penyisihan piutang lainnya tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Penyisihan Piutang Lainnya	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan Piutang Lainnya Dem Kendaraan Bermotor	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
Penyisihan Piutang Lainnya Denda Keterlambatan	(103.531.869,00)	(103.531.869,00)
Penyisihan Piutang Lainnya PT. BPJS	(116.320.647,00)	(116.320.647,00)
Penyisihan Piutang Lainnya PFK TA 2020	(394.169.443,00)	(197.084.721,50)
Penyisihan Piutang Lainnya Lebih Bayar Utang	0,00	0,00
Penyisihan Kelebihan Pembayaran Utang Belanja	0,00	(160.000,00)
Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor pada		
Dinas Kesehatan TA 2022		
Penyisihan Reklas piutang lainnya PFK atas	1.568.389,00	78.419,45
kompensasi PFK BPJS TA 2020 di TA 2022		
Jumlah	(616.453.570,00)	(421.018.818,05)

5.3.1.1.o Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.144 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Persediaan	213.395.613.021,44	127.068.091.982,67

Saldo persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp213.395.613.021,44 mengalami kenaikan sebesar Rp86.327.521.038,77 atau naik 67,94% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2022 sejumlah Rp127.068.091.982,67. Penambahan saldo persediaan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1. Adanya penambahan saldo atas persediaan di masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 yang masih diakui sebagai Persediaan.
- Hibah dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, berupa Blangko KTP-el sebanyak 49.000 keping atau setara Rp498.918.000,00
- 3. Hibah dari Kementrian Kesehatan ke Dinas Kesehatan berupa peralatan Medis dengan nilai sisa Persediaan akhir Rp364.939.806,00
- 4. Reklas dari Belanja Modal (Aset Peralatan Mesin) Dinas Kesehatan ke barang pakai habis (Persediaan Bahan Lainnya) sejumlah Rp37.659.374,00

 Reklas dari Belanja Modal Jaringan Irigasi Jembatan ke Persediaan Barang Pakai Habis (Alat/Bahan kegiatan kantor lainnya) pada dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah Rp7.999.860.000,00

Rincian Saldo Akhir Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.145 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022
1	Bahan Bakar dan Pelumas	21.569.450,00	6.527.500,00
2	Bahan Baku	50.152.326,00	159.383.326,00
3	Bahan Lainnya	414.569.180,00	13.469.290.730,31
4	Bahan Medis/Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00
5	Perlengkapan Uji Kendaraan/Persediaan Lainnya	0,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Alat Tulis Kantor	38.212.445,00	91.503.461,00
8	Kertas dan Cover	74.445.570,00	109.378.330,00
9	Bahan Cetak	982.569.580,50	592.429.629,00
10	Benda Pos	2.000.000,00	110.000,00
11	Bahan Komputer	426.546.480,00	173.632.678,00
12	Perabot Kantor	24.205.000,00	8.097.000,00
13	Alat Listrik	7.154.085,00	4.671.964,71
14	Suvenir/Cendera Mata	235.271.500,00	179.090.000,00
15	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.024.640.750,00	8.193.827.000,00
16	Obat	2.695.204.221,21	5.200.555.696,69
17	Obat-obatan Lainnya	3.773.029.240,73	13.359.281,96
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	188.319.555.660,00	95.461.152.114,00
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.249.698.911,00	3.405.083.271,00
20	Natura	56.788.622,00	0,00
	Jumlah	213.395.613.021,44	127.068.091.982,67

Rincian jenis persediaan per SKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.146 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Jumlah
1	Bahan Bakar dan Pelumas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	12.000.000,00
		Ruang	
		Bagian Umum	9.569.450,00
2	Bahan Baku	Dinas Pangan	50.152.326,00
3	Bahan Lainnya	Dinas Kesehatan	402.599.180,00

No.	Uraian	SKPD	Jumlah
		Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	11.970.000,00
4	Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	4.944.000,00
7	7 liat Tallo Rantol	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	2.457.540,00
		Ruang	2. 107.0 10,00
		Dinas Perumahan dan Kawasan	338.850,00
		Permukiman	
		Dinas Perhubungan	13.100.475,00
		Bagian Protokol dan Komunikasi	171.000,00
		Pimpinan	
		Bagian Umum	3.187.000,00
		Bagian Kerja Sama	73.250,00
		Sekretariat DPRD	7.568.400,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.551.280,00
		Kecamatan Wenang	820.650,00
5	Kertas dan Cover	Dinas Kesehatan	17.951.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.569.650,00
		Dinas Perumahan dan Kawasan	2.355.500,00
		Permukiman	2.000.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.459.500,00
		Dinas Perhubungan	6.276.350,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.900.000,00
		Dinas Pertanian, Kelautan dan	4.485.000,00
		Perikanan	
		Bagian Protokol dan Komunikasi	590.000,00
		Pimpinan Bagian Umum	3.025.200,00
		Bagian Kerja Sama	268.500,00
		Sekretariat DPRD	21.272.000,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan	92.100,00
		Pengembangan	02.100,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.605.770,00
		Kecamatan Wenang	7.595.000,00
6	Bahan Cetak	Dinas Kesehatan	8.196.000,00
		Dinas Kebakaran	6.358.500,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	633.445.500,00
		Dinas Perhubungan	237.784.600,00
		Dinas Pertanian, Kelautan dan	4.825.500,00
		Perikanan	
		Sekretariat DPRD	6.447.000,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan	5.790.000,00
		Pengembangan	
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	32.163.750,00
		Kecamatan Bunaken	886.590,00
		Kecamatan Singkil	17.314.850,00
		Kecamatan Tikala	792.900,00
		Kecamatan Wanea	1.811.520,00
		Kecamatan Malalayang Kecamatan Bunaken Kepulauan	1.510.400,00
		Kecamatan Bunaken Kepulauan Kecamatan Tuminting	4.028.952,00 1.170.030,00
		Kecamatan Turninting Kecamatan Wenang	1.758.410,00
		Kecamatan wenang Kecamatan Sario	1.758.410,00
		Kecamatan Mapanget	6.793.744,00
		Kecamatan Paal Dua	10.153.634,50
7	Benda Pos	Dinas Kesehatan	2.000.000,00
8	Bahan Komputer	Dinas Kesehatan	10.034.000,00
		Dinas Perumahan dan Kawasan	2.759.000,00
	L		

No.	Uraian	SKPD	Jumlah
		Permukiman	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	372.775.510,00
		Dinas Perhubungan	1.155.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.520.000,00
		Sekretariat DPRD	29.210.000,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.169.370,00
		Kecamatan Wenang	1.923.600,00
9	Perabot Kantor	Dinas Kesehatan	2.731.000,00
		Dinas Perumahan dan Kawasan	186.000,00
		Permukiman	
		Sekretariat DPRD	21.156.000,00
		Badan Perencanaan Penelitian dan	132.000,00
		Pengembangan	
10	Alat Listrik	Dinas Kesehatan	705.000,00
		Sekretariat DPRD	6.449.085,00
11	Suvenir/Cendera Mata	Bagian Protokol dan Komunikasi	134.634.500,00
		Pimpinan	
		Bagian Kerja Sama	66.157.000,00
		Sekretariat DPRD	34.480.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dinas Kesehatan	630.000,00
		Dinas Perumahan dan Kawasan	8.023.460.750,00
		Permukiman	
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	550.000,00
13	Obat	Dinas Kesehatan	2.619.879.971,21
		Dinas Pertanian, Kelautan dan	75.324.250,00
		Perikanan	
14	Obat-obatan Lainnya	Dinas Kesehatan	3.773.029.240,73
15	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.066.652.080,00
	<u> </u>	Dinas Perumahan dan Kawasan	180.056.734.105,00
		Permukiman	,
		Badan Penanggulangan Bencana	3.886.266.000,00
		Daerah	
		Dinas Sosial dan Pemberdayaan	18.993.475,00
		Masyarakat	
		Dinas Pengendalian Penduduk dan	574.380.000,00
		Keluarga Berencana	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	574.992.000,00
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	98.420.000,00
		Kecamatan Tikala	43.118.000,00
16	Persediaan Untuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	5.823.048.911,00
	Dijual/Diserahkan Lainnya	Ruang	
		Dinas Pariwisata	2.426.650.000,00
17	Natura	Dinas Pangan	56.788.622,00
	TOTAL		213.395.613.021,44

Pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terdapat Hibah dari Kementrian Pusat melalui Pemerintah Provinsi yang tidak diakui/ dicatat sebagai persediaan karena berdasarkan BAST tanggal 18 September 2023 tidak dicantumkan harga perolehan dari masing-masing item barang :

- 5.000 ml (2.500 ds) Vaksin PMK
- 1.000 pcs Eairtek
- 2 Buah Aplikator
- 2 Box (kecil) Vitamin Adplex
- 2 Box (kecil) Medoxy

- 10 Box (kecil) Dispo

Pada Kecamatan Wenang sampai dengan akhir tahun 2023, masih memiliki saldo fisik berupa karcis persampahan :

- Karcis 10.000 sebanyak 16 buku;
- Karcis 20.000 sebanyak 35 buku; dan
- Karcis 25.000 sebanyak 11 buku.

Karcis tersebut tidak dapat diakui sebagai persediaan dikarenakan tidak adanya anggaran pada tahun 2023 serta pembelian pada tanggal 17 Oktober 2023 tersebut oleh Kecamatan Wenang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada nota/bukti pembelian.

Pada Disdukcapil terdapat persediaan berupa blanko Kartu Keluarga senilai Rp27.000.000,00 yang tidak digunakan lagi namun masih tercatat dan belum dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.a Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan mamanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Adapun saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147 Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Investasi Jangka Panjang	244.610.991.051,89	233.825.572.347,57

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kota Manado per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp244.610.991.051,89. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp233.825.572.347,57 terdapat kenaikan sebesar Rp10.785.418.704,32 atau 4,61%. Kenaikan terjadi karena adanya penambahan pada PDAM dan terdapat Properti Investasi yaitu pengelolaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan Keputusan Wali Kota Manado Nomor 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang Diperoleh dari Perolehan Lainnya yang Sah pada Perangkat Daerah di Kota Manado Tahun Anggaran 2023.

Investasi jangka panjang per akun diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.148 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
--------	-------------	-------------

Jumlah	244.610.991.051,89	233.825.572.347,57
Investasi Permanen Lainnya	670.887.770,89	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	243.940.103.281,00	233.825.572.347,57

5.3.1.2.a.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Adapun saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.149 Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	243.940.103.281,00	233.825.572.347,57

Pada tahun 2023 terdapat saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp243.940.103.281,00 dan saldo Tahun 2022 sebesar Rp233.825.572.347,57. Jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp10.114.530.933,43 atau naik 4,33%.

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada:

Tabel 5.150 Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Investasi	Kepemilikan	Saldo 31 Des 2022	Tahun 2023		Tahun 2023		Saldo 31 Des 2023
iiivootaoi	(%)	Galac 6 : 500 2022	Penambahan	Pengurangan	00.00 0. 200 2020		
PT.Bank	2,62	33.003.000.000,00	0,00	0,00	33.003.000.000,00		
SulutGo							
PD.Pasar	100	130.808.997.536,57	0,00	462.780.738,57	130.346.216.798,00		
Manado							
PDAM	100	69.363.574.811,00	10.577.311.672,00	0,00	79.940.886.483,00		
PT.PPSU	2,35	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00		
Jumlah		233.825.572.347,57	10.577.311.672,00	462.780.738,57	243.940.103.281,00		

Sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi Permanen PT. Bank SulutGo

Pada tahun anggaran 2021 saldo investasi jangka panjang pada PT. Bank SulutGo adalah sebesar Rp25.003.000.000,00 dengan komposisi saham sebesar 2,28% dan 250.030 lembar saham.

Adapun setoran modal Pemerintah Kota Manado sebesar Rp5.000.000.000,000 tanggal 19 Mei 2022 dan Rp3.000.000.000,000 tanggal 16 Mei 2022 sehingga total modal disetor pada tahun 2022 sejumlah Rp8.000.000.000,000 yang tertuang dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank SulutGo No. 11 tanggal 09 Februari 2023

yang memutuskan untuk mengesahkan Dana Setoran Modal Pemerintah Kota Manado sebesar Rp8.000.000.000,000 sebagai modal disetor, hal ini mempengaruhi komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kota Manado menjadi sebesar 2,62% dengan jumlah lembar saham 330.030 lembar dengan nominal Rp33.003.000.000,00. Metode penilaian menggunakan metode biaya, yaitu Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

2. Investasi Permanen PD. Pasar Kota Manado

Metode penilaian investasi pada PD. Pasar Kota Manado sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali kota Manado Nomor 54 tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado bahwa Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Pada tahun anggaran 2021 saldo investasi jangka panjang PD. Pasar sejumlah Rp127.230.284.497,00. Berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) yang disusun dan ditandatangani Direktur PD. Pasar per 31 Desember 2022 yang sudah di audit Kantor Akuntan Publik Drs. Harly Weku & Priscillia, terdapat penambahan nilai ekuitas sebesar Rp3.578.713.039,57 sehingga saldo investasi jangka panjang tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Manado pada PD. Pasar adalah sejumlah Rp130.808.997.536,57.

Pada tahun anggaran 2023 terdapat penurunan jumlah ekuitas sebesar Rp462.780.738,57 dari tahun 2022 sebesar Rp130.808.997.536,57 menjadi Rp130.346.216.798,00 pada tahun 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar Tahun 2023 terdapat rugi tahun berjalan sebesar Rp1.007.181.874,00 namun pada tahun 2023 terdapat koreksi pembukuan tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian atas temuan biaya-biaya tahun 2022 dengan akumulasi sebesar Rp544.401.135,43 sehingga mengurangi nilai rugi PD. Pasar menjadi sebesar Rp462.780.738,57.

3. Investasi Permanen PDAM Kota Manado

Pendirian PDAM Kota Manado sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor: 1/Perda/WKDM Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, tanggal 9 Februari 1976. Dalam sejarahnya PDAM Kota Manado telah mengalami beberapa kali perubahan nama, yaitu tanggal 1 Januari 1986 dari Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Manado (PDAM Manado), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Manado Nomor 141 Tahun 2000 tanggal 21 Oktober 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 dirubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Manado Tahun 2023 yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Harly Weku & Priscillia, nilai Ekuitas akhir Pemerintah Kota Manado per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp79.940.886.483,00. Nilai tersebut merupakan jumlah dari saldo awal investasi permanen sebesar Rp69.363.574.811,00 ditambah penambahan nilai ekuitas PDAM sebesar Rp10.577.311.672,00.

4. Investasi Permanen PT. PPSU

Investasi Permanen di PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) sebesar Rp650.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Manado yang pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan nilai penyertaan modal. Berdasarkan surat konfirmasi Direktur Utama PT. PPSU Nomor: 01/Direksi/PT.PPSU/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 bahwa penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado pada PT. PPSU sampai 31 Desember 2022 terdiri dari jumlah 1.300 saham dengan nilai @Rp500.000/saham sehingga nilai keseluruhan Rp650.000.000,00, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 2,35% dari total saham perseroan.

5.3.1.2.a.2 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya adalah Investasi Permanen yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut saldo Investasi Permanen Lainnya tahun 2023:

Tabel 5.151 Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	
Investasi Permanen Lainnya	670.887.770,89	0,00	

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif, tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rincian nilai properti investasi tahun 2023 :

Tabel 5.152 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Properti Investasi	31 Des 2023	31 Des 2022
Properti Investasi	774.519.145,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(103.631.374,11)	0,00
Jumlah	670.887.770,89	0,00

Terdapat saldo properti investasi tahun 2023 sebesar Rp774.519.145,00 dan saldo akumulasi penyusutan properti investasi sebesar Rp103.631.374,11. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat saldo properti investasi.

Rincian penambahan dan pengurangan properti investasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Mutasi Properti Investasi Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Properti Investasi per 1 Januari 2023 (audited)	0.00
Penambahan Nilai Properti Investasi Tahun 2023:	774.519.145,00
1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	547.500.000,00
2) Reklasifikasi dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	227.019.145,00

Pengurangan Nilai Properti Investasi Tahun 2023:	(0,00)
Saldo Akhir Properti Investasi per 31 Desember 2023	774.519.145,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(103.631.374,11)
Jumlah Properti Investasi	670.887.770,89

Penambahan Properti Investasi tahun 2023 senilai Rp774.519.145,00 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp547.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pariwisata senilai Rp273.750.000,00 berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Taman Kesatuan Bangsa)
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp273.750.000,00 berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Taman Kesatuan Bangsa)
- 2) Reklasifikasi dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp227.019.145,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pariwisata senilai Rp194.100.000,00 berupa Rehabilitasi Pusat Informasi di Taman Kesatuan Bangsa
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp32.919.145,00 berupa Bangunan Tempat Kerja Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun 2023 senilai Rp103.631.374,11 terdiri atas:

- Dinas Pariwisata senilai Rp65.161.834,17
- Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp38.469.539,94

5.3.1.3 Aset Tetap

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan, dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar.

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.680.121.655.522,79, jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.379.549.279.550,32, mengalami kenaikan sebesar Rp300.572.375.972,47 atau 6,86%. Berikut rincian aset tetap tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun 2022 :

Tabel 5.154 Rincian Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022	
Tanah	2.405.136.615.735,03	2.264.872.332.235,03	
Peralatan Dan Mesin	644.370.326.716,35	611.223.529.652,85	
Gedung dan Bangunan	1.253.763.160.245,07	1.106.621.244.799,36	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.953.681.824.358,79	1.755.964.579.623,79	
Aset Tetap Lainnya	50.562.371.011,61	46.162.240.939,21	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	93.785.691.949,42	111.056.209.085,66	
Akumulasi Penyusutan	(1.721.178.334.493,48)	(1.516.350.856.785,58)	
Jumlah Aset Tetap	4.680.121.655.522,79	4.379.549.279.550,32	

5.3.1.3.a Tanah

Nilai tanah Pemerintah Kota Manado tahun 2022 adalah sebesar pada Rp2.264.872.332.235,03 dan tanggal 31 Desember 2023 bernilai Rp2.405.136.615.735,03.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp140.264.283.500,00 atau 6,19% disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tanah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155 Rincian Nilai Tanah Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Tanah per 1 Januari 2023 (audited)	2.264.872.332.235,03
Penambahan nilai tanah tahun 2023 :	179.945.589.500,00
1) Belanja Modal Tanah Tahun 2023	5.806.080.000,00
2) Hibah	123.329.419.500,00
3) Hasil Inventarisasi	16.679.600.000,00
4) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	26.450.522.000,00
5) Mutasi Antar Perangkat Daerah	7.679.968.000,00
Pengurangan nilai tanah tahun 2023 :	(39.681.306.000,00)
1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(5.550.816.000,00)
2) Koreksi pengurangan nilai yang akan digantikan dengan nilai baru	(26.450.522.000,00)
3) Mutasi Antar Perangkat Daerah	(7.679.968.000,00)
Saldo Akhir Tanah per 31 Desember 2023	2.405.136.615.735,03

Penambahan nilai tanah senilai Rp179.945.589.500,00 di tahun 2023 disebabkan karena adanya :

- 1) Belanja modal tanah senilai Rp5.806.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.806.080.000,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.000.000.000,00
- 2) Hibah tanah senilai Rp123.329.419.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Sekretariat Daerah yaitu:
 - 1. Hibah dari PT. Megasurya Nusalestari senilai Rp8.437.500.000,00 sesuai BAST Nomor 01/BA/Hkm/2023 tanggal 13 Juni 2023 berupa :
 - Tanah Hasil Reklamasi (Pedestrian Bidang I) senilai Rp4.488.750.000,00
 - Tanah Hasil Reklamasi (Pedestrian Bidang II) senilai Rp933.750.000,00
 - Tanah Hasil Reklamasi (Pedestrian Bidang III) senilai Rp3.015.000.000,00
 - 2. Hibah dari PT. Papetra Perkasa Utama senilai Rp110.900.075.000,00 sesuai BAST Nomor 02/BA/Hkm/2023 tanggal 15 November 2023 berupa :
 - Tanah Hasil Reklamasi senilai Rp3.472.500.000,00 dengan luas 300 m2
 - Tanah Hasil Reklamasi senilai Rp107.427.575.000,00 dengan luas 9.281 m2 Hibah/penyerahan tanah ini sebagai tindak lanjut penyelesaian hak Pemerintah Kota Manado atas lahan reklamasi yang sebelumnya dicatat sebagai aset lain-lain berdasarkan PKS pekerjaan reklamasi teluk manado oleh PT. Papetra Perkasa Utama yg sudah berakhir dan hasil ukur dari atr bpn tetapi lahannya belum diserahkan (belum ada bast) kemudian tahun 2023 sudah dilakukan penyerahan oleh pengembang). Penyerahan lahan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus dari Pemkot Manado kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memperoleh hak Pemkot atas

lahan hasil reklamasi. Tanah yg dicatat sebagai aset lain-lain dengan luasan 9.581 dan nilai 9.518 yang diakui tahun 2012 terdapat selisih luas dan nilai sebagaimana tercatat dalam dokumen penyerahan tahun 2023 (BAST Nomor 02/BA/Hkm/2023 tanggal 15 November 2023) dari Selisih luas antara aset lain-lain yang diakui tahun 2012 dan aset tanah yang diserahkan tahun 2023 (kelebihan penyerahan lahan 16%) yaitu yang diserahkan tahun 2023 seluas 9.581 m2 dengan nilai Rp110.900.075.000,00

- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Hibah tanah TPU dari pengembang senilai Rp3.991.844.500,00 berupa:
 - 1. Tanah TPU senilai Rp426.650.000,00 nomor BAST 102/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Ciputra Internasional
 - 2. Tanah TPU senilai Rp140.000.000,00 nomor BAST 103/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Bumi Mapan Abadi
 - 3. Tanah TPU senilai Rp105.280.000,00 nomor BAST 104/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Citra Grand Khatulistiwa
 - 4. Tanah TPU senilai Rp20.499.500,00 nomor BAST 106/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Kharisma Mitra Sejajar
 - 5. Tanah TPU senilai Rp700.000.000,00 nomor BAST 107/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Cipta Permai Sejati
 - 6. Tanah TPU senilai Rp63.210.000,00 nomor BAST 109/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Sinar Pelita Sakti
 - 7. Tanah TPU senilai Rp48.125.000,00 nomor BAST 110/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Joas Saitama Putra
 - 8. Tanah TPU senilai Rp28.875.000,00 nomor BAST 111/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Joas Triputra Jaya
 - 9. Tanah TPU senilai Rp319.550.000,00 nomor BAST 113/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Wenang Permai Sentosa
 - 10. Tanah TPU senilai Rp165.550.000,00 nomor BAST 114/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Harmas Sahabat Perkasa
 - 11. Tanah TPU senilai Rp350.000.000,00 nomor BAST 101/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Graha Blessing Family
 - 12. Tanah TPU senilai Rp58.100.000,00 nomor BAST 108/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Jaya Perkasa Propertindo
 - 13. Tanah TPU senilai Rp28.000.000,00 nomor BAST 118/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Teterusan Mandiri Permai
 - 14. Tanah TPU senilai Rp16.485.000,00 nomor BAST 105/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Multi Daya Jaya Lestari
 - 15. Tanah TPU senilai Rp50.050.000,00 nomor BAST 117/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Maleosan Manado Permai
 - 16. Tanah TPU senilai Rp38.500.000,00 nomor BAST 112/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Putra Bintang Sukur
 - 17.Tanah TPU senilai Rp41.503.000,00 nomor BAST 115/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Setia Kawan Lestari
 - 18. Tanah TPU senilai Rp612.227.000,00 nomor BAST 115/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Setia Kawan Lestari
 - 19.Tanah TPU senilai Rp403.480.000,00 nomor BAST 116/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Bumi Mapanget Asri
 - 20.Tanah TPU senilai Rp375.760.000,00 nomor BAST 116/D.04/Perkim/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Hibah dari PT. Bumi Mapanget Asri
- 3) Hasil Inventarisasi sesuai Keputusan Wali Kota No. 168/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl. 2 Mei 2023 senilai Rp16.679.600.000,00, yaitu :

- a) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.545.000.000,00 berupa Tanah Lapangan Olahraga (tanah lapang LNH) seluas 15.000 m2 di Lingkungan II Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken
- b) Kecamatan Malalayang senilai Rp9.345.600.000,00 berupa Tanah Pesisir Pantai Malalayang seluas 6.600 m2 di Lingkungan III Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.528.000.000,00 berupa Ruang Terbuka Hijau Perumahan Pandu Relokasi seluas 15.800 m2 di Lingkungan III Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken
- d) Kecamatan Tuminting senilai Rp171.000.000,00 berupa Tanah Kantor Lurah Sumompo seluas 600 m2 di Lingkungan II Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting
- e) Dinas Pendidikan dan kebudayaan senilai Rp3.090.000.000 berupa :
 - 1. Tanah SMP 9 Kelas Jauh seluas 10.000 m2 dengan nilai Rp1.030.000.000,00
 - 2. Tanah kapleng bagi guru-guru SMP-SMK seluas 20.000 m2 dengan nilai Rp2.060.000.000,00
- 4) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain senilai Rp26.450.522.000,00 di Sekretariat Daerah Tanah yg sebelumnya dicatat sebagai aset lain-lain karena berdasarkan PKS pekerjaan reklamasi teluk manado oleh PT. Papetra Perkasa Utama yang sudah berakhir dan hasil ukur dari atr bpn tetapi lahannya belum diserahkan (belum ada bast) kemudian tahun 2023 sudah dilakukan penyerahan oleh pengembang. Penyerahan lahan tsb merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kota Manado kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memperoleh hak Pemerintah Kota atas lahan hasil reklamasi
- 5) Mutasi Antar Perangkat Daerah senilai Rp7.679.968.000,00, yaitu
 - a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp1.440.863.000,00 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp6.036.885.000,00 dari Sekretariat Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima No. 900.1/B.02/BKAD/1318/2023 Tanggal 15 September 2023 berupa:
 - 1.Tanah lapangan lainnya seluas 10.000 m2 tahun perolehan 2014 di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang, SHP no. 09/Winangun Satu tahun 2018 dengan nilai Rp2.430.000.000,00
 - 2.Tanah lapangan lainnya seluas 6.695 m2 tahun perolehan 2014 di Jalan Manguni XI Kecamatan Perkamil, SHP no. 05/Perkamil tahun 2023 dengan nilai Rp1.626.885.000,00
 - 3. Tanah lapangan lainnya seluas 9.900 m2 tahun perolehan 2017 di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting dengan nilai Rp1.980.000.000,00
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp202.220.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 3333/D.01/Sekre/X/2023 Tanggal 6 September 2023 berupa:
 - 1.Tanah Eks SDN 80 seluas 1.510 m2 Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 9 Tahun 2013 dengan nilai Rp43.055.000,00
 - 2. Tanah Eks SDN 81 seluas 990 m2 Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 10 Tahun 2014 dengan nilai Rp159.165.000,00

Pengurangan tanah senilai Rp39.681.306.000,00 di tahun 2023 disebabkan karena adanya :

1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp5.550.816.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sekretariat Daerah senilai Rp5.260.710.000,00 dihibahkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Serah Terima No.044/B.02/BKAD/810/2021 900/21.5822/Sekr-BKAD dengan luas 3.055 m2, SHP No. 56/Bahu, Tahun Perolehan 2012 untuk digunakan sebagai Pasar Ikan Higienis dengan lokasi Kompleks Bahu Mall, Jalan Wolter Monginsidi No.1 Malalayang Kota Manado sesuai Keputusan Wali Kota No. 224/KEP/B.02/BKAD/2021
- b) Dinas Kesehatan senilai Rp290.106.000,00

Tanah Puskesmas Bunaken yang terletak di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado senilai Rp290.106.000,00 karena adanya putusan pengadilan/ Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh penggugat (Rut Pemberitahuan Tumoka) sesuai Relaas Putusan Nomor 1184/PK/PDT/2022/PN.MND jo. 447/PDT.G/2017/PN.MND memberitahukan kepada Pemerintah Kota Manado,dkk cq Sammy Mananoma,SH, MH sebagai kuasa para penggugat d/a Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai Para pemohon PK tentang isi putusan PK pada tanggal 30 Desember 2022, yang telah diputus dalam perkara perdata antara Pemerintah Kota Manado sebagai tergugat/ Pemohon PK lawan Rut Tumoka, dkk sebagai penggugat/termohon PK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para tergugat peninjauan kembali Pemerintah Kota Manado, cq. Lurah Bunaken Kepulauan, cq. Lurah Bunaken Pemerintah Kota Manado, cq. Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan

Pemerintah Kota Manado cq. Wali Kota Manado, cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, cq. Ricky Kaunang ,SKM dan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 153/PDT/2018/PT.MND, jo Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.Mnd telah memberitahukan kepada Ezri Tumuwo,SH,MH (advokat/konsultan hukum) sebagai Kuasa Pembanding II/kuasa tergugat IV dan tergugat V tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Januari 2018 nomor 153/PDT/2018/PT.MND, dalam perkara antara Netty Caroles,dk sebagai pembanding lawan Rut Tumoka,dkk sebagai terbanding mengadili :

Menerima permohonan banding dari pembanding I dan tergugat III dan pembanding II semula tergugat II, tergugat IV dan tergugat V

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 447/PDT.G/2017/PN.MND tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan/permohonan kasasi atas putusan terakhir dalam tenggat waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

- 2) Koreksi pengurangan nilai yang akan digantikan dengan nilai baru senilai Rp26.450.522.000,00 di Sekretariat Daerah berdasarkan BAST No. 02/BA/Hkm/2023 tgl. 15 November 2023. Tanah ini adalah aset lain-lain karena berdasarkan PKS pekerjaan reklamasi teluk manado oleh PT. Papetra Perkasa Utama yg sdh berakhir dan hasil ukur dari atr bpn tetapi lahannya belum diserahkan kemudian tahun 2023 sudah dilakukan penyerahan oleh pengembang dengan nilai yang tercatat dalam dokumen BAST No. 02/BA/Hkm/2023 tgl. 15 November 2023. Penyerahan lahan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus dari Pemkot Mdo kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memperoleh hak Pemkot atas lahan hasil reklamasi.
- 3) Mutasi Antar Perangkat Daerah senilai Rp7.679.968.000,00 vaitu :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan rincian:
 - a.Mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp1.440.863.000,- sesuai sesuai Berita Acara Serah Terima No. 3094/D.01/Dikbud/KP/2023 tanggal 27

- Juli 2023 berupa Tanah Bangunan dan Latihan seluas 1.853 m2 di Jalan Samratulangi No. 49, SHP no. 22 Tahun 2013
- b. Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp202.220.000, sesuai Berita Acara Serah Terima No. 3333/D.01/Sekre/X/2023 Tanggal 6 September 2023 berupa :
 - Tanah Eks SDN 80 seluas 1.510 m2 Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 9 Tahun 2013 dengan nilai Rp43.055.000,00
 - 2. Tanah Eks SDN 81 seluas 990 m2 Di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 10 Tahun 2014 dengan nilai Rp159.165.000,00

b) Sekretariat Daerah

Mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp6.036.885.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 900.1/B.02/BKAD/1318/2023 Tanggal 15 September 2023 berupa :

- a. Tanah lapangan lainnya seluas 10.000 m2 tahun perolehan 2014 di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang, SHP no. 09/Winangun Satu tahun 2018 dengan nilai Rp2.430.000.000,00
- b.Tanah lapangan lainnya seluas 6.695 m2 tahun perolehan 2014 di Jalan Manguni XI Kecamatan Perkamil, SHP no. 05/Perkamil tahun 2023 dengan nilai Rp1.626.885.000,00
- c. Tanah lapangan lainnya seluas 9.900 m2 tahun perolehan 2017 di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting dengan nilai Rp1.980.000.000,00

Pemerintah Kota Manado telah melakukan sertifikasi tanah sebanyak 38 sertifikat terhadap 41 bidang tanah pada tahun 2023 sehingga total yang sudah bersertifikat sampai akhir tahun 2023 sebanyak 315 bidang tanah. Daftar 41 bidang tanah tersebut seperti yang terlampir di bawah ini:

Tabel 5.156 Daftar rincian bidang tanah yang tersertifikasi tahun 2023

No	Uraian	Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Kebun Coklat	Kelurahan Paniki Dua	41.800	11.913.000.000	SHP No. 10 / Paniki Dua Tahun 2023
2	Tanah Lapangan Maesa Perkamil	Kelurahan Perkamil	7.340	1.626.885.000	SHP No. 05 / Perkamil Tahun 2023
3	Tanah Lapangan / Kantor Lurah Paniki Dua	Kelurahan Paniki Dua	1.793	551.760.000	SHP No. 08 / Paniki Dua Tahun 2023
4	Tanah SD Inpres 1 & SD Inpres 3 Paniki Bawah	Kelurahan Paniki Dua	2.583	161.000.000	SHP No. 09 / Paniki Dua Tahun 2023
5	Tanah Puskesmas Ranomuut	Kelurahan Perkamil	2.452	135.000.000	SHP No. 04 / Perkamil Tahun 2023
6	Tanah Puskesmas Tuminting	Kelurahan Tuminting	2.685	175.000.000	SHP No. 31 / Tuminting Tahun 2023
7	Tanah Kosong / RTH	Kelurahan Calaca	1.120	3.358.656.000	SHP No. 11 / Calaca Tahun 2023
8	Tanah TPS3R	Kelurahan Sindulang Satu	238	141.705.000	SHP No. 10 / Sindulang Satu Tahun 2023

No	Uraian Alamat		Luas (M2)	Nilai (Rp)	Keterangan
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Balai Pertanian Kota Manado)	Kelurahan Pandu	2.688	8.750.000	SHP No. 03 / Pandu Tahun 2023
10	Tanah Negara	Kelurahan Buha	1.352	27.040.000	SHP No. 17 / Buha Tahun 2023
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Kelurahan Kairagi Satu	5.384	1.091.640.342	SHP No. 16 / Kairagi Satu Tahun 2023
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Mahakeret Timur	190	47.500.000	SHP No. 24 / Mahakeret Timur Tahun 2023
13	Tanah IKM / Pasar Tematik	Kelurahan Tongkaina	10.000	2.000.000.000	SHP No. 09 / Tongkaina Tahun 2023
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Paniki Dua	369	35.100.000	SHP No. 11 / Paniki Dua Tahun 2023
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Paniki Dua	332	19.950.000	SHP No. 12 / Paniki Dua Tahun 2023
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Paniki Bawah	1.261	94.725.000	SHP No. 33 / Paniki Bawah Tahun 2023
17	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Paniki Bawah	1.261	28.000.000	SHP No. 33 / Paniki Bawah Tahun 2023
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Kairagi Weru	101	90.000.000	SHP No. 36 / Kairagi Weru Tahun 2023
19	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Mahakeret Timur	1.110	99.900.000	SHP No. 25 / Mahakeret Timur Tahun 2023
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kelurahan Karame	510	90.000.000	SHP No. 10 / Karame Tahun 2023
21	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Malendeng	1.718	150.000.000	SHP No. 16 / Malendeng Tahun 2023
22	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Malendeng	961	230.250.000	SHP No. 15 / Malendeng Tahun 2023
23	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Sindulang Dua	639	22.500.000	SHP No. 15 / Sindulang Dua Tahun 2023
24	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Maasing	956	132.000.000	SHP No. 06 / Maasing Tahun 2023
25	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Ternate Baru	379	20.800.000	SHP No. 06 / Ternate Baru Tahun 2023
26	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Kelurahan Paniki Bawah	5.860	236.000.000	SHP No. 34 / Paniki Bawah Tahun 2023

No	Uraian	Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Keterangan
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah Kantor Dinas Pertanian)	Kelurahan Paniki Bawah	5.860	105.000.0000	SHP No. 34 / Paniki Bawah Tahun 2023
28	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Lapangan	1.301	112.320.000	SHP No. 07 / Lapangan Tahun 2023
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Kairagi Satu	216	49.500.000	SHP No. 18 / Kairagi Satu Tahun 2023
30	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Dendengan Luar	4.965	37.012.500	SHP No. 08 / Dendengan Luar Tahun 2023
31	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Dendengan Luar	4.965	34.875.000	SHP No. 08 / Dendengan Luar Tahun 2023
32	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Lawangirung	7.049	3.509.500.000	SHP No. 31 / Lawangirung Tahun 2023
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Dendengan Dalam	3.459	503.700.000	SHP No. 25 / Dendengan Dalam Tahun 2023
34	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Dendengan Dalam	2.259	603.200.000	SHP No. 24 / Dendengan Dalam Tahun 2023
35	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Mapanget Barat	1.755	70.000.000	SHP No. 0007 / Mapanget Barat Tahun 2023
36	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Islam	2.000	278.400.000	SHP No. 11 / Islam Tahun 2023
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Islam	1.215	115.200.000	SHP No. 10 / Islam Tahun 2023
38	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Singkil Satu	390	240.600.000	SHP No. 06 / Singkil Satu Tahun 2023
39	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Wawonasa	4.522	1.050.000.000	SHP No. 36 / Wawonasa Tahun 2023
40	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Mahawu	1.460	300.000.000	SHP No. 03 / Mahawu Tahun 2023
41	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Kelurahan Mahawu	1.050	157.500.000	SHP No. 04 / Mahawu Tahun 2023

Tabel 5.157 Daftar rincian bidang tanah dalam proses sertifikasi tahun 2023

	No	Uraian	Alamat	Luas (M2)	Nilai (Rp)	Status
Ī	1	Tanah Bangunan	Kelurahan Bumi	1.260	75.600.000	Dalam Proses
L		Kantor Pemerintah	Nyiur			
ſ	2	Tanah Bangunan	Kelurahan Lapangan	161	80.500.000	Dalam Proses
		Kantor Pemerintah				
Ī	3	Tanah Bangunan	Kelurahan Singkil	432	86.400.000	Dalam Proses
		Kantor Pemerintah	Satu			

Ī	4	Tanah	Bangunan	Kelurahan	Tanjung	1.050	157.500.000	Dalam Proses
		Pendidika	ın dan	Batu				
		Latihan (S	Sekolah)					
	5	Tanah	Bangunan	Kelurahan	Kairagi	180	45.000.000	Dalam Proses
		Kantor Pe	emerintah	Dua	-			

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp611.223.529.652,85 dan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp644.370.326.716,35

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.146.797.063,50 atau 5,42% disebabkan oleh karena adanya penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023 (audited)	611.223.529.652,85
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 :	59.626.665.342,00
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	47.399.056.283,00
2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	175.999.450,00
3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	374.795.000,00
4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	266.188.000,00
5) Hibah	6.186.300.000,00
6) Inventarisasi	604.200.000,00
7) Pengakuan Nilai Aset	8.902.200,00
8) Mutasi antar PD	4.611.224.409,00
Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 :	(26.479.868.278,50)
1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(168.395.200,00)
2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(6.000.000,00)
3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(1.679.742.746,40)
4) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	(986.000.000,00)
5) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(17.461.503.158,10)
6) Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan	(550.000,00)
7) Reklasifikasi ke Belanja Persediaan/Barang Habis Pakai	(46.508.4450,00)
8) Koreksi pengurangan nilai lebih bayar tahun 2022	(3.200.000,00)
9) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik	
sebelum tahun 2023	(583.895.665,00)
10) Dipindahkan ke BI Ekstrakomptabel	(514.272.650,00)
11) Mutasi Antar Perangkat Daerah	(4.611.224.409,00)
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	644.370.326.716,35

Penambahan Peralatan Mesin tahun 2023 senilai Rp59.626.665.342,00 disebabkan karena adanya :

1) Belanja Modal Peralatan Mesin senilai Rp47.399.056.283,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.159
Daftar belania modal Peralatan dan Mesin per perangkat daerah

	Bullul Belulju modul i erulutun dan Mesin per perungkat daeran				
No	Nama Perangkat Daerah	Belanja Modal 2023 (Rp)			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.460.168.975,00			
2	Dinas Kesehatan	19.294.035.013,00			

No	Nama Perangkat Daerah	Belanja Modal 2023 (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.335.695.200,00
4	Dinas Kebakaran	390.700.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.282.372.200,00
6	Dinas Perhubungan	75.020.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	502.606.000,00
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	617.779.000,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	83.517.000,00
10	Dinas Pariwisata	250.366.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.527.445.760,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.525.073.500,00
13	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	21.900.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	3.884.018.500,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.000.000,00
16	Dinas Pangan	63.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	184.310.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108.263.000,00
19	Badan Pendapatan Daerah	673.966.000,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	130.953.400,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.443.000,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	301.151.000,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	690.200.000,00
24	Bagian Tata Pemerintahan	73.866.000,00
25	Bagian Administrasi Pembangunan	21.140.000,00
26	Bagian Umum	2.180.075.125,00
27	Bagian Pengadaan Barang Jasa	110.762.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	993.980.300,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	806.140.000,00
30	Inspektorat	230.600.000,00
31	Kecamatan Bunaken	96.510.060,00
32	Kecamatan Bunaken Kepulauan	105.904.000,00
33	Kecamatan Mapanget	75.500.000,00
34	Kecamatan Sario	133.928.000,00
35	Kecamatan Singkil	14.650.000,00
36	Kecamatan Paal Dua	119.735.000,00
37	Kecamatan Tikala	257.352.500,00
38	Kecamatan Tuminting	80.974.000,00
39	Kecamatan Wanea	134.291.750,00
40	Kecamatan Wenang	362.664.000,00

Belanja modal peralatan mesin tahun 2023 sudah termasuk dengan pembayaran hutang (tahun 2019) senilai Rp426.662.500,00 di Dinas Kesehatan dan Rp157.233.165,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp175.999.450,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain senilai Rp374.795.000,00 dengan rician sebagai berikut:
 - Dinas Kebakaran senilai Rp360.000.000,00
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp14.795.000,00
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp266.188.000,00 di Dinas Kebakaran
- 5) Hibah senilai Rp6.186.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Kecamatan Singkil

Dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp83.000.000,00 sesuai Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan No. KPEI-0292/HUT PM-45/0823 tanggal 21 Agustus 2023 berupa TVS Kargo Sampah Hidrolik 1 unit

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari PT. Angkasa Pura Logistik senilai Rp30.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 015/III.16.5.01/CT-2023 berupa 60 unit meja belajar dan 60 unit kursi belajar

- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional senilai Rp24.350.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Antara Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Manado No. 50/SKB-200.KU.04.03/III/2023 No. D.03/PUPR/347/III/2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tanggal 8 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima No. 65/BA-200.KU.04.03/III/2023 berupa Notebook Merk Zyrex Notebook Cruiser 20i7-02 serial number CRU1712WO220 Spesifikasi Barang Processor Intel Core TM i7-1195G7, RAM 8G DDR4, Storage 1TB SSD M2 NVME,VGA Intel Iris Xe Graphics, Window 11
 - b) Dari Kementerian PUPR senilai Rp2.879.750.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 326/BASTB/B615.5/2023 tanggal 15 Desember 2023 berupa :
 - 1. Eskavator Komatsu PC 210 10M0 Long Arm senilai Rp2.025.750.000,00
 - 2. Mini Eskavator Pindad Excava 55 senilai Rp854.000.000,00
- 4. Kecamatan Bunaken

Dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp83.000.000,00 sesuai Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan No. KPEI-0292/HUT PM-45/0823 tanggal 21 Agustus 2023 berupa TVS Kargo Sampah Hidrolik 1 unit

5. Kecamatan Mapanget

Dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp83.000.000,00 sesuai Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan No. KPEI-0292/HUT PM-45/0823 tanggal 21 Agustus 2023 berupa TVS Kargo Sampah Hidrolik 1 unit

6. Kecamatan Tuminting

Dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp83.000.000,00 sesuai Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan No. KPEI-0292/HUT PM-45/0823 tanggal 21 Agustus 2023 berupa TVS Kargo Sampah Hidrolik 1 unit

7. Kecamatan Wanea

Dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp83.000.000,00 sesuai Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan No. KPEI-0292/HUT PM-45/0823 tanggal 21 Agustus 2023 berupa TVS Kargo Sampah Hidrolik 1 unit

8. Dinas Kesehatan

Dari Kementerian Kesehatan senilai Rp2.817.200.000,00 berupa:

- a) Pulse Oximeter 16 Unit seharga Rp4.250.000,00/unit. Total nilai Rp68.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 Tanggal 15 Desember 2023
- b) Set Antropometri-2 BT 348 Unit seharga Rp7.900.000,00/unit. Total nilai Rp2.749.200.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. BJ.01.04/PPK4.1/1037/2023 Tanggal 19 Desember 2023
- 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari Biro Keuangan Setjen Kemendikbud senilai Rp20.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana Prasarana No. 23407/3/A2/KU.07.00/2023 ke SD Negeri 07 Manado berupa :

- a) 25 Unit Meja Murid dengan nilai Rp10.000.000,00
- b) 25 Unit Kursi Murid dengan nilai Rp7.500.000,00
- c) 1 unit Meja guru dengan nilai Rp1.500.000,00
- d) 1 unit Kursi Guru dengan nilai Rp1.000.000,00
- 6) Inventarisasi senilai Rp604.200.000,00 di Dinas Kebakaran dari Bank Sulutgo tanggal 17 Desember 2017 senilai Rp604.200.000,00 berupa Mobil Pemadam Kebakaran merk Izusu.
- 7) Pengakuan Nilai Aset senilai Rp8.902.200,00 di Dinas Kesehatan
- 8) Mutasi antar PD senilai Rp4.611.224.409,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dari Bagian Umum senilai Rp26.800.000,00 berupa:

- 1. PC Unit merk Asus V241FFT-BA741T senilai Rp19.600.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/1386/2022 tanggal 2 Desember 2022
- 2. Printer Merk Epson L4260 senilai Rp7.200.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/1385/2022 tanggal 2 Desember 2022
- 2) Bagian Umum

Dari Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp271.700.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 0248/Setdako/1705/2023 berupa Kendaraan Pick Up Toyota Hilux DB 8107 A tahun 2015 Nomor Mesin 2 SV24463225013 A13 Nomor Rangka MH32SV003FK244575

3) Bagian Hukum

Dari Bagian Umum senilai Rp25.130.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/38/2023 tanggal 3 Februari 2023 berupa :

- a) PC Unit senilai Rp17.930.000,00
- b) Printer Merk Epson senilai Rp7.200.000,00
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dari Bagian Umum senilai Rp19.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima

No. 028/Setdako/585/2023 tanggal 13 Juli 2023 berupa :

- a) Meja Kerja Pejabat Eselon II senilai Rp8.070.000,00
- b) Kursi Kerja Pejabat Eselon III senilai Rp4.400.000,00
- c) Printer Epson L4260 senilai Rp7.200.000,00
- 5) Kecamatan Singkil

Dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp107.286.500,00 berupa:

- a) 2 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 00.1.7/BAP/DLH/142/2023 tanggal 31 Januari 2023
- b) Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesua Berita Acara Serah Terima No. /BAP/DLH/ /2023 Tanggal 6 Juli 2023
- c) Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesua Berita Acara Serah Terima No. /BAP/DLH/ /2023 Tanggal 6 Juli 2023
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a) Dari Bagian Umum senilai Rp186.490.500,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 024/Setdako/1705/2023 Tanggal 1 November 2023 berupa Toyota Hilux S-CAB GASOLINE (2015)
 - b) Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp252.500.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 000.2.4/D.08/DUKCAPIL/390/2023

Tanggal 12 September 2023 berupa Stasio Wagon Kijang Inova DB 1039 A Tahun Perolehan 2012

7) Kecamatan Paal Dua

Dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp107.286.500,00 berupa:

- a) 2 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM G200 R 2M+DP RE, senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 700.1/BAP/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023
- b) Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesua Berita Acara Serah Terima No. 001 /BPA/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023
- c) Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesua Berita Acara Serah Terima No. 001/BAP/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023
- 8) Badan Pendapatan Daerah

Dari Bagian Umum senilai Rp1.284.665.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/09/Setdako/36 Tanggal 3 Februari 2023

9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.254.131.159,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. D.03/PUPR/346/III/2023 Tanggal 8 Maret 2023 berupa Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya Merk Hino WU342R-HKMTJD3

10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari Bagian Umum senilai Rp904.285.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/09/Setdako/37/2023 Tanggal 3 Februari 2023

11) Kecamatan Sario

Dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp163.379.750,00

- a. 3 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 00.171/BAP/DLH/154a/2023
- b. Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 129a /BPA/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
- c. Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No.129a/BAP/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
- d. 2 Unit Mesin Potong Rumput/Brush Cutter STIHL FR 3001 seharga Rp3.950.000,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No.129b/BAP/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
- 12) Kecamatan Tuminting

Dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp7.900.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 03/ BAP/DLH/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 berupa 2 unit Mesin Potong Rumput/Brush Cutter STIHL FR 3001 seharga Rp3.950.000,00/unit

Pengurangan Peralatan Mesin Tahun 2023 senilai Rp26.479.868.278,50 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp168.395.200,00 di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp6.000.000,00 Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.679.742.746,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Umum senilai Rp10.000.000,00
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.669.742.746,40
- 4) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp986.000.000,00 di Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain senilai Rp17.461.503.158,10 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp100.247.300,00
- b) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp245.105.900,00
- c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp152.800.400,00
- d) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.286.442.987,00
- e) Bagian Perekonomian senilai Rp55.732.450,00
- f) Bagian Hukum senilai Rp39.264.500,00
- g) Bagian Organisasi senilai Rp120.403.425,00
- h) Kecamatan Singkil senilai Rp425.776.000,00
- i) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1.046.120.950,00
- j) Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.679.842.795,50
- k) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp30.460.000,00
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat senilai Rp9.720.000,00
- m) Kecamatan Paal Dua senilai Rp596.048.340,00
- n) Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.317.961.525,00
- o) Dinas Kebakaran senilai Rp240.000.000,00
- p) Dinas Perhubungan senilai Rp1.732.730.900,00
- q) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp628.092.705,05
- r) Kecamatan Malalayang senilai Rp230.025.600,00
- s) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp113.910.550,00
- t) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.201.285.490,00
- u) Kecamatan Sario senilai Rp1.660.928.925,00
- v) Kecamatan Tuminting senilai Rp991.312.611,00
- w) Kecamatan Wenang senilai Rp2.551.462.304,55
- x) Kecamatan Bunaken senilai Rp5.827.500,00
- 6) Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan senilai Rp550.000,00 Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) Reklasifikasi ke Belanja Persediaan/Barang Habis Pakai senilai Rp465.084.450,00 di Dinas Kesehatan
- 8) Koreksi pengurangan nilai lebih bayar tahun 2022 senilai Rp3.200.000,00 di Dinas Kesehatan berupa laptop Azus seharga Rp13.800.000,00, pengadaan Tahun 2020 tetapi terbayar sebesar Rp17.000.000,00 di tahun 2022 (Hutang tahun 2020)
- 9) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik sebelum tahun 2023 senilai Rp583.895.665,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Kesehatan senilai Rp426.662.500,00 (Hutang Tahun 2019)
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp157.233.165,00 (Hutang Tahun 2022)
- 10) Dipindahkan ke BI Ekstrakomptabel senilai Rp514.272.650,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Umum senilai Rp39.300.000,00
 - b) Dinas Pariwisata senilai Rp7.353.000,00
 - c) Kecamatan Bunaken Kepulauan senilai Rp14.000.000,00
 - d) Kecamatan Sario senilai Rp20.195.000,00
 - e) Kecamatan Tuminting senilai Rp1.650.000,00
 - f) Dinas Kesehatan senilai Rp90.532.930,00
 - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp292.254.220,00
 - h) Kecamatan Tikala senilai Rp48.987.500,00
- 11) Mutasi Antar Perangkat Daerah senilai Rp4.611.224.409,00 dengan rincian sebagai berikut
 - a) Bagian Umum

- 1. Mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp904.285.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/09/Setdako/37/2023 Tanggal 3 Februari 2023
- 2. Mutasi ke Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.284.665.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/09/Setdako/36 Tanggal 3 Februari 2023
- 3. Mutasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp26.800.000,00 berupa :
 - a) PC Unit merk Asus V241FFT-BA741T senilai Rp19.600.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/1386/2022 tanggal 2 Desember 2022
 - b) Printer Merk Epson L4260 senilai Rp7.200.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/1385/2022 tanggal 2 Desember 2022
- 4. Mutasi ke Bagian Hukum senilai Rp25.130.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/38/2023 tanggal 3 Februari 2023 berupa :
 - a) PC Unit senilai Rp17.930.000,00
 - b) Printer Merk Epson senilai Rp7.200.000,00
- 5. Mutasi ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp19.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 028/Setdako/585/2023 tanggal 13 Juli 2023 berupa :
 - a) Meja Kerja Pejabat Eselon II senilai Rp8.070.000,00
 - b) Kursi Kerja Pejabat Eselon III senilai Rp4.400.000,00
 - c) Printer Epson L4260 senilai Rp7.200.000,00
- 6. Mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp186.490.500,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 024/Setdako/1705/2023 Tanggal 1 November 2023 berupa Toyota Hilux S-CAB GASOLINE (2015)
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Mutasi ke Bagian Umum senilai Rp271.700.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 0248/Setdako/1705/2023 berupa Kendaraan Pick Up Toyota Hilux DB 8107 A tahun 2015 Nomor Mesin 2 SV24463225013 A13 Nomor Rangka MH32SV003FK244575
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.254.131.159,00 sesuai Berita Serah Terima Acara No. D.03/PUPR/346/III/2023 Tanggal 8 Maret 2023 berupa Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya Merk Hino WU342R-HKMTJD3
- d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp252.500.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 000.2.4/D.08/DUKCAPIL/390/2023 Tanggal 12 September 2023
- e) Dinas Lingkungan Hidup
 - 1. Mutasi ke Kecamatan Singkil senilai Rp107.286.500,00 berupa :
 - a. 2 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 00.1.7/BAP/DLH/142/2023 tanggal 31 Januari 2023
 - b. Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. /BAP/DLH/ /2023 Tanggal 6 Juli 2023
 - c. Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. /BAP/DLH/ /2023 Tanggal 6 Juli 2023
 - 2. Mutasi ke Kecamatan Paal Dua senilai Rp107.286.500,00 berupa:
 - a. 2 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM G200 R 2M+DP RE, senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 700.1/BAP/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023

- b. Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 001 /BPA/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023
- c. Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 001/BAP/DLH/06/2023 Tanggal 10 Mei 2023
- 3. Mutasi ke Kecamatan Sario senilai Rp163.379.750,00 berupa :
 - a. 3 Unit Motor Sampah Roda Tiga HTM senilai Rp48.193.250,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No. 00.171/BAP/DLH/154a/2023
 - b. Mesin Chainsaw Stihk MS 180 senilai Rp4.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 129a /BPA/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
 - c. Mesin Chainsaw Stihk MS 250 senilai Rp5.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No.129a/BAP/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
 - d. 2 Unit Mesin Potong Rumput/Brush Cutter STIHL FR 3001 seharga Rp3.950.000,00/unit sesuai Berita Acara Serah Terima No.129b/BAP/DLH/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023
- 4. Mutasi ke Kecamatan Tuminting senilai Rp7.900.000,00 berupa:
 - a. 1 Unit Mesin Potong Rumput/Brush Cutter STIHL FR 3001 senilai Rp3.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 02/BAP/DLH/VII/2023
 - b. 1 Unit Mesin Potong Rumput/Brush Cutter STIHL FR 3001 senilai Rp3.950.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 03/BAP/DLH/VII/2023

Pada Dinas Kesehatan Kota Manado terdapat hibah dari Kementerian Kesehatan berupa :

- Nilkamal Limited Vaccine Carrier (9000 Unit) Model BCV43A with 4 Ice Packs WHO 2023 sebanyak 29 unit seharga Rp139.166,00/unit, dengan total harga sebesar Rp4.035.814,00 dan
- 2. Vaccine Refrigerator Vesforst 404 VLS 404 AC JICA 2023 sebanyak 2 unit seharga Rp48.994.570,00/unit dengan total harga sebesar Rp97.989.140,00

Namun atas barang tersebut belum dicatat sebagai aset Dinas Kesehatan Kota Manado karena belum ada Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Kesehatan.

5.3.1.3.c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp1.106.621.244.799,36 dan pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp1.253.763.160.245,07

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp147.141.915.445,71 atau 13,30% disebabkan oleh karena adanya penambahan dan pengurangan nilai sebagai berikut :

Tabel 5.160 Rincian Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2023 (audited)	1.106.621.244.799,36
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 :	264.154.963.949,29
1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	128.072.927.886,00
2) Pengakuan Nilai Aset	952.555.335,00
3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	168.395.200,00
4) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.103.175.711,40
5) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.353.490.917,00

Uraian	Jumlah
6) Hibah	29.843.279.183,00
7) Mutasi Antar Perangkat Daerah	27.168.910.216,89
8) Koreksi Ekuitas	492.229.500,00
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 :	(117.013.048.503,58)
1) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, Jaringan	(11.288.421.664,00)
2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(58.842.398.857,00)
3) Reklasifikasi ke Properti Investasi	(547.500.000,00)
4) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.409.146.875,29)
5) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik	
sebelum tahun 2023	(9.756.670.890,40.)
6) Mutasi Antar Perangkat Daerah	(27.168.910.216,89)
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	1.253.763.160.245,07

Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp264.154.963.949,29 disebabkan karena adanya :

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp128.072.927.886,00 dengan rincian :

Tabel 5.161 Daftar belanja modal Gedung dan Bangunan per perangkat daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Belanja Modal 2023
		(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.576.008.886,00
2	Dinas Kesehatan	11.734.444.452,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.072.453.054,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.226.908.844,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	463.112.650,00

- 2) Pengakuan Nilai Aset senilai Rp952.555.335,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp928.180.985,00
 - b) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp24.374.350,00
- 3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp168.395.200,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp76.103.175.711,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.526.960.600,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp73.576.215.111,40
- 5) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.353.490.917,00
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp471.104.812,00
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp344.968.000,00
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp537.418.105,00
- 6) Hibah senilai Rp29.843.279.183,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Kebakaran

Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Kebakaran senilai Rp1.441.000.000,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa :

- 1) 1 unit Hanggar Damkar senilai Rp720.500.000,00 di Mapanget
- 2) 1 unit Hanggar Damkar senilai Rp720.500.000,00 di Singkil Dua
- b) Dinas Pemuda dan Olahraga

Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp11.255.800.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Pemerintah Kota Manado No. PL.02.03/6.20.36/B.IV/VI/2023 No. 264/D15/PORA/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Pembangunan Track Sintetik Atletik Pada Stadion Balika Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kepada Pemerintah Kota Manado. Bangunan Olahraga Terbuka Permanen tersebut seluas 4.186,38 m2.

- c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Hibah dari Kementerian Perdagangan senilai Rp6.576.735.345,00 berupa :
 - a. Pasar Rakyat Buha seluas 729,6 m2 di Jalan Raya Buha Desa Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Naskah Hibah Antara kementerian Perdagangan Dengan Kota Manado DAG/NH/03/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Kota Manado tanggal 31 Maret 2021 dan Berita Acara Serah Terima No. 35/M-DAG/BAST/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp3.808.448.500,00
 - b. Pasar Rakyat Restorasi Malalayang seluas 528 m2 di Jalan Raya Kayu Bulan Malalayang Desa Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Naskah Hibah Antara Kementerian Perdagangan Dengan Kota Manado No. 80/M-DAG/NH/03/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Kota Manado tanggal 31 Maret 2021 dan Berita Acara Serah Terima No. 79/M-DAG/BAST/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp2.768.286.845,00
 - 2) Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 senilai Rp1.433.037.500,00 dan dicatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa Bangunan Menara Pengawas
- d) Dinas Lingkungan Hidup
 - Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp8.589.206.338,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa :
 - 1) Taman Kawasan Jembatan Soekarno Kota Manado (-DAS Tondano dari seputaran menara pengawas Pasar Bersehati) senilai Rp4.021.833.338,00
 - 2) Taman Kawasan Jembatan Soekarno Kota Manado (Taman di DAS Tondano Sindulang I, dekat Jembatan Soekarno dan taman Welcome Manado) senilai Rp4.567.373.000,00
- e) Dinas Pariwisata

Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Pariwisata senilai Rp273.750.000,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang

Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa Taman Kesatuan Bangsa

f) Dinas Komunikasi dan Informatika

Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp273.750.000,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa Taman Kesatuan Bangsa

- 7) Koreksi ekuitas atas kapitalisasi aset gedung dan bangunan pada Dinas PUPR yang bersumber dari belanja barang dan jasa TA 2022 senilai Rp492.229.500,00
- 8) Mutasi Antar Perangkat Daerah senilai Rp27.168.910.216.89 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Umum

Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp17.129.989.416,89 berupa Bangunan Gedung Permanen sesuai Berita Acara Serah Terima No. D.03/PUPR/289/II/2023 tanggal 27 Februari 2023

b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.486.632.800,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 3094/D.01/Dikbud/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 berupa :

- 1. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di Jalan Samratulangi No.49 dengan nilai Rp452.206.400,00
- 2. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di Jalan Samratulangi No.49 dengan nilai Rp452.206.400,00
- 3. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di Jalan Samratulangi No.49 dengan nilai Rp491.311.000,00
- 4. Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen di Jalan Samratulangi No.49 dengan nilai Rp90.909.000,00
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutasi dari Dinas Ketenagakerjaan senilai Rp7.813.847.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima No. 903/D.20/Naker/B.1/XI/2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Bangunan Kantor UPTD Tenaga Kerja di Kelurahan Kairagi II Tahun Perolehan 2017 dengan nilai Rp2.905.110.000,00
- 2. Workshop Pusat Latihan Ketenagakerjaan di Kelurahan Kairagi II Tahun Perolehan 2018 dengan nilai Rp4.908.737.000,00
- d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp738.441.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima no. 3333/D.01/Sekre/X/2023 Tanggal 6 September 2023 berupa:

- 1. Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea dengan nilai Rp76.626.000,00
- 2. Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea dengan nilai Rp37.008.000,00
- 3. Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea dengan nilai Rp27.756.000,00
- 4. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea dengan nilai Rp597.051.000,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan senilai Rp117.013.048.503,58 tahun 2023 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp11.288.421.664,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp58.842.398.857,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp48.893.879.045,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp9.948.519.812,00
- 3) Reklasifikasi ke Properti Investasi senilai Rp547.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pariwisata senilai Rp273.750.000,00
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp273.750.000,00
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain senilai Rp9.409.146.875,29 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.876.774.512,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.433.037.500,00
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp611.440.000,00
 - d) Dinas Kesehatan senilai Rp3.487.894.863,29 berupa:
 - 1. Gedung Puskesmas senilai Rp2.253.205.957,53
 - 2. Rumah Negara golongan III senilai Rp498.561.473,71
 - 3. Rumah dinas senilai Rp736.127.432,05

Ketiga Gedung dan bangunan di atas terletak di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. Karena adanya putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh penggugat (Rut Tumoka) sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor: 1184/PK/PDT/2022/PN.MND jo. 447/PDT.G/2017/PN.MND memberitahukan kepada Pemerintah Kota Manado,dkk cq Sammy Mananoma,SH, MH sebagai kuasa para penggugat d/a Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai Para pemohon PK tentang isi putusan PK pada tanggal 30 Desember 2022, yang telah diputus dalam perkara perdata antara Pemerintah Kota Manado sebagai tergugat/ Pemohon PK lawan Rut Tumoka, dkk sebagai penggugat/termohon PK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para tergugat peninjauan kembali Pemerintah Kota Manado, cq. Lurah Bunaken Kepulauan, cq. Lurah Bunaken

Pemerintah Kota Manado, cq. Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan

Pemerintah Kota Manado cq. Wali Kota Manado, cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, cq. Ricky Kaunang ,SKM dan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 153/PDT/2018/PT.MND, jo Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.Mnd telah memberitahukan kepada Ezri Tumuwo,SH,MH (advokat/konsultan hukum) sebagai Kuasa Pembanding II/kuasa tergugat IV dan tergugat V tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Januari 2018 nomor 153/PDT/2018/PT.MND, dalam perkara antara Netty Caroles,dk sebagai pembanding lawan Rut Tumoka,dkk sebagai terbanding mengadili:

Menerima permohonan banding dari pembanding I dan tergugat III dan pembanding II semula tergugat II, tergugat IV dan tergugat V

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 447/PDT.G/2017/PN.MND tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan/permohonan kasasi atas putusan terakhir dalam tenggat waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

- 5) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik sebelum tahun 2023 senilai Rp9.756.670.890,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp182.535.203,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp64.713.579,40
 - c) Dinas Kesehatan senilai Rp8.954.967.779,00
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp554.454.329,00
- 6) Mutasi Antar Perangkat Daerah senilai Rp27.168.910.216,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp1.486.632.800,00

Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp738.441.000,00

- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Mutasi ke Bagian Umum senilai Rp17.129.989.416,89
- c) Dinas Ketenagakerjaan
 Mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Pembangunan Pagar oleh CV. Nandita Surya Kencana senilai Rp747.865.000,- atas normalisasi sungai dengan nomor Berita Acara Serah Terima Penyerahan D.03/PUPR/CK-09-2.01-03/001/BASTP/XI/2023 tanggal 09/11/2023 yang dibangun di atas tanah Politeknik Kesehatan. Adapun aset tersebut rencananya akan dihibahkan kepada Politeknik Kesehatan di tahun 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp7.813.847.000,00

Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp1.755.964.579.623,79 dan pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp1.953.681.824.358,79 Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp197.717.244.735,00 atau 11,26% disebabkan oleh karena adanya penambahan dan pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.162 Rincian Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2023 (audited)	1.755.964.579.623,79
Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 :	238.994.046.414,26
1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	92.448.932.428,00
2) Pengakuan Nilai Aset	1.172.458.646,00
3) Hibah	106.705.335.756,00
4) Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	6.000.000,00
5) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	11.288.421.664,00
6) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	261.39.274.815,26
7) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.233.623.105,00
Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 :	(41.276.801.679,26)
1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(18.145.496.370,00)
2) Reklasifikasi ke Aset Lain lain	(1.251.775.900,00)
3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(198.200.000,00)
4) Reklasifikasi ke Persediaan	(16.218.680.000,00)
5) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik	
sebelum tahun 2023	(2.666.349.409,26)

Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	1.953.681.824.358,79
sebelum tahun 2023 dan sudah direklasifikasi ke Persediaan	(2.796.300.000,00)
6) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fis	ik

Penambahan jalan irigasi dan jaringan tahun 2023 senilai Rp238.994.046.414,26 disebabkan karena adanya :

- 1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp92.448.932.428,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Kesehatan senilai Rp2.663.553.072,00
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp68.925.654.356,00
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp20.842.450.000,00
 - d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp17.275.000,00
- 2) Pengakuan Nilai Aset senilai Rp1.172.458.646,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3) Hibah senilai Rp106.705.335.756,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp94.922.996.627,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa :
 - a) Pedestrian Kawasan Sam Ratulangi Kota Manado senilai Rp4.479.070.000,00
 - b) Sistem Drainase Primer (Instalasi Air Buangan Domestik Lainnya) Boulevard Kota Manado senilai Rp8.100.633.000,00
 - c) Drainase Perkotaan (Instalasi Air Buangan Domestik Lainnya) senilai Rp9.830.134.000,00
 - d) Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Megamas Kota Manado senilai Rp29.716.526.950,00
 - e) Jaringan IPAL Kawasan Boulevard Kota Manado senilai Rp31.706.150.000,00
 - f) Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Pantai Malalayang Kota Manado senilai Rp6.420.710.157,00
 - g) SPAM KSPN Kecamatan Bunaken Kota Manado senilai Rp3.333.239.120,00
 - h) SPAM di Kawasan MBR Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado senilai Rp1.336.533.400,00
 - 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Hibah PSU dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 852/BA/Dr/2022 032/B.02/BKAD/839/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima No. 2105/BA/Dr/2023 600.2.1/D.04/PERKIM/1843/2023 tanggal 26 Oktober 2023 kemudian dicatat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp3.057.165.129,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa :
 - a) Jalan Perumahan Puri Manado Permai senilai Rp695.602.129,00 (Berita Acara Serah Terima No. 852/BA/Dr/2022 - 032/B.02/BKAD/839/2022 tanggal 7 Juli 2022)

- b) Jalan Perumahan Merpati Kima Village senilai Rp243.568.000,00 (Berita Acara Serah Terima No. 2105/BA/Dr/2023 600.2.1/D.04/PERKIM/1843/2023 tanggal 26 Oktober 2023)
- c) Jalan Perumahan Griya Paniki Indah II senilai Rp1.490.665.000,00 (Berita Acara Serah Terima No. 2105/BA/Dr/2023 600.2.1/D.04/PERKIM/1843/2023 tanggal 26 Oktober 2023)
- d) Jalan Perumahan Puri Manado Permai senilai Rp627.330.000,00 (Berita Acara Serah Terima No. 2105/BA/Dr/2023 600.2.1/D.04/PERKIM/1843/2023 tanggal 26 Oktober 2023)
- 3. Dinas Lingkungan Hidup
 - Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp8.725.174.000,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa :
 - a) Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan TPA Sumompo Kota Manado senilai Rp451.700.000,00
 - b) Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan TPA Sumompo Kota Manado senilai Rp8.273.474.000,00
- 4) Reklasifikasi dari Peralatan Mesin senilai Rp6.000.000,00 berupa sumur gali di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp11.288.421.664,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp26.139.274.815,26 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 7) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.233.623.105,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp41.276.801.679,26 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp18.145.496.370,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lain lain senilai Rp1.251.775.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.172.975.900,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp78.800.000,00
- 3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp198.200.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp16.218.680.000,00 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5) Pengurangan nilai yang sudah diakui berdasarkan realisasi fisik sebelum tahun 2023 senilai Rp5.462.649.409,26 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.491.843.337,26
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.796.300.000,00
 - c) Dinas Kesehatan senilai Rp174.506.072,00

Berdasarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 56/KEP/D.03/PUPR/2023 tanggal 3 Februari 2023, diketahui bahwa jumlah ruas jalan yaitu sebanyak 1.666 ruas dengan total panjang 802,049 KM. Hasil Rekonsiliasi Data Ruas Jalan dengan KIB Jalan, Irigasi

dan Jaringan pada Dinas PUPR Kota Manado pada tanggal 20 Juni 2023 yaitu: 1. Dalam LHP BPK-RI atas LKPD Kota Manado Tahun 2022, jumlah ruas jalan di KIB D pada Dinas PUPR adalah 1.687. Dalam database SIMDA BMD, di KIB D Dinas PUPR tercantum 1.640 ruas jalan dan 68 jembatan; 2. Jumlah ruas jalan dalam Keputusan Walikota di atas yaitu sebanyak 1.666; dan 3. Terhadap perbedaan jumlah ruas jalan tersebut, Dinas PUPR akan melakukan inventarisasi dan identifikasi, selanjutnya melakukan perbaikan/koreksi pencatatan, dan pemutakhiran SK jalan. Atas hasil rekonsiliasi tersebut, terkait temuan BPK pada poin (1), sampai saat ini belum ada penyelesaian tindak lanjut.

5.3.1.3.e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp46.162.240.939,21, dan pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp50.562.371.011,61 Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar Rp4.400.130.072,40 atau 9,53% disebabkan oleh karena adanya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.163 Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2023 (audited)	46.162.240.939,21
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023:	4.596.948.464,40
1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	2.917.205.718,00
2) Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	1.679.742.746,40
Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023:	(196.818.392,00)
1) Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	(175.999.450,00)
2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(3.412.442,00)
3) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	(17.400.000,00)
4) Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai	(6.500,00)
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	50.562.371.011,61

Penambahan nilai aset tetap lainnya tahun 2023 senilai Rp4.596.948.464,40 disebabkan karena adanya :

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp2.917.205.718,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.799.950.718,00
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp99.855.000,00
 - c) Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp17.400.000,00
- 2) Reklasifikasi dari Peralatan Mesin senilai Rp1.679.742.746,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Umum senilai Rp10.000.000,00
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.669.742.746,40

Pengurangan Aset Tetap tahun 2023 senilai Rp196.818.392,00 disebabkan karena adanya:

- Reklasifikasi ke Peralatan Mesin senilai Rp175.999.450,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp3.412.442,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp261.250,00

- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp3.000.000,00
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp151.192,00
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp17.400.000,00 di Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai senilai Rp6.500,00 berupa buku administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.3.1.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp111.056.209.085,66 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terjadi penambahan dan pengurangan sehingga saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 mempunyai nilai Rp93.785.691.949,42 . Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp17.270.517.136,24 atau turun 15,55%.

Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.164 Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 1 Januari 2023 (audited)	111.056.209.085,66
Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023:	84.971.933.390,42
1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	58.842.398.857,00
2) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.145.496.370,00
3) Pengakuan nilai aset berdasarkan realisasi fisik	4.532.578.156,42
4) Reklasifikasi dari Belanja Jasa	2.227.333.720,00
4) Koreksi Ekuitas	1.224.126.287,00
Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023:	(102.242.450.526,66)
1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(76.103.175.711,40)
2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(26.139.274.815,26)
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	93.785.691.949,42

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 senilai Rp84.971.933.390,42 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp58.842.398.857,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp48.893.879.045,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp9.948.519.812,00
- 2) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp18.145.496.370,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Pengakuan nilai aset berdasarkan realisasi fisik senilai Rp4.532.578.156,42 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.970.545.406,42
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp562.032.750,00
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Jasa senilai Rp2.227.333.720,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5) Koreksi ekuitas atas kapitalisasi aset gedung dan bangunan pada Dinas PUPR yang bersumber dari belanja barang dan jasa TA 2022 senilai Rp 1.224.126.287,00.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 senilai Rp102.242.450.526,66 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp76.103.175.711,40 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.526.960.600,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp73.576.215.111,40
- 2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp26.139.274.815,26 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.1.3.g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Metode perhitungan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kota Manado adalah metode garis lurus, tanpa nilai sisa. Akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp1.721.178.334.493,48 dan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp1.516.350.856.785,58, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp204.827.477.707,90 atau naik 13,51%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.165
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022
a. Peralatan Dan Mesin	474.132.052.420,31	434.120.431.770,81
b. Gedung dan Bangunan	160.709.692.970,00	140.723.735.518,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.086.212.598.334,05	941.422.911.950,07
d. Aset Tetap Lainnya	123.990.769,12	83.777.546,70
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.721.178.334.493,48	1.516.350.856.785,58

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp434.120.431.770,81 dan tahun 2023 sebesar Rp474.132.052.420,31, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp40.011.620.649,50 atau naik 9,22%. Rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penambahan atas penyusutan tahun 2023 sebesar Rp57.834.878.442,60;
- Pengurangan atas reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp17.045.637.513,10;
- Pengurangan atas reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp777.620.280,00.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp140.723.735.518,00 dan tahun 2023 sebesar Rp160.709.692.970,00, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp19.985.957.452,00 atau naik 14,20%. Rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penambahan atas penyusutan tahun 2023 sebesar Rp21.168.263.856,00;
- Pengurangan atas reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.182.306.404,00.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp941.422.911.950,07 dan tahun 2023 sebesar Rp1.086.212.598.334,05, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp144.789.686.383,98 atau naik 15,38%.

Rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penambahan atas penyusutan tahun 2023 sebesar Rp145.104.174.652,98;
- Pengurangan atas reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp314.488.269,00.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp83.777.546,70 dan tahun 2023 sebesar Rp123.990.769,12, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp40.213.222,42 atau naik 48,00%. Rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penambahan atas penyusutan tahun 2023 sebesar Rp40.213.222,42.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp211.015.677.650,61 dan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp241.750.510.127,91. Jika dibandingkan, terjadi penurunan sebesar Rp30.734.832.477,30 atau 12,71%.

Masing-masing Aset Lainnya dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5.166 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Aset Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Tagihan Jangka Panjang	72.354.200,21	72.354.200,21
b.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	227.019.145,00
c.	Aset Tak Berwujud	15.938.151.648,00	14.244.801.648,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.252.527.635,97)	(8.572.851.716,81)
	Aset Tak Berwujud Netto	5.685.624.012,03	5.671.949.931,19
d.	Aset Lain-Lain	334.375.458.173,22	355.184.753.123,27
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(138.240.934.734,85)	(125.803.876.822,76)
	Aset Lain-lain Netto	196.134.523.438,37	229.380.876.300,51
e.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	9.123.176.000,00	6.398.310.551,00
	Jumlah Aset Lainnya	211.015.677.650,61	241.750.510.127,91

5.3.1.4.a Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan reklasifikasi kas di Bendahara Pengeluaran, yaitu PFK Tahun Anggaran 2011 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp72.354.200,21 ke Aset Lainnya Piutang TGR sesuai Surat Pernyataan yang telah dibuat pada bulan Desember 2017.

5.3.1.4.b Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Manado Tahun 2022 berjumlah Rp227.019.145,00,00 dan pada tanggal 31 Desember 2023 nilainya sebesar Rp0,00.

Pengurangan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 senilai Rp227.019.145,00 disebabkan karena adanya Reklasifikasi ke Properti Investasi senilai Rp227.019.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dinas Pariwisata senilai Rp194.100.000,00 berupa Rehabilitasi Pusat Informasi di Taman Kesatuan Bangsa
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp32.919.145,00 berupa Bangunan Tempat Kerja Lain-lain

5.3.1.4.c Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Manado Tahun 2022 berjumlah Rp14.244.801.648,00 dan pada tanggal 31 Desember 2023 nilainya sebesar Rp15.938.151.648,00. Jika dibandingkan, terdapat kenaikan sebesar Rp1.693.350.000,00 atau 11.89%.

Perubahan nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023 disebabkan oleh penambahan nilai aset berdasarkan :

- a) Reklasifikasi dari peralatan mesin senilai Rp986.000.000,00. Di Dinas Komunikasi dan Informatika
- b) Reklasifikasi dari dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp17.400.000,00 di Badan Keuangan dan Aset Daerah
- c) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp240.000.000,00 di Badan Pendapatan Daerah
- d) Reklasifikasi dari Belanja Jasa senilai Rp449.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp64.950.000,00
 - 2) Dinas Kesehatan senilai Rp200.000.000,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp185.000.000,00

Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022 sebesar Rp8.572.851.716,81 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan Rp1.679.675.919,16 atau 19,59% dimana nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 berubah menjadi Rp10.252.527.635,97 Sehingga dari saldo awal Aset Tak Berwujud netto tahun 2022 sebesar Rp5.671.949.931,19, saldo Aset Tak Berwujud Netto pada akhir tahun 2023 diperoleh sebesar Rp5.685.624.012,02.

5.3.1.4.d. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Manado tahun 2022 berjumlah Rp355.184.753.123,27 tanggal 31 Desember 2023 berjumlah dan pada Rp334.375.458.173,23 Jika dibandingkan terjadi penurunan sebesar Rp20.809.294.950,04 atau 5,86% Jumlah tersebut diperoleh oleh karena adanya penambahan dan pengurangan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.167 Rincian Nilai Aset Lain-lain Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lain-lain	355.184.753.123,27
Penambahan Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2023 :	36.679.851.000,38
1) Reklasifikasi dari Tanah	5.550.816.000,00
2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	17.461.503.158,09
3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	9.409.146.875,29
4) Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	1.251.775.900,00

5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	3.412.442,00
6) Hibah	3.003.196.625,00
Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2023 :	(57.489.145.950,42)
1) Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	(374.795.000,00)
2) Penghapusan	(30.663.828.950,42)
3) Penghapusan untuk koreksi nilai tanah berdasarkan BAST yang baru di	
tahun 2023	(26.450.522.000,00)
Saldo Akhir Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	334.375.458.173,23

Akumulasi penyusutan barang rusak berat dari Aset lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp125.803.876.822,76 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.437.057.912,10 atau 9,89%, sehingga menjadi Rp138.240.934.734,86 di tahun 2023, sehingga saldo awal Aset lain-lain netto tahun 2022 senilai Rp229.380.876.300,51, menjadi Rp196.134.523.438,37.di tahun 2023

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan Aset lain-lain senilai Rp36.679.851.000,38 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi dari Tanah senilai Rp5.550.816.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Sekretariat Daerah senilai Rp5.260.710.000,00 dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Utara berdasarkan Acara Serah Sulawesi Berita Terima No.044/B.02/BKAD/810/2021 900/21.5822/Sekr-BKAD dengan luas 3.055 m2, SHP No. 56/Bahu, Tahun Perolehan 2012 untuk digunakan sebagai Pasar Ikan Higienis dengan lokasi Kompleks Bahu Mall, Jalan Wolter Monginsidi No.1 Keputusan Malalayang Kota Manado sesuai Wali Kota No. 224/KEP/B.02/BKAD/2021 dan saat ini sedang dalam proses penghapusan.
 - b) Dinas Kesehatan senilai Rp290.106.000,00
 - Tanah Puskesmas Bunaken yang terletak di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado senilai Rp290.106.000,00 karena adanya putusan pengadilan/ Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh penggugat (Rut Tumoka) Relaas Pemberitahuan Putusan sesuai Nomor 1184/PK/PDT/2022/PN.MND jo. 447/PDT.G/2017/PN.MND memberitahukan kepada Pemerintah Kota Manado,dkk cq Sammy Mananoma,SH, MH sebagai kuasa para penggugat d/a Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai Para pemohon PK tentang isi putusan PK pada tanggal 30 Desember 2022, yang telah diputus dalam perkara perdata antara Pemerintah Kota Manado sebagai tergugat/ Pemohon PK lawan Rut Tumoka, dkk sebagai penggugat/termohon PK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para tergugat peninjauan kembali Pemerintah Kota Manado, cq. Lurah Bunaken Kepulauan, cq. Lurah Bunaken Pemerintah Kota Manado, cq. Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan Pemerintah Kota Manado cq. Wali Kota Manado, cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, cq. Ricky Kaunang ,SKM
- 2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp17.461.503.158,09 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp100.247.300,00
 - b) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp245.105.900,00
 - c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp152.800.400,00
 - d) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.286.442.987,00

- e) Bagian Perekonomian senilai Rp55.732.450,00
- f) Bagian Hukum senilai Rp39.264.500,00
- g) Bagian Organisasi senilai Rp120.403.425,00
- h) Kecamatan Singkil senilai Rp425.776.000,00
- i) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1.046.120.950,00
- j) Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp1.679.842.795,50
- k) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp30.460.000,00
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat senilai Rp9.720.000,00
- m) Kecamatan Paal Dua senilai Rp596.048.340,00
- n) Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.317.961.525,00
- o) Dinas Kebakaran senilai Rp240.000.000,00
- p) Dinas Perhubungan senilai Rp1.732.730.900,00
- q) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp628.092.705,04
- r) Kecamatan Malalayang senilai Rp230.025.600,00
- s) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp113.910.550,00
- t) Badan Penanggulangan Bencana senilai Rp1.201.285.490,00
- u) Kecamatan Sario senilai Rp1.660.928.925,00
- v) Kecamatan Tuminting senilai Rp991.312.611,00
- w) Kecamatan Wenang senilai Rp2.551.462.304,55
- x) Kecamatan Bunaken/DLH senilai Rp5.827.500,00
- 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp9.409.146.875,29 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.876.774.512,00
 - b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.433.037.500,00
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp611.440.000,00
 - d) Dinas Kesehatan senilai Rp3.487.894.863,29 berupa:
 - 1. Gedung Puskesmas senilai Rp2.253.205.957,53
 - 2. Rumah Negara golongan III senilai Rp498.561.473,71
 - 3. Rumah dinas senilai Rp736.127.432,05

Ketiga Gedung dan bangunan di atas terletak di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado. Karena adanya putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh penggugat (Rut Tumoka) sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor: 1184/PK/PDT/2022/PN.MND jo. 447/PDT.G/2017/PN.MND memberitahukan kepada Pemerintah Kota Manado,dkk cq Sammy Mananoma,SH, MH sebagai kuasa para penggugat d/a Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai Para pemohon PK tentang isi putusan PK pada tanggal 30 Desember 2022, yang telah diputus dalam perkara perdata antara Pemerintah Kota Manado sebagai tergugat/ Pemohon PK lawan Rut Tumoka, dkk sebagai penggugat/termohon PK yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para tergugat peninjauan Kembali Pemerintah Kota Manado, cq. Lurah Bunaken Kepulauan, cq. Lurah Bunaken Pemerintah Kota Manado, cq. Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan Pemerintah Kota Manado cq. Wali Kota Manado, cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, cq. Ricky Kaunang, SKM

- 4) Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.251.775.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.172.975.900,00
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp78.800.000,00
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.412.442,00
 - a) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp261.250,00
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp3.000.000,00
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp151.192,00
- 6) Hibah senilai Rp3.003.196.625,00 yaitu:

Dinas Lingkungan Hidup

Hibah dari Kementerian PUPR (kondisi rusak berat) berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023 dan dicatat di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.003.196.625,00 sesuai Keputusan Wali Kota No. 450/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah Yang Diperoleh Dari Perolehan Lainnya Yang Sah Pada Perangkat Daerah Di Kota Manado Tahun Anggaran 2023 berupa Buldozer

Pengurangan Aset lain-lain Tahun 2023 senilai Rp57.489.145.950,43 disebabkan karena adanya :

- 1) Reklasifikasi ke peralatan mesin senilai Rp374.795.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Kebakaran senilai Rp360.000.000,00
 - b) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp14.795.000,00
- 2) Penghapusan senilai Rp30.663.828.950,43 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bagian Umum sesuai Keputusan Wali Kota No. 421/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl.18 Desember 2023 senilai Rp2.636.294.755,56 berupa :
 - Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8510 A, Nomor BPKB M-12904675, Nomor Mesin 1TR8830726, Nomor rangka MROEW8BB7FO200501 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
 - Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8504 A, Nomor BPKB M-12904669, Nomor Mesin 1TR8808314, Nomor rangka MROEW8BB8FO200118 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
 - Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8509 A, Nomor BPKB M-12904673, Nomor Mesin 1TR8825565, Nomor rangka MROEW8BB7FO200373 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
 - Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8511 A, Nomor BPKB M-1290466, Nomor Mesin 1TR8806383, Nomor rangka MROEW8BB1FO200154 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800.00
 - Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8506 A, Nomor BPKB M-12904667, Nomor Mesin 1TR8836303, Nomor rangka MROEW8BB6FO200764 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00

- Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8514 A, Nomor BPKB M-12904668, Nomor Mesin 1TR8831973, Nomor rangka MROEW8BB7FO200546 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
- Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8513 A, Nomor BPKB M-12904671, Nomor Mesin 1TR8815967, Nomor rangka MROEW8BB7FO200126 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
- 8. Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8512 A, Nomor BPKB M-12904674, Nomor Mesin 1TR8806385, Nomor rangka MROEW8BBxFO200153 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
- Kendaraan roda empat merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8515 A, Nomor BPKB M-12904677, Nomor Mesin 1TR8800589, Nomor rangka MROEW8BB8FO200040 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp228.787.800,00
- Kendaraan roda empat merk Isuzu MU-X Vin 2015 DB 1790 A Nomor BPKB L-09791335 Nomor Mesin MY1966 Nomor Rangka MPAUCR86GFT002244 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp459.205.000,00
- Kendaraan roda dua merk Kawasaki LX 150G-Trail DB 5079 A Nomor BPKB L-09807509 Nomor Mesin LX150CEPP7838 Nomor Rangka MH4LX150GFJPO8537 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp29.499.888,89
- Kendaraan roda dua merk Kawasaki LX 150G-Trail DB 5075 A Nomor BPKB L-09807507 Nomor Mesin LX150CEPP3461 Nomor Rangka MH4LX150GFJPO7007 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp29.499.888,89
- Kendaraan roda dua merk Kawasaki LX 150G-Trail DB 5074 A Nomor BPKB L-09807502 Nomor Mesin LX150CEPP7571 Nomor Rangka MH4LX150GFJPO8471 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp29.499.888,89
- 14. Kendaraan roda dua merk Kawasaki LX 150G-Trail DB 5071 A Nomor BPKB L-09807503 Nomor Mesin LX150CEPP3471 Nomor Rangka MH4LX150GFJPO7006 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp29.499.888,89
- b) Bagian Kerja Sama sesuai Keputusan Wali Kota No. 422/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl.18 Desember 2023 senilai Rp306.368.700,00 berupa :
 - Kendaraan merk Toyota All New Hilux, 2.0 L DB 8581 A, Nomor BPKB O-02699644, Nomor Mesin 1TRA223919, Nomor rangka MROEW8BB3HO204029 Tahun Perolehan 2017 dengan nilai Rp235.198.700,00
 - 2. PC Unit Merk LG/24 MK430 dengan nilai Rp35.585.000,00
 - 3. PC Unit Merk LG/24 MK430 dengan nilai Rp35.585.000,00
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Keputusan Wali Kota No. 419/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl.18 Desember 2023 senilai Rp8.892.323.000,00 berupa:
 - 1. Jalan Masuk Terminal Liwas seluas 6.556 m2, Tahun Perolehan 2014 dengan nilai Rp5.761.876.000,00
 - Saluran Jalan Masuk Terminal Liwas seluas 478 m2, Tahun Perolehan 2014 dengan nilai Rp3.130.447.000,00

- d) Dinas Perhubungan sesuai Keputusan Wali Kota No. 420/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl.18 Desember 2023 senilai Rp17.004.667.967,87 berupa :
 - Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 38.375 m2 di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Tahun Perolehan 2008, SHP No. 16/Kelurahan Paal Dua dengan nilai Rp883.000.000,00
 - 2. Tanah Untuk Jalan Khusus/Kompleks seluas 8.250 m2 di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Tahun Perolehan 2009, SHP No. 17/Kelurahan Paal Dua dengan nilai Rp735.000.000,00
 - Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 14.170 m2 di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 07/Kelurahan Malalayang Dua dengan nilai Rp14.602.354.467,87
 - 4. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 5. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 6. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 7. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 8. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 9. Meja Kerja ½ Biro Merk Lokal Tahun Perolehan 2013 dengan nilai Rp2.000.000,00
 - 10. Kipas Angin Merk Sekai, Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp825.000,00
 - 11. Lemari Besi Merk Rione AD-018, Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp3.767.500,00
 - 12. Lemari Besi Merk Rione AD-018, Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp3.767.500,00
 - 13. Komputer PC Merk Lenovo Idea Center AIO 300 Tahun Perolehan 2015 dengan nilai Rp14.982.000,00
 - 14. Kursi Tunggu Merk Informa, Tahun Perolehan 2019 dengan nilai Rp5.000.000,00
 - 15. Kursi Tunggu Merk Informa, Tahun Perolehan 2019 dengan nilai Rp5.000.000,00
 - 16. Printer Merk Epson L-3110, Tahun Perolehan 2019 dengan nilai Rp3.500.000,00
 - 17. Kursi Putar Merk Informa, Tahun Perolehan 2019 dengan nila Rp1.869.500,00
 - 18. Bangunan Kantor Terminal Malalayang di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan nilai Rp261.072.000,00
 - 19. Bangunan Ruang Tunggu Terminal Malalayang di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan nilai Rp254.800.000,00

- Bangunan Ruang Tunggu Terminal Malalayang di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan nilai Rp95.680.000,00
- 21. Terminal Malalayang di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan nilai Rp100.000.000,00
- 22. Ruang Tunggu di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan nilai Rp22.050.000,00
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Keputusan Wali Kota No. 100.3.3.6/KEP/B.02/BKAD/1263/2023) Tgl. 7 September 2023 senilai Rp78.800.000,00 berupa Saluran Drainase/talud di Kelurahan Mahawu
- f) Kecamatan Tuminting sesuai Keputusan Wali Kota No. 418/KEP/B.02/BKAD/2023 tgl.18 Desember 2023 senilai Rp1.745.374.527,00 berupa:
 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 617 m2 di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting, Tahun Perolehan 2006, SHP No. 14/Bitung Karangria dengan nilai Rp77.100.000,00
 - 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 368 m2 Jalan Hasanuddin Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting, Tahun Perolehan 2006, dengan nilai Rp1.668.274.527,00

Penghapusan untuk koreksi nilai tanah berdasarkan BAST yang baru di tahun 2023 senilai Rp26.450.522.000,00 seluas 9.518 m2 (berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor dengan Amandemen 11/PKS/Hkm/95 tanggal 20 Juli 1995 PKS 78/PKS/Am/Hkm/2000 tanggal 19 Juli 2000, PKS Nomor 10/PKS/HKM/2005 088-PKS/PPU/MDO/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 dan Amandemen PKS Nomor 01A/PKS/Am/Hkm/2006 109-PKS/PPU/MDO/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006), kemudian tahun 2023 sudah dilakukan penyerahan oleh pengembang dengan nilai Rp110.900.075.000,00 total luasan 9.581 M2 (yang tercatat dalam dokumen BAST No. 02/BA/Hkm/2023 tgl. 15 November 2023). Penyerahan lahan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kota Manado kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memperoleh hak Pemerintah Kota Manado atas lahan hasil reklamasi. Aset lain-lain tanah reklamasi oleh karena sudah ada penyerahan tahun 2023 maka dilakukan reklasifikasi ke aset tetap tanah. Selisih luas antara aset lain-lain yang diakui tahun 2012 dan aset tanah yang diserahkan tahun 2023 (kelebihan penyerahan lahan 16%) yaitu yang diserahkan tahun 2023 seluas 9.581 m2 dengan nilai Rp110.900.075.000,00 dari luas tahun 2012 sesuai PKS dengan PT. Papetra. Penambahan aset tetap tanah yang diserahkan ada dua bidang yaitu:

- Tanah Hasil Reklamasi senilai Rp3.472.500.000,00 dengan luas 300 m2
- Tanah Hasil Reklamasi senilai Rp107.427.575.000,00 dengan luas 9.281 m2

5.3.1.4.e Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan

penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar, dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat saldo TDF yang dicatat di Aset Lainnya sebesar Rp6.398.310.551,00 dan pada tahun anggaran 2023 telah disalurkan ke RKUD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas Trasury Deposit Facility, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah, Kota Manado mempunyai saldo Dana TDF per Desember 2023 sebesar Rp9.123.176.000,00, dan dicatat sebagai Aset Lainnya pada tahun anggaran 2023.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat. lembaga keuangan atau entitas pemerintah lain. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.168 Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kewajiban	320.432.714.229,44	355.685.206.333,85

Pada tahun 2023 saldo Kewajiban sebesar Rp320.432.714.229,44 dan tahun 2022 sebesar Rp355.685.206.333,85. Jika dibandingkan, terdapat penurunan sebesar Rp35.252.492.104,41 atau turun 9,91%.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota yang diharapkan akan dibayar dalam di tahun depan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2023 sebesar Rp129.616.205.982,44 dan tahun 2022 sebesar Rp117.946.205.424,85, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp11.670.000.557,59 atau naik 9,89%, dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.169 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kewajiban Jangka Pendek	129.616.205.982,44	117.946.205.424,85

5.3.2.1.a Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS, Iuran Wajib Pajak, dan Taperum.

Tabel 5.170 Saldo Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	101.647.113,00	2.351.804.206,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2023 sebesar Rp101.647.113,00 mengalami penurunan sejumlah Rp2.250.157.093,00 atau turun 95,68% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.351.804.206,00.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan potongan Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Taperum dan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah dipungut namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum dipindahbukukan atau disetor ke Kas Negara. sehingga digolongkan sebagai kewajiban lancar dengan penjelasan mutasi selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.171 Mutasi Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang PFK per 31 Desember 2022	2.351.804.206,00
Penerimaan PFK Tahun 2023	100.253.839.805,00
Pengeluaran PFK Tahun 2023	102.503.996.898,00
Utang PFK per 31 Desember 2023	101.647.113,00

Adapun rincian mutasi saldo Utang PFK selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.172 Mutasi Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Jenis Utang PFK	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
Iuran Wajib Pegawai	28.103.957,00	0,00	28.103.957,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	7.641.940,00	4.665.730.116,00	4.673.372.056,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	90,00	18.614.861.663,00	18.614.861.753,00	0,00
Taperum	72.782.779,00	0,00	0,00	72.782.779,00
Pajak Penghasilan Ps 21	69.016.666,00	22.560.302.862,00	22.597.027.508,00	32.292.020,00
Pajak Penghasilan Ps 22	4.599.537,00	1.745.098.322,00	1.748.522.248,00	1.175.611,00
Pajak Penghasilan Ps 23	38.404.367,00	891.917.077,00	929.395.259,00	926.185,00

Jenis Utang PFK	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
Pajak Penghasilan Ps 25	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	368.132.587,00	6.357.352.517,00	6.725.485.164,00	(60,00)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.742.085.498,00	45.415.227.248,00	47.162.842.168,00	(5.529.422,00)
BPJS	21.001.785,00	3.350.000,00	24.351.785,00	0,00
Utang PFK Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.351.804.206,00	100.253.839.805,00	102.503.996.898,00	101.647.113,00

Saldo Utang PFK TA 2023 sejumlah Rp101.647.113,00 terdiri atas Utang PFK SKPD Rp33.314.748,00 dan Utang PFK BUD Rp68.332.365,00. Berikut rincian saldo utang PFK SKPD per jenis pajak Tahun 2023 dan 2022 :

Tabel 5.173 Rincian Saldo Utang PFK SKPD per Jenis Pajak Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo 31 Des 2023	SKPD
PPh 21	30.018.730,00	26.879.192,00	30.018.730,00	26.879.192,00	Dinas Kesehatan
PPh 22	857.535,00	1.175.631,00	857.535,00	1.175.631,00	Dinas Kesehatan
PPh 23	0,00	1.797.047,00	0,00	1.797.047,00	Dinas Kesehatan
PPN	5.415.000,00	3.462.878,00	5.415.000,00	3.462.878,00	Dinas Kesehatan
Utang PFK Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	36.291.265,00	33.314.748,00	36.291.265,00	33.314.748,00	

Saldo Utang PFK SKPD per 31 Desember 2023 sejumlah Rp33.314.748,00 merupakan utang pajak JKN dari beberapa puskesmas yang ada, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.174 Rincian atas Utang PFK SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

			Jenis Pajak			
SKPD	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	Utang PFK Lainnya	Jumlah
Puskesmas Tikala Baru	0,00	825.205,00	1.335.317,00	1.041.590,00	0,00	3.202.112,00
Puskesmas Paniki Bawah	22.029.448,00	222.750,00	461.730,00	1.485.000,00	0,00	24.198.928,00
Puskesmas Minanga	3.210.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.411,00
Puskesmas Teling Atas	80.000,00	127.676,00	0,00	936.288,00	0,00	1.143.964,00
Puskesmas Sario	1.138.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.333,00
Puskesmas Ranotana Weru	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Jumlah	26.879.192,00	1.175.631,00	1.797.047,00	3.462.878,00	0,00	33.314.748,00

Saldo Utang PFK BUD per 31 Desember 2023 Rp68.332.365,00 merupakan potongan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Taperum yang telah dipungut, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum dipindahbukukan atau disetor ke Kas Negara, sehingga digolongkan sebagai kewajiban lancar. Adapun rincian Utang PFK BUD dengan penjelasan mutasi selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.175 Rincian Saldo Utang PFK BUD per Jenis Pajak Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal 2022	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK	Saldo 31 Des 2023
Iuran Wajib Pegawai	28.103.957,00	0,00	28.103.957,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	7.641.940,00	4.665.730.116,00	4.673.372.056,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai 8%	90,00	18.614.861.663,00	18.614.861.753,00	0,00
Taperum	72.782.779,00	0,00	0,00	72.782.779,00
Pajak Penghasilan Ps 21	38.997.936,00	22.533.423.670,00	22.567.008.778,00	5.412.828,00
Pajak Penghasilan Ps 22	3.742.002,00	1.743.922.691,00	1.747.664.713,00	(20,00)
Pajak Penghasilan Ps 23	38.404.367,00	890.120.030,00	929.395.259,00	(870.862,00)
Pajak Penghasilan Ps 25	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	368.132.587,00	6.357.352.517,00	6.725.485.164,00	(60,00)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.736.670.498,00	45.411.764.370,00	47.157.427.168,00	(8.992.300,00)
BPJS	21.001.785,00	3.350.000,00	24.351.785,00	0,00
TOTAL	2.315.512.941,00	100.220.525.057,00	102.467.705.633,00	68.332.365,00

Jumlah PFK BUD yang belum terbayar sejumlah Rp68.332.365,00 merupakan saldo bawaan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2022, karena penerimaan PFK murni di tahun 2023 telah di setor ke RKUN seluruhnya di tahun 2023.

5.3.2.1.b Utang Bunga

Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang Bunga secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.176 Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang Bunga	1.620.273.338,48	0,00

Utang Bunga pada tahun 2023 sebesar Rp1.620.273.338,48,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp1.620.273.338,48 atau naik 100%. Kenaikan tersebut disebabkan pada laporan tahun sebelumnya tidak dicatat adanya utang bunga, dan pada tahun 2023 dicatat utang bunga sebesar

Rp1.620.273.338,48 yaitu utang bunga pinjaman Reguler dan pinjaman PEN pada PT. SMI yang belum dibayarkan sampai akhir tahun pelaporan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Utang Bunga per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Penerima	Jumlah Utang Bunga	Keterangan
PT. SMI	533.634.954,48	Pinjaman Reguler
PT. SMI	1.086.638.384,00	Pinjaman PEN
Jumlah	1.620.273.338,48	

5.3.2.1.c Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur yang direklasifikasi dari Kewajiban Jangka Panjang ke Kewajiban Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk pembayaran di tahun 2023. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.176 Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	46.919.399.529,00	27.099.532.196,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada tahun 2023 sebesar Rp46.919.399.529,00 dan tahun 2022 sebesar Rp27.099.532.196,00, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp19.819.867.333,00 atau naik 73,14%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan bagian lancar utang jangka panjang yaitu pembayaran pinjaman PEN. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.177 Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Penerima	Bulan Bayar	Jumlah Utang	Keterangan
PT. SMI	Januari 2024	6.774.883.049,00	Pinjaman Reguler
PT. SMI	April 2024	6.774.883.049,00	Pinjaman Reguler
PT. SMI	Juli 2024	6.774.883.049,00	Pinjaman Reguler
PT. SMI	Oktober 2024	6.774.883.049,00	Pinjaman Reguler
PT. SMI	Juni 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	Juli 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	Agustus 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	September 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	Oktober 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	November 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
PT. SMI	Desember 2024	2.831.409.619,00	Pinjaman PEN
	Jumlah	46.919.399.529,00	

5.3.2.1.d Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan dikemudian hari. Saldo pendapatan diterima dimuka pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.178 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan Diterima Dimuka	280.000.000,00	360.000.000,00

diterima dimuka pada tahun 2023 terdapat saldo sebesar Rp280.000.000,00, iika dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp360.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp80.000.000,00. Saldo tahun 2023 tersebut merupakan sewa Sebagian tanah dan bangunan di Taman Kesatuan Bangsa (Bangunan di Samping Bangunan Tempat Pemasangan Reklame/Videotron) yang terletak di Jalan Dotulolong Lasut Taman Kesatuan Bangsa kompleks pasar 45 Kelurahan Pinaesaan dengan nomor perjanjian sewa 502/D.13/PAR/732/2022 001/SAT-MDO/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 antara Pemerintah Kota Manado dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dengan nilai kontrak sewa sebesar Rp400.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun atau 60 bulan. Sewa terhitung mulai bulan Juli 2022 sehingga Pendapatan yang diterima ditahun 2022 atas Sewa yang dapat diakui di periode laporan adalah 6 bulan mulai bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dan sewa yang dapat diakui di periode laporan tahun 2023 adalah 12 bulan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga sisa masa sewa dari kontrak diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Rinciannya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5.179 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Sewa Bangunan	Nilai Kontrak Sewa	Masa Sewa	Mulai Sewa	Pendapatan Periode Tahun Sebelum	Pendapatan Periode Berjalan	Pendapatan Diterima Dimuka
PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk	400.000.000,00	5 tahun / 60 bulan	Juli 2022	40.000.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00

5.3.2.1.e Utang Beban

Utang Beban adalah kewajiban membayar karena Pemerintah Kota Manado sudah menerima manfaat namun belum melaksanakan kewajiban keuangannya. Saldo utang beban tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.180 Saldo Utang Beban per 31 Des 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang Beban	52.592.617.248,31	53.828.704.449,31

Saldo Utang Beban pada tahun 2022 sebesar Rp53.828.704.449,31, pada tahun anggaran 2023 terdapat pengurangan sebesar Rp29.441.705.717,00 atas utang yang terbayar di tahun 2023, dan penambahan di tahun anggaran 2023 sejumlah Rp28.205.618.516,00 atas utang yang timbul di tahun anggaran 2023 sehingga pada 31 Desember 2023 saldo Utang Beban tercatat sebesar Rp52.592.617.248,31.

Jika dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp1.236.087.201,00 atau turun 2,30%. Utang Beban terdiri atas Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.181 Rincian Mutasi Saldo Utang Beban per Jenis Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Des 2022	Berkurang	Bertambah	31 Des 2023
1	Utang Beban Pegawai	14.344.982.171,00	11.147.456.721,00	10.214.861.612,00	13.412.387.062,00
2	Utang Beban Barang Jasa	39.483.722.278,31	18.294.248.996,00	17.990.756.904,00	39.180.230.186,31
	Jumlah	53.828.704.449,31	29.441.705.717,00	28.205.618.516,00	52.592.617.248,31

5.3.2.1.f Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang Pemerintah Kota Manado kepada pihak ketiga yang timbul atas peristiwa di masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.182 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang Jangka Pendek Lainnya	28.102.268.753,65	34.306.164.573,54

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp34.306.164.573,54 dengan pengurangan atas utang yang telah terbayar di tahun 2023 sejumlah Rp12.870.390.157,31 dan penambahan atas utang yang timbul di tahun 2023 sejumlah Rp6.666.494.337,42 sehingga saldo utang jangka pendek lainnya tahun 2023 sebesar Rp28.102.268.753,65.

Jika dibandingkan saldo tahun 2023 dan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp6.203.895.819,89 atau turun 18,08%. Rincian mutasi saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.183 Rincian Mutasi Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

				(2 circuit Temp terri)
Uraian	Saldo 31 Des 2022	Berkurang	Bertambah	Saldo 31 Des 2023
Utang Jangka Pendek Lainnya	34.306.164.573,54	12.870.390.157,31	6.666.494.337,42	28.102.268.753,65
Jumlah	34.306.164.573,54	12.870.390.157,31	6.666.494.337,42	28.102.268.753,65

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5.3.2.2.a Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan saldo utang Pemerintah Kota Manado kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Saldo kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 5.184 Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kewajiban Jangka Panjang	190.816.508.247,00	237.739.000.909,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp190.816.508.247,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Panjang atas Utang Pemerintah Kota Manado kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Manado melakukan perjanjian pinjaman pembiayaan dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terkait pinjaman atas pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kota Manado. Metode pengakuan utang mengikuti metode konfirmasi berdasarkan dokumen perjanjian (kontrak). Pembiayaan pinjaman daerah tersebut bersifat non-revolving dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp120.000.000.000,00. Jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal penarikan pertama. Bunga atas perjanjian pinjaman pembiayaan bersifat *fixed rate* sebesar 8,34% per annum yang dibayarkan setiap 3 bulanan (triwulan).

Selain bunga, Pemerintah Kota Manado wajib membayar biaya satu kali dimuka setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman yaitu Biaya Fasilitas Pembiayaan sebesar 1% dari Rp120.000.000.000.000 yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 yang telah dibayar pada tahun 2019.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Manado memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp237.739.000.909,00, dan Tahun 2023 saldo Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp190.816.508.247,00. Jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp46.922.492.662,00 atau turun 19,74% karena senilai Rp46.919.399.529,00 direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk pembayaran utang jangka panjang dalam satu periode tahun anggaran berikut dan terdapat pengembalian sisa dana PEN yang tidak terserap senilai Rp3.093.133,00 ke PT.SMI pada tanggal 9 November 2023 sesuai SP2D 016152/SP2D-LS/5-02.0-00.0-00.02/XI/2023 sehingga mengurangi utang jangka panjang.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Manado yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Manado. Saldo ekuitas tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.185 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Ekuitas	5.200.506.619.921,89	4.801.884.667.143,84

Ekuitas Pemerintah Kota Manado Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.200.506.619.921,89 sedangkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.801.884.667.143,84. Jika dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp398.621.952.778,05 atau naik 8,30%.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Manado Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kota Manado untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.186 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No. Rek	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	1.745.342.461.362,63	1.570.286.953.753,23	175.055.507.609,40	11,15
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	448.890.140.239,22	387.576.264.587,23	61.313.875.651,99	15,82
7.1.01	Pajak Daerah-LO	388.805.574.089,81	354.421.919.305,78	34.383.654.784,03	9,70
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	24.097.469.951,00	18.846.430.389,00	5.251.039.562,00	27,86
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	20.788.083.812,00	2.965.570.703,00	17.822.513.109,00	600,98
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	15.199.012.386,41	11.342.344.189,45	3.856.668.196,96	34,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER- LO	1.120.430.311.877,41	1.117.525.576.488,00	2.904.735.389,41	0,26
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	992.534.321.870,00	995.561.148.759,00	(3.026.826.889,00)	(0,30)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	127.895.990.007,41	121.964.427.729,00	5.931.562.278,41	4,86
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	176.022.009.246,00	65.185.112.678,00	110.836.896.568,00	170,03
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	158.567.441.765,00	19.554.388.860,00	139.013.052.905,00	710,90
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	17.454.567.481,00	45.630.723.818,00	(28.176.156.337,00)	(61,75)

No. Rek	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	(%)
	Perundang-Undangan-LO				
8	BEBAN	1.411.965.489.223,11	1.308.458.645.421,37	103.506.843.801,74	7,91
8.1.01	Beban Pegawai	584.694.664.365,80	596.545.501.750,00	(11.850.837.384,20)	(1,99)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	509.621.426.346,43	482.456.814.287,45	27.164.612.058,98	5,63
8.1.03	Beban Bunga	18.710.519.493,48	11.792.961.630,00	6.917.557.863,48	58,66
8.1.05	Beban Hibah	82.599.102.406,00	40.959.707.688,00	41.639.394.718,00	101,66
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	3.898.000.000,00	1.597.500.000,00	2.300.500.000,00	144,01
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	11.494.581.415,04	11.643.279.820,82	(148.698.405,78)	(1,28)
8.1.08	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.856.703.150,59	60.237.520.764,85	(3.380.817.614,26)	(5,61)
8.1.08	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.031.896.292,00	15.236.335.035,00	4.795.561.257,00	31,47
8.1.08	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	121.772.294.498,98	86.737.559.767,49	35.034.734.731,49	40,39
8.1.08	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.213.222,42	(96.380.432,29)	136.593.654,71	(141,72)
8.1.08	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.679.675.919,16	1.347.845.110,05	331.830.809,11	24,62
8.1.08	Beban Penyusutan Properti Investasi	103.631.374,11	0,00	103.631.374,11	100,00
8.1.09	Beban Lain-Lain	462.780.739,10		462.780.739,10	100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	333.376.972.139,52	261.828.308.331,86	71.548.663.807,66	27,33
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
9.3.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	96.094.664.970,86	0,00	96.094.664.970,86	100,00
9.4.00	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepas an Aset Non Lancar	24.558.454.676,43	0,00	24.558.454.676,43	100,00
9.5.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	71.536.196.294,43	0,00	71.536.196.294,43	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	404.913.168.433,95	261.828.308.331,86	143.084.860.102,09	54,65
	POS LUAR BIASA				
10.2.00	Beban Luar Biasa	811.775.148,00	5.254.738.800,00	(4.442.963.652,00)	(84,55)
	SURPLUS / DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(811.775.148,00)	(5.254.738.800,00)	4.442.963.652,00	(84,55)
	SURPLUS / DEFISIT-LO	404.101.393.285,95	256.573.569.531,86	147.527.823.754,09	57,50

Penjelasan rinci Laporan Operasional Pemerintah Kota Manado untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Tabel 5.187 Nilai Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan-LO	1.745.342.461.362,63	1.570.286.953.753,23

Realisasi Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.745.342.461.362,63. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.570.286.953.753,23 maka pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp175.055.507.609,40 atau 11,15%.

Secara umum realisasi pendapatan mengalami kenaikan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO merupakan komponen dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang nilainya diakui ketika timbul hak atas pendapatan tersebut.

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.188 Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	448.890.140.239,22	387.576.264.587,23

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp448.890.140.239,22. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp387.576.264.587,23 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.313.875.651,99 atau naik 15,82%. Secara umum realisasi pendapatan Asli Daerah LO mengalami kenaikan karena kondisi perekonomian yang mulai membaik dibanding tahun sebelumnya. Rincian realisasi Pendapatan-LO tahun 2023 dengan perbandingan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.a Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah – LO merupakan salah satu jenis PAD yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Saldo Pajak Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.189 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah – LO	388.805.574.089,81	354.421.919.305,78

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp388.805.574.089,81. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp354.421.919.305,78 maka Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp34.383.654.784,03 atau 9,70%. Perbedaan antara Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sudah mulai efektif wajib pajak membayar pajak dan adanya pengawasan yang benar oleh instansi terkait. Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel - LO

Pajak Hotel – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Manado.

Saldo Pajak Hotel – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.190 Nilai Realisasi Pajak Hotel LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel – LO	33.703.694.102,74	33.731.090.787,07

Realisasi pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp33.703.694.102,74. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.731.090.787,07 maka pajak hotel tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.396.684,33 atau turun 0,08%.

Saldo Pajak Hotel-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.191 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Hotel LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.06	Pajak Hotel – LRA	34.024.344.010,35
8.1.1.06	Pajak Hotel – LO	33.703.694.102,74
	Selisih	(320.649.907,61)

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Hotel LRA sebesar Rp34.024.344.010,35 dengan pendapatan Pajak Hotel LO sebesar Rp33.703.694.102,74 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Hotel - LRA berdasarkan pendapatan pajak hotel yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Hotel - LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan pajak hotel yang terbit di Tahun 2023.

Selisih antara Pajak Hotel LRA dan Pajak Hotel LO sebesar Rp320.649.907,61 terdiri atas:

Tabel 5.192 Rincian Selisih Pajak Hotel LRA dan Pajak Hotel LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	223.141.332,54
2	Piutang 2022 terbayar 2023	(543.791.240,15)
	Jumlah	(320.649.907,61)

b) Pajak Restoran – LO

Pajak Restoran – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Restoran – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.193 Nilai Realisasi Pajak Restoran LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Restoran – LO	112.162.853.931,25	106.607.128.218,46

Realisasi Pajak Restoran-LO tahun 2023 sebesar Rp112.162.853.931,25. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp106.607.128.218,46 maka pajak restoran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.555.725.712,79 atau 5,21%.

Saldo Pajak Restoran-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.194 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Restoran LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.07	Pajak Restoran – LRA	111.763.590.059,21
8.1.1.07	Pajak Restoran – LO	112.162.853.931,25
	Selisih	399.263.872,04

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Restoran LRA sebesar Rp111.763.590.059,21 dengan pendapatan Pajak Restoran LO sebesar Rp112.162.853.931,25 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Hotel - LRA berdasarkan pendapatan pajak Restoran yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Restoran – LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan pajak Restoran yang terbit di Tahun 2023.

Selisih antara Pajak Restoran LRA dan Pajak Restoran LO sebesar Rp399.263.872,04 terdiri atas:

Tabel 5.195 Rincian Selisih Pajak Restoran LRA dan Pajak Restoran LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	852.681.196,02
2	Piutang 2022 terbayar 2023	(453.417.323,98)
	Jumlah	399.263.872,04

c) Pajak Hiburan – LO

Pajak Hiburan – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Hiburan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.196 Nilai Realisasi Pajak Hiburan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hiburan – LO	11.063.493.194,80	7.989.633.635,34

Realisasi Pajak Hiburan-LO tahun 2023 sebesar Rp11.063.493.194,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.989.633.635,34 maka pajak hiburan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.073.859.559,46 atau naik 38,47%.

Saldo Pajak Hiburan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.197 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan – LRA	11.052.005.455,80
8.1.1.08	Pajak Hiburan – LO	11.063.493.194,80
	Selisih	11.487.739,00

Terdapat Hiburan perbedaan antara pendapatan Pajak LRA sebesar Rp11.052.005.455,80 dengan pendapatan Pajak Hiburan LO sebesar Rp11.063.493.194,80 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Hiburan - LRA berdasarkan pendapatan pajak Hiburan yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Hiburan – LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan pajak Hiburan yang terbit di Tahun 2023.

Selisih antara Pajak Hiburan LRA dan Pajak Hiburan LO sebesar Rp11.487.739,00 terdiri atas:

Tabel 5.198 Rincian Selisih Pajak Hiburan LRA dan Pajak Hiburan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi saldo awal atas temuan BPK	(167.761.000,00)
2	Penetapan Piutang 2023	179.248.739,00
	Jumlah	11.487.739,00

d) Pajak Reklame - LO

Pajak Reklame – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Reklame – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.199 Nilai Realisasi Pajak Reklame LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Reklame – LO	6.525.147.766,00	9.194.651.451,91

Realisasi Pajak Reklame-LO tahun 2023 sebesar Rp6.525.147.766,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.194.651.451,91,00 maka pajak reklame tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.669.503.685,91 atau turun 29.03%.

Saldo Pajak Reklame-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.200 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Reklame LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.09	Pajak Reklame – LRA	6.184.016.378,00
8.1.1.09	Pajak Reklame – LO	6.525.147.766,00
	Selisih	341.131.388,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Reklame LRA sebesar Rp6.184.016.378,00 dengan pendapatan Pajak Reklame LO sebesar Rp6.525.147.766,00 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Reklame - LRA berdasarkan pendapatan pajak reklame yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Reklame - LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan pajak reklame yang terbit di Tahun 2023.

Selisih antara Pajak Reklame LRA dan Pajak Reklame LO sebesar Rp341.131.388,00 terdiri atas:

Tabel 5.201 Rincian Selisih Pajak Reklame LRA dan Pajak Reklame LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	6.525.147.766,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	(6.184.016.378,00)
	Jumlah	341.131.388,00

e) Pajak Penerangan Jalan - LO

Pajak Penerangan Jalan Umum – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Penerangan Jalan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.202 Nilai Realisasi Pajak Penerangan Jalan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Penerangan Jalan – LO	74.920.589.475,00	68.066.006.153,00

Realisasi Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2023 sebesar Rp74.920.589.475,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp68.066.006.153,00 maka pajak penerangan jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.854.583.322,00 atau naik 10.07%.

Saldo Pajak Penerangan Jalan-LO dan LRA tahun 2022 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.203 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan – LRA	74.311.899.428,00
8.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan – LO	74.920.589.475,00
	Selisih	608.690.047,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA sebesar Rp74.311.899.428,00 dengan pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO sebesar Rp74.920.589.475,00 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LRA berdasarkan pendapatan PPJ yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan PPJ - LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan PPJ yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Pajak Penerangan Jalan LRA dan Pajak Penerangan Jalan LO sebesar Rp608.690.047,00 terdiri atas:

Tabel 5.204 Rincian Selisih Pajak Penerangan Jalan LRA dan Pajak Penerangan Jalan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	74.920.589.475,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	74.311.899.428,00
	Jumlah	608.690.047,00

f) Pajak Parkir – LO

Pajak Parkir – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Parkir – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.205 Nilai Realisasi Pajak Parkir LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Parkir – LO	15.410.505.948,02	12.535.195.637,00

Realisasi Pajak Parkir-LO tahun 2023 sebesar Rp15.410.505.948,02. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.535.195.637,00 maka pajak parkir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.875.310.311,02 atau naik 22,94%.

Saldo Pajak Parkir-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.206 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Parkir LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.11	Pajak Parkir – LRA	15.115.247.787,00
8.1.1.11	Pajak Parkir – LO	15.410.505.948,02
	Selisih	295.258.161,02

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Parkir LRA sebesar Rp15.115.247.787,00 dengan pendapatan Pajak Parkir LO sebesar Rp15.410.505.948,02 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Parkir - LRA berdasarkan pendapatan pajak Parkir yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Parkir - LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan pajak Parkir yang terbit di Tahun 2023.

Selisih antara Pajak Parkir LRA dan Pajak Parkir LO sebesar Rp295.258.161,02,00 terdiri atas:

Tabel 5.207 Rincian Selisih Pajak Parkir LRA dan Pajak Parkir LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang Tahun 2023	295.258.161,02
	Jumlah	295.258.161,02

g) Pajak Air Tanah – LO

Pajak Air Tanah – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Air Tanah – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.208 Nilai Realisasi Pajak Air Tanah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Air Tanah – LO	2.591.616.740,00	1.803.035.322,00

Realisasi Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 sebesar Rp2.591.616.740,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.803.035.322,00 maka pajak air tanah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp788.581.418,00 atau naik 43,74%.

Saldo Pajak Air Tanah -LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.209 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah – LRA	1.801.658.601,00
8.1.1.12	Pajak Air Tanah – LO	2.591.616.740,00
	Selisih	789.958.139,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan Pajak Air Tanah LRA sebesar Rp1.801.658.601,00 pendapatan Pajak Air Tanah LO sebesar dengan Rp2.591.616.740,00 disebabkan karena nilai pendapatan Pajak Air Tanah - LRA berdasarkan pendapatan Pajak Air Tanah yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Pajak Air Tanah – LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan Pajak Air Tanah yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Pajak Air Tanah LRA dan Pajak Air Tanah LO sebesar Rp789.958.139,00 terdiri atas:

Tabel 5.210 Rincian Selisih Pajak Air Tanah LRA dan Pajak Air Tanah LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	2.591.616.740,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	1.801.658.601,00
	Jumlah	789.958.139,00

h) Pajak Sarang Burung Walet - LO

Pajak Sarang Burung Walet – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Sarang Burung Walet – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.211 Nilai Realisasi Pajak Sarang Burung Walet LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Sarang Burung Walet – LO	1.360.000,00	1.360.000,000

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO tahun 2023 sebesar Rp1.360.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.360.000,00 maka pajak sarang burung walet tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan realisasi.

Saldo Pajak Sarang Burung Walet-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.212 Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Walet LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	1.360.000,00
8.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet – LO	1.360.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Walet LO dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Walet LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp1.360.000,00 dan tidak ada selisih perbedaan saldo LRA dan LO.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.213 Nilai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	75.995.844.919,00	66.636.602.752,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Bangunan-LO tahun 2023 sebesar Rp75.995.844.919,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp66.636.602.752,00 maka pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.359.242.167,00 atau naik 14,05%.

Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.214 Nilai Realisasi Pendapatan PBB P2 LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA	58.786.065.926,00
8.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	75.995.844.919,00
	Selisih	17.209.778.993,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan PBB-P2 LRA sebesar Rp58.786.065.926,00 dengan pendapatan PBB-P2 LO sebesar Rp75.995.844.919,00 disebabkan karena nilai pendapatan PBB-P2 LRA berdasarkan pendapatan PBB-P2 yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan PBB-P2 LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan PBB-P2 yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LRA dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LO sebesar Rp17.209.778.993,00 terdiri atas:

Tabel 5.215 Rincian Selisih Pajak PBB-P2 LRA dan Pajak PBB-P2 LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	74.876.454.647,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	57.666.675.654,00
	Jumlah	17.209.778.993,00

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO merupakan salah satu jenis PAD dalam Pajak Daerah yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Manado, dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Wali kota Manado.

Saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.216 Nilai Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	56.430.468.013,00	47.857.215.349,00

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO tahun 2023 sebesar Rp56.430.468.013,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp47.857.215.349,00 maka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.573.252.664,00 atau naik 17,91%.

Saldo Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.217 Nilai Realisasi Pendapatan BPHTB P2 LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	56.430.468.013,00
8.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	56.430.468.013,00
	Selisih	0,00

Realisasi pendapatan BPHTB-LRA sebesar Rp56.430.468.013,00 dengan pendapatan BPHTB-LO sebesar Rp56.430.468.013,00 dan tidak terdapat selisih.

5.4.1.1.b Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah – LO merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan Peraturan Daerah.

Saldo Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.218 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Retribusi Daerah	24.097.469.951,00	18.846.430.389,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp24.097.469.951,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.846.430.389,00, maka Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.251.039.562,00 atau 27,86%. Perbedaan antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 karena sudah banyak usaha dan kegiatan yang dibuka dan dilaksanakan di tahun 2023.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.219 Nilai Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.273.692.711,00	53.516.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2023 sebesar Rp4.273.692.711,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp53.516.000,00 maka retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.220.176.711,00 atau naik 7.885,82%.

Saldo Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.220 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	60.679.250,00
8.1.2.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.273.692.711,00
	Selisih	4.213.013.461,00

Terdapat perbedaan antara Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA sebesar Rp60.679.250,00 dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebesar Rp4.273.692.711,00 disebabkan karena nilai Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA berdasarkan Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA berdasarkan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO merupakan pengakuan pendapatan retribusi termasuk pendapatan dana non kapitasi yang dicatat sebelumnya di Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selisih antara Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA dan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebesar Rp4.213.013.461,00 terdiri atas:

Tabel 5.215 Rincian Selisih Retribusi Pelayanan Kesehatan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Non Kapitasi yang direklas dari Lain-Lain	4.213.013.461,00
	Pendapatan Daerah yang Sah	
	Jumlah	4.213.013.461,00

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.221 Nilai Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO Tahun 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	11.439.151.000,00	12.144.278.969,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO tahun 2023 sebesar Rp11.439.151.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.144.278.969,00 maka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp705.127.969,00 atau turun 5,81%.

Saldo Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.222 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Kebersihan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	10.797.676.000,00
8.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	11.439.151.000,00
	Selisih	641.475.000,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan retribusi persampahan-LRA sebesar Rp10.797.676.000,00 Persampahan-LO dengan pendapatan Retribusi sebesar Rp11.439.151.000,00 disebabkan karena nilai Retribusi Pelayanan pendapatan Persampahan/Kebersihan-LRA berdasarkan pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang masuk di RKUD, sedangkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan

Penetapan Retribusi Persampahan/Kebersihan yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LRA dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO sebesar Rp641.475.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.223 Rincian Selisih Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LRA dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	5.382.720.000,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	4.741.245.000,00
	Jumlah	641.475.000,00

c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.224 Nilai Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LO
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	252.065.750,00	127.819.100,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp252.065.750,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp127.819.100,00 maka retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp124.246.650,00 atau naik 97,21%.

Saldo Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.225 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir LO dan LRA Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	252.065.750,00
8.1.2.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	252.065.750,00
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp252.065.750,00 dan tidak ada selisih antara LRA dan LO.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.226 Nilai Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	257.700.100,00	0,00

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan, terdapat kenaikan sebesar Rp257.700.100,00 atau naik 100.00%.

Saldo Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.227 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi PKB LO dan LRA Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LRA	257.700.100,00
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	257.700.100,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO tahun 2023 sejumlah Rp0,00.

e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.228 Nilai Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran LO
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	200.750.500,00	214.322.100,00

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO tahun 2023 sebesar Rp200.750.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp214.322.100,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.571.600,00 atau turun 6,33%.

Saldo Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.229 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan APAR LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA	200.750.500,00
8.1.2.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	200.750.500,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan APAR LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran LO tahun 2022 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp200.750.500,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang— LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang — LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.230 Nilai Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	68.620.000,00	80.039.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO tahun 2023 sebesar Rp68.620.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp80.039.000,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.419.000,00 atau turun 14.27%.

Saldo Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.231 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Tera Ulang LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	68.620.000,00
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	68.620.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp68.620.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.232 Nilai Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.128.822.600,00	963.775.200,00

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO tahun 2023 sebesar Rp1.128.822.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp963.775.200,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp165.047.400,00 atau naik 17,13%.

Saldo Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.233 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	1.109.191.200,00
8.1.2.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.128.822.600,00
	Selisih	19.631.400,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA sebesar Rp1.109.191.200,00 dengan pendapatan retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO sebesar Rp1.128.822.600,00 disebabkan karena nilai pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA berdasarkan pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang masuk di RKUD, sedangkan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi LRA dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi LO sebesar Rp19.631.400,00 terdiri atas:

Tabel 5.234 Rincian Selisih Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomuniaksi LRA dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi LO TA 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	19.631.400,00
	Jumlah	19.631.400,00

h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.235 Nilai Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	32.405.000,00	0,00

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp32.405.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi, maka terjadi kenaikan sebesar realisasi tahun 2023.

Saldo Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.236 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	32.405.000,00
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	32.405.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp32.405.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

i) Retribusi Tempat Pelelangan – LO

Retribusi Tempat Pelelangan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Tempat Pelelangan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.237 Nilai Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan LO Tahun 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	3.500.000,00	14.290.000,00

Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan-LO tahun 2023 sebesar Rp3.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp14.290.000,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.790.000,00 atau turun 75,51%.

Saldo Retribusi Tempat Pelelangan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.238 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.16	Retribusi Tempat Pelelangan – LRA	3.500.000,00
8.1.2.16	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	3.500.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp3.500.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

j) Retribusi Terminal – LO

Retribusi Terminal – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Terminal – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.239 Nilai Realisasi Retribusi Terminal LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Terminal – LO	0,00	73.501.000,00

Retribusi Terminal-LO tahun 2023 tidak ada realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp73.501.000,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar nilai realisasi tahun 2022.

Saldo Retribusi Terminal-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.240 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.17	Retribusi Terminal – LRA	0,00
8.1.2.17	Retribusi Terminal – LO	0,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal LO tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

k) Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.241 Nilai Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	16.783.000,00	0,00

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir -LO tahun 2023 sebesar Rp16.783.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi, maka terjadi kenaikan sebesar realisasi tahun 2023.

Saldo Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.242 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	16.783.000,00
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	16.783.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp16.783.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

1) Retribusi Rumah Potong Hewan – LO

Retribusi Rumah Potong Hewan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Rumah Potong Hewan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.243 Nilai Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan LO Tahun 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	45.380.000,00	63.320.000,00

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2023 sebesar Rp45.380.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp63.320.000,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.940.000,00 atau turun 28.33%.

Saldo Retribusi Rumah Potong Hewan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.244 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	45.380.000,00
8.1.2.23	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	45.380.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp45.380.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

m) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.245 Nilai Realisasi Retribusi Kepelabuhanan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	28.835.000,00	28.361.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO tahun 2023 sebesar Rp28.835.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp28.361.000,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp474.000,00 atau naik 1.67%.

Saldo Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.246 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Kepelabuhanan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LRA	28.835.000,00
8.1.2.23	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	28.835.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp28.835.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

n) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.247 Nilai Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	(2.642.013.842,00)

Tahun 2023 tidak terdapat realisasi retribusi izin mendirikan bangunan. Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp2.642.013.842,00.

Saldo Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.248 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi IMB LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	0,00
8.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00
	Selisih	0,00

Tidak terdapat selisih antara Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LRA dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LO. Pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO tidak ada realisasi karena sudah diganti menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO.

o) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.249 Nilai Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	242.300.000,00	185.300.000,00

Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO tahun 2023 sebesar Rp242.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp185.300.000,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp57.000.000,00 atau naik 30,76%.

Saldo Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.250 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Minuman Beralkohol LO dan LRA Tahun 2023

 $(Dalam\ Rupiah)$

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LRA	251.300.000,00
8.1.2.27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	242.300.000,00
	Selisih	(9.000.000,00)

Terdapat perbedaan antara pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol-LRA sebesar Rp251.300.000,00 dengan pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO sebesar Rp242.300.000,00. Selisih sejumlah Rp9.000.000,00 disebabkan karena nilai pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol-LRA berdasarkan pendapatan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol yang masuk di RKUD, sedangkan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol-LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol-LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LRA dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LO sebesar Rp9.000.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.251 Rincian Selisih Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LRA dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Piutang 2022 terbayar 2023	(9.000.000,00)
	Jumlah	(9.000.000,00)

p) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO

Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.252 Nilai Realisasi Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum LO
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	1.125.000,00	0,00

Realisasi Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp1.125.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi, maka terjadi kenaikan sebesar realisasi tahun 2023.

Saldo Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.253 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.2.14	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA	1.125.000,00
8.1.2.14	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	1.125.000,00
	Selisih	0,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum LRA dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum LO tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp1.125.000,00 dan tidak ada selisih antara saldo LRA dan LO.

q) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO merupakan salah satu komponen dalam Retribusi Daerah. Saldo Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.254 Nilai Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	6.106.339.290,00	7.539.921.862,00

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO tahun 2023 sebesar Rp6.106.339.290,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.539.921.862,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.433.582.572,00 atau turun 19,01%.

Saldo Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.255 Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA	5.855.764.588,00
8.1.2.26	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	6.106.339.290,00
	Selisih	250.574.702,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA sebesar Rp5.855.764.588,00 dengan pendapatan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LO sebesar Rp6.106.339.290,00 selisih senilai Rp250.574.702,00 disebabkan karena nilai pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA berdasarkan pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang masuk di RKUD, sedangkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terbit di tahun 2023.

Selisih antara Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LO sebesar Rp250.574.702,00 terdiri atas:

Tabel 5.256 Rincian Selisih Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penetapan Piutang 2023	254.676.030,00
2	Piutang 2022 terbayar 2023	(4.101.328,00)
	Jumlah	250.574.702,00

5.4.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Deviden atas kepemilikan Saham Pemerintah Kota Manado pada Bank SulutGo. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.257 Nilai Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.788.083.812,00	2.965.570.703,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan Dividen atas kepemilikan Saham Pemerintah Kota Manado pada Bank SulutGo, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO) Nomor 11 Tanggal 09 Februari 2023, yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank SulutGo sebesar Rp4.970.605.466,00, dan pengakuan pendapatan Dividen Tahun Buku 2023 berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Nomor: 01 tanggal 5 Februari 2024 yang akan diterima tahun 2024 namun sudah diakui sebagai pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp5.240.166.674,00, serta penambahan nilai penyertaan modal PDAM berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 PDAM Manado yang dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.577.311.672,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp20.788.083.812,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.965.570.703,00 terdapat kenaikan sebesar Rp17.822.513.109,00 atau 600,98%.

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO – LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.258 Nilai Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2023

Dalam Rupiah)

Kode		
Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.3.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)	4.970.605.466,00
4.1.3.01	atas Penyertaan Modal pada BUMD – LRA	4.970.005.400,00
8.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	20.788.083.812,00
0.1.3.01	Daerah/BUMD – LO	20.700.003.012,00
	Selisih	15.817.478.346,00

Terdapat perbedaan antara pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA sebesar Rp4.970.605.466,00 dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar Rp20.788.083.812,00 selisih senilai Rp15.817.478.346,00 disebabkan karena pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan — LRA dicatat berdasarkan pendapatan yang masuk di RKUD, sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan — LO dicatat berdasarkan pengakuan pendapatan sampai akhir tahun 2023.

Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO sebesar Rp15.817.478.346,00 terdiri atas:

Tabel 5.256 Rincian Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Dividen Bank SulutGo Tahun Buku 2023	5.240.166.674,00
2	Penambahan Nilai Penyertaan Modal Ekuitas PDAM Tahun 2023	10.577.311.672,00
	Jumlah	15.817.478.346,00

5.4.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.259 Nilai Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	15.199.012.386,41	11.342.344.189,45

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LO tahun 2023 sebesar Rp15.199.012.386,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.342.344.189,45 maka Lainlain PAD Yang Sah - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.856.668.196,96 atau naik 34,00%. Perbedaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah di Tahun 2023 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang meningkat.

Rincian nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO dan LRA tahun 2023 menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah-LO. Saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.260 Nilai Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	80.000.000,00	0,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp80.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada realisasi maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar nilai realisasi tahun 2023.

Saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.261 Nilai Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 4 . 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00
8 . 1 . 4 . 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	80.000.000,00
	Selisih	80.000.000,00

Nilai Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO sebesar Rp80.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA sebesar Rp0,00 terdapat selisih sebesar Rp80.000.000,00. Selisih antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA dan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO sebesar Rp80.000.000,00 terdiri atas:

Tabel 5.262 Rincian Selisih Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan LRA dan LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari Sewa diterima dimuka	80.000.000,00
	Jumlah	80.000.000,00

b. Penerimaan Jasa Giro – LO

Penerimaan Jasa Giro – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Penerimaan Jasa Giro – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.263 Nilai Realisasi Penerimaan Jasa Giro LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Jasa Giro – LO	1.729.772.434,20	3.172.312.981,00

Realisasi Jasa Giro-LO tahun 2023 sebesar Rp1.729.772.434,20. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.172.312.981,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.442.540.546,80 atau turun 45,47%.

Saldo Penerimaan Jasa Giro-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.264 Nilai Realisasi Pendapatan Jasa Giro LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro – LRA	1.729.772.434,20
8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.729.772.434,20
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Pendapatan Jasa Giro LO dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp1.729.772.434,20 dan tidak terdapat selisih.

c. Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Pendapatan Bunga – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.265 Nilai Realisasi Pendapatan Bunga LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bunga – LO	1.148.379.462,12	2.134.428.487,88

Realisasi Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 sebesar Rp1.148.379.462,12. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.134.428.487,88 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp986.049.025,76 atau turun 46,20%.

Saldo Pendapatan Bunga-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.266 Nilai Realisasi Pendapatan Bunga LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga – LRA	992.054.792,00
8.1.4.04	Pendapatan Bunga – LO	1.148.379.462,12
	Selisih	156.324.670,12

Terdapat perbedaan antara pendapatan bunga LRA sebesar Rp992.054.792,00 dengan pendapatan bunga LO sebesar Rp1.148.379.462,12 selisih senilai Rp156.324.670,12 disebabkan karena pendapatan bunga – LRA dicatat berdasarkan pendapatan yang masuk di RKUD, sedangkan pendapatan bunga – LO dicatat berdasarkan pengakuan pendapatan sampai akhir tahun 2023.

Selisih antara Pendapatan Bunga LRA dan Pendapatan Bunga LO sebesar Rp156.324.670,12 terdiri atas:

Tabel 5.256 Rincian Selisih Pendapatan Bunga LRA dan Pendapatan Bunga LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Bunga atas Remunerasi TDF 2022 di 2023	156.324.670,12
	Jumlah	156.324.670,12

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.267 Nilai Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	4.943.327.817,64	802.692.880,93

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp4.943.327.817,64. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar

Rp802.692.880,93 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.140.634.936,71 atau naik 515,84%.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.268 Nilai Realisasi Pendapatan TGR LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	4.943.327.817,64
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	4.943.327.817,64
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Pendapatan TGR LO dan Realisasi Pendapatan TGR LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp4.943.327.817,64 dan tidak ada selisih.

e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah. Saldo Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.269 Nilai Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	3.716.003.971,35	549.426.972,02

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2023 sebesar Rp3.716.003.971,35. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp549.426.972,02 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.166.576.999,33 atau naik 576,34%.

Saldo Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.270 Nilai Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	3.716.003.971,35
8.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	3.716.003.971,35
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan LO dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp3.716.003.971,35 dan tidak ada selisih.

f. Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian – LO merupakan salah satu komponen dalam Lainlain PAD yang Sah. Saldo Pendapatan dari Pengembalian – LO tahun 2023 dan 2022

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.271 Nilai Realisasi Pendapatan dari Pengembalian LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan dari Pengembalian – LO	3.581.528.701,10	4.683.482.867,62

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 sebesar Rp3.581.528.701,10. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.683.482.867,62 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.101.954.166,52 atau turun 23.53%.

Saldo Pendapatan dari Pengembalian-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.272 Nilai Realisasi Pendapatan dari Pengembalian LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.4.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan – LRA	3.604.798.551,10
8.1.4.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan – LO	3.581.528.701,10
	Selisih	(23.269.850,00)

LRA sebesar Terdapat perbedaan antara pendapatan dari pengembalian Rp3.604.798.551,10 dengan pendapatan dari pengembalian LO sebesar Rp3.581.528.701,10 selisih senilai Rp23.269.850,00 disebabkan karena pendapatan dari pengembalian - LRA dicatat berdasarkan pendapatan yang masuk di RKUD, sedangkan pendapatan dari pengembalian - LO dicatat berdasarkan pengakuan pendapatan sampai akhir tahun 2023.

Selisih antara Pendapatan dari Pengembalian LRA dan Pendapatan dari Pengembalian LO sebesar Rp23.269.850,00 terdiri atas:

Tabel 5.256 Rincian Selisih Pendapatan dari Pengembalian LRA dan Pendapatan dari Pengembalian LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

		(Batam Ruptan)
No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Pendapatan DBH PBB tgl 24 November 2023	20.069.850,00
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dinas	3.200.000,00
	Kesehatan TA. 2022	
	Jumlah	23.269.850,00

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.273 Nilai Realisasi Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer – LO	1.120.430.311.877,41	1.117.525.576.488,00

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 sebesar Rp1.120.430.311.877,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.117.525.576.488,00, Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.904.735.389,41 atau naik 0,26%. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

5.4.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum - LO, Dana Alokasi Khusus -- LO, Dana Bagi Hasil Pajak – LO dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - LO. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.274 Nilai Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	992.534.321.870,00	995.561.148.759,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2023 sebesar Rp992.534.321.870,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp995.561.148.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.026.826.889,00 atau 0,30%. Perbedaan antara Tahun 2022 dan tahun 2023 adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2023 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak – LO

Bagi Hasil Pajak – LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.275 Nilai Realisasi Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagi Hasil Pajak – LO	47.407.522.000,00	51.379.349.407,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp47.407.522.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp51.379.349.407,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.971.827.407,00 atau turun 7,73%.

Saldo Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.276 Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak – LRA	43.283.962.786,00
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak – LO	47.407.522.000,00
	Selisih	4.123.559.214,00

Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sejumlah Rp43.283.962.786,00 dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO sejumlah Rp47.407.522.000,00 menunjukkan selisih sejumlah Rp4.123.559.214,00.

Selisih antara Bagi Hasil Pajak LRA dan Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp4.123.559.214,00 terdiri atas:

Tabel 5.277 Rincian Selisih Bagi Hasil Pajak LRA dan Bagi Hasil Pajak LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Treasury Deposit Facility DBH PBB	8.541.427.655,00
2	Treasury Deposit Facility DBH PPh Pasal 21	(3.848.530.341,00)
3	Treasury Deposit Facility DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	(431.531.495,00)
4	Reklasifikasi Penerimaan Remunerasi TDF 2022 di 2023	(157.876.455,00)
5	Reklasifikasi pencatatan DBH PBB dari Lain-Lain PAD	20.069.850,00
	Jumlah	4.123.559.214,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.278 Nilai Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	7.510.490.000,00	23.423.622.022,00

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO tahun 2023 sebesar Rp7.510.490.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.423.622.022,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.913.132.022,00 atau turun 67,94%.

Saldo Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.279 Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	9.046.990.370,00

	Selisih	1.536.500.370,00
8.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	7.510.490.000,00

Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil SDA LRA sejumlah Rp9.046.990.370,00 dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil SDA LO sejumlah Rp7.510.490.000,00 menunjukkan selisih sejumlah Rp1.536.500.370,00.

Selisih antara Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO sebesar Rp1.536.500.370,00 terdiri atas:

Tabel 5.280 Rincian Selisih Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Treasury Deposit Facility DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	150.635.022,00
2	Treasury Deposit Facility DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.174.014.171,00
3	Treasury Deposit Facility DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
4	Treasury Deposit Facility DBH SDA Kehutanan-PSDH	97.966,00
5	Treasury Deposit Facility DBH SDA Perikanan	211.753.211,00
	Jumlah	1.536.500.370,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Dana Alokasi Umum (DAU) – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.281 Nilai Realisasi Dana Alokasi Umum LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

UraianHKA	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	749.852.642.000,00	702.057.099.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2023 sebesar Rp749.852.642.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp702.057.099.000,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47.795.543.000,00 atau naik 6,81%.

Saldo Dana Alokasi Umum (DAU)-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.282 Nilai Realisasi Dana Alokasi Umum LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	749.852.642.000,00
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	749.852.642.000,00
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Dana Alokasi Umum LO dan Realisasi Dana Alokasi Umum LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp749.852.642.000,00 dan tidak ada selisih.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.283 Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LO	35.004.243.654,00	137.660.653.767,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO tahun 2023 sebesar Rp35.004.243.654,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp137.660.653.767,00 maka tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp102.656.410.113,00 atau turun 74,57%.

Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.284 Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	35.004.243.654,00
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	35.004.243.654,00
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik LO dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp35.004.243.654,00 dan tidak ada selisih.

e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.285 Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LO Tahun 2023 dan 2022

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– LO	152.759.424.216,00	81.040.424.563,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO tahun 2023 sebesar Rp152.759.424.216,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp81.040.424.563,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.718.999.653,00 atau naik 88,50%.

Saldo Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.286 Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	152.759.424.216,00

	Selisih	0,00
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	152.759.424.216,00

Nilai Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LO dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA tahun 2023 menunjukkan saldo yang sama sejumlah Rp152.759.424.216,00 dan tidak ada selisih.

5.4.1.2.b Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – Lainnya - LO adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Sulawesi Utara. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.287 Nilai Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	127.895.990.007,41	121.964.427.729,00

Realisasi tahun 2023 sejumlah Rp127.895.990.007,41 dan tahun 2022 Rp121.964.427.729,00 dan jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp5.931.562.278,41 atau naik 4,86%.

Rincian atas Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah. Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.288 Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	122.895.990.007,41	121.964.427.729,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp122.895.990.007,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp121.964.427.729,00 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp931.562.278,41 atau naik 076%%.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.289 Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.2.1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	131.433.072.334,00
8.2.1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	122.895.990.007,41
	Selisih	(8.537.082.326,59)

Nilai Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sejumlah Rp131.433.072.334,00 dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO sejumlah Rp122.895.990.007,41 menunjukkan selisih sejumlah Rp8.537.082.326,59.

Selisih antara Bagi Hasil Pajak LRA dan Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp8.537.082.326,59 terdiri atas:

Tabel 5.290 Rincian Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Piutang 2022	66.519.506.465,00
2	Piutang 2023	(60.012.459.178,43)
3	Potong BPJS	2.030.035.040,00
	Jumlah	8.537.082.326,57

b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah. Saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.291 Nilai Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO	5.000.000.000,00	0,00

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat realisasi maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar realisasi tahun 2023.

Saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.292 Nilai Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi LO dan LRA
Tahun 2023

 $(Dalam\ Rupiah)$

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.2.1.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LRA	5.000.000.000,00
8.2.1.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO	5.000.000.000,00
	Selisih	0,00

Nilai Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi LRA dan LO sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan tidak terdapat selisih.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.293 Nilai Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	176.022.009.246,00	65.185.112.678,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO tahun 2023 sebesar Rp176.022.009.246,00 mengalami kenaikan sejumlah Rp110.836.896.568,00 atau naik 170,03% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp65.185.112.678,00.

Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO selama tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

5.4.1.3.a Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Saldo Pendapatan Hibah - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.296 Nilai Realisasi Pendapatan Hibah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah – LO	158.567.441.765,00	19.554.388.860,00

Realisasi Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 sebesar Rp158.567.441.765,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.554.388.860,00 mengalami kenaikan sebesar Rp139.013.052.905,00 atau naik 710,90%.

Saldo Pendapatan Hibah LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.297 Nilai Realisasi Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.3.3.01	Pendapatan Hibah – LRA	0,00
7 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Hibah – LO	158.567.441.765,00
	Selisih	158.567.441.765,00

Selisih antara Pendapatan Hibah LRA dan Pendapatan Hibah LO sebesar Rp158.537.441.765,00 terdiri atas:

Tabel 5.298 Rincian Selisih Pendapatan Hibah LRA dan Pendapatan Hibah LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	145.693.097.265,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	12.874.344.500,00
	Jumlah	158.567.441.765,00

Rincian SKPD dan Jumlah Hibah disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.298 Rincian SKPD dan Jumlah Hibah TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah	Hibah Dari	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000,00	Kementerian Pendidikan	Aset Tetap
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000,00	PT. Angkasa Pura	Aset Tetap
3	Dinas Kesehatan	399.985.701,00	Kementerian Kesehatan	Persediaan
4	Dinas Kesehatan	2.817.200.000,00	Kementerian Kesehatan	Aset Tetap
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.350.000,00	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Aset Tetap
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.879.750.000,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.922.996.627,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.057.165.129,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.991.844.500,00	Pihak Ketiga/Pengembang	Aset Tetap
10	Dinas Kebakaran	1.441.000.000,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	273.750.000,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.589.206.338,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
13	Dinas Lingkungan Hidup	8.725.174.000,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
14	Dinas Lingkungan Hidup	3.003.196.625,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.255.800.000,00	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Aset Tetap
16	Dinas Pariwisata	273.750.000,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.433.037.500,00	Kementerian PUPR	Aset Tetap
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.768.286.845,00	Kementerian Perdagangan	Aset Tetap
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.808.448.500,00	Kementerian Perdagangan	Aset Tetap
20	Kecamatan Bunaken	83.000.000,00	Bursa Efek Indonesia	Aset Tetap
21	Kecamatan Mapanget	83.000.000,00	Bursa Efek Indonesia	Aset Tetap
22	Kecamatan Singkil	83.000.000,00	Bursa Efek Indonesia	Aset Tetap
23	Kecamatan Tuminting	83.000.000,00	Bursa Efek Indonesia	Aset Tetap
24	Kecamatan Wanea	83.000.000,00	Bursa Efek Indonesia	Aset Tetap
25	Sekretariat Daerah	8.437.500.000,00	PT. Megasurya Nusalestari	Aset Tetap
	Jumlah	158.567.441.765,00		

5.4.1.3.b Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO merupakan salah satu komponen dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.299 Nilai Realisasi Pendapatan Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – LO	17.454.567.481,00	45.630.723.818,00

Realisasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan – LO tahun 2023 sebesar Rp17.454.567.481,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp45.630.723.818,00 terdapat penurunan sebesar Rp28.176.156.337,00 atau turun 61,75%.

Saldo Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan LO dan LRA tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.300 Nilai Realisasi Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah
Rekening		
4.3.3.01	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan – LRA	21.667.580.942,00
7.3.3.01	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan – LO	17.454.567.481,00
	Selisih	(4.213.013.461,00)

Selisih antara Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan LRA- LO sebesar Rp4.213.013.461,00 terdiri atas:

Tabel 5.298 Rincian Selisih Pendapatan Hibah LRA dan Pendapatan Hibah LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Pendapatan Non Kapitasi ke Pendapatan Retribusi	4.213.013.461,00
	Jasa Pelayanan Kesehatan	
	Jumlah	4.213.013.461,00

5.4.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo Beban - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.301 Nilai Realisasi Beban LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban	1.411.965.489.223,11	1.308.458.645.421,37

Realisasi Beban Pemerintah Kota Manado tahun 2023 sebesar Rp1.411.965.489.223,11. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.308.458.645.421,37 maka Beban tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp103.506.843.801,74 atau naik 7,91%, yang terdiri dari:

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Saldo Beban Operasi - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.302 Nilai Realisasi Beban Operasi LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Operasi – LO	1.411.965.489.223,11	1.308.458.645.421,37

Realisasi Beban Operasi - LO tahun 2023 sebesar Rp1.411.965.489.223,11. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.308.458.645.421,37, maka Beban Operasi - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp103.506.843.801,74 atau naik 7.91%.

Rincian realisasi Beban Operasi – LO tahun 2023 menurut objek beban sebagai berikut:

5.4.2.1.a Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.303 Nilai Realisasi Beban Pegawai LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	584.694.664.365,80	596.545.501.750,00

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp584.694.664.365,80. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp596.545.501.750,00, maka Beban Pegawai - LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.850.837.384,20 atau 1,99%. Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Pegawai. Perbedaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 yaitu Anggaran belanja pegawai tidak terserap seluruhnya karena adanya mutasi keluar pegawai, pegawai yang memasuki masa purna bakti, pegawai yang meninggal serta potongan perhitungan tambahan penghasilan PNS (bobot displin antara lain penilaian beban kerja dan kondisi kerja).

Saldo Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.304 Nilai Realisasi Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 1 . 01	Belanja Pegawai – LRA	586.938.577.305,80
8 . 1 . 1 . 01	Beban Pegawai – LO	584.694.664.365,80
	Selisih	(2.243.912.940,00)

Selisih antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO sebesar Rp2.243.912.940,00 terdiri atas:

Tabel 5.305 Rincian Selisih Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Pegawai Murni 2023	8.910.543.781,00

No.	Uraian	Jumlah
2	Utang Beban Pegawai 2022 terbayar 2023	(11.147.456.721,00)
3	Utang Barjas terbayar di Beban Pegawai (Jasa Teknologi)	(7.000.000,00)
	Jumlah	(2.243.912.940,00)

Rincian Beban Pegawai LO per akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.306 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	337.546.619.863,00
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS	121.842.182.622,00
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.705.959.633,80
8.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.834.148.472
8.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	964.153.775,00
8.1.1.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
	JUMLAH	584.694.664.365,80

5.4.2.1.b Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Saldo Beban Barang dan Jasa - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.307 Nilai Realisasi Beban Barang dan Jasa LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang dan Jasa	509.621.426.346,43	482.456.814.287,45

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp509.621.426.346,43. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp482.456.814.287,45, maka Beban Barang dan Jasa - LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.164.612.058,98 atau 5,63%. Perbedaan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 karena ada peningkatan belanja sewa, pemeliharaan dan jasa sepanjang tahun 2023.

Saldo Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.308 Nilai Realisasi Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

		1 ,
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa – LRA	581.630.263.139,20
8 . 1 . 2 . 01	Beban Barang dan Jasa - LO	509.621.426.346,43
	Selisih	(72.008.836.792,77)

Selisih antara Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO

sebesar Rp72.008.836.792,77 terdiri atas:

Tabel 5.309 Rincian Selisih Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Barang dan Jasa murni 2023	17.723.655.904,00
2	Utang Beban Barang Jasa terbayar di 2023	(18.294.248.996,00)
3	Hibah Barang Persediaan dari Kemenkes	399.985.701,00
4	Beban Persediaan Terpakai di 2023	(86.327.521.038,77)
5	Koreksi Ekuitas Utang 2023 terbayar di Belanja Modal 2023	136.525.819,00
6	Koreksi Ekuitas Utang Barjas Terbayar di Beban Pegawai	7.000.000,00
7	Reklasifikasi dari Beban Barang Jasa ke Aset Tidak Berwujud	(689.950.000,00)
8	Reklasifikasi dari Beban Barang Jasa ke Aset Tetap	(5.080.635.742,00)
9	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang Habis Pakai	19.480.064.450,00
10	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	198.756.500,00
11	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Ekstrakomtabel	514.272.650,00
12	Koreksi Ekuitas Persediaan atas Lebih Catat	(1.742.040,00)
13	Koreksi Ekuitas Utang Beban Barang Jasa Tahun Sebelum	(75.000.000,00)
	Jumlah	(72.008.836.792,77)

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Barang dan Jasa selama tahun 2023: **Tabel 5.310 Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa per Akun Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

		(Batam Rapian)
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.2.01	Beban Barang	122.203.894.319,43
8.1.2.02	Beban Jasa	262.325.629.471,00
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan	34.542.436.563,00
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	58.799.782.286,00
8.1.2.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.312.960.000,00
8.1.2.06	Beban Ekstrakomtabel	514.272.650,00
8.1.2.88	Beban Barang dan Jasa BOS	24.922.451.057,00
	Jumlah	509.621.426.346,43

5.4.2.1.c Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Saldo Beban Bunga - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.311 Nilai Realisasi Beban Bunga LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bunga	18.710.519.493,48	11.792.961.630,00

Realisasi Beban Bunga tahun 2023 sebesar Rp18.710.519.493,48 dan tahun 2022 sebesar Rp11.792.961.630,00 jika dibandingkan mengalami kenaikan sebesar Rp6.917.557.863,48 atau naik 58,66%. Beban bunga merupakan beban atas bunga pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank PT Sarana Multi Infrastruktur dan belanja atas potongan langsung DAU untuk pembayaran bunga pinjaman PEN. Perbedaan

realisasi pembayaran bunga tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu pinjaman regular dan pinjaman PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang terakumulasi.

Saldo Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.312 Nilai Realisasi Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga – LRA	17.090.246.155,00
8.1.3.01	Beban Bunga - LO	18.710.519.493,48
	Selisih	1.620.273.338,48

Selisih antara Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO sebesar Rp1.620.273.338,48 terdiri atas:

Tabel 5.309 Rincian Selisih Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pengakuan Bunga per 31 Desember 2023 Pinjaman PEN	(533.634.954,48)
2	Pengakuan Bunga per 31 Desember 2023 Pinjaman PEN	
	Reguler	(1.086.638.384,00)
	Jumlah	(1.620.273.338,48)

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Bunga tahun 2023:

Tabel 5.313 Rincian Nilai Beban Bunga per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.3.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB	18.710.519.493,48
Jumlah		18.710.519.493,48

5.4.2.1.d Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Saldo Beban Hibah - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.314 Nilai Realisasi Beban Hibah LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah	82.599.102.406,00	40.959.707.688,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp82.599.102.406,00 dan tahun 2022 sebesar Rp40.959.707.688,00, jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp41.639.394.718,00 atau naik 101,66%. Perbedaan realisasi belanja hibah tahun 2022 dan tahun 2023 karena naiknya realisasi pembayaran hibah untuk Pilkada, hibah untuk tempat ibadah, hibah kepada KONI dan lembaga lainnya.

Saldo Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.315 Nilai Realisasi Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4.1.5.01	Belanja Hibah – LRA	82.599.102.406,00
8.1.5.01	Beban Hibah – LO	82.599.102.406,00
	Selisih	0,00

Tidak terdapat selisih antara Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO tahun 2023. Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Hibah tahun 2023:

Tabel 5.316 Rincian Nilai Beban Hibah per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.5.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	498.918.000,00
8.1.5.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.197.896.406,00
8.1.5.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.902.288.000,00
Jumlah		82.599.102.406,00

5.4.2.1.e Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Saldo Beban Bantuan Sosial - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.317 Nilai Realisasi Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial	3.898.000.000,00	1.597.500.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp3.898.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.597.500.000,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp2.300.500.000,00 atau naik 144,01%. Perbedaan beban bantuan sosial tahun 2022 dan tahun 2023 karena tahun 2023 yang direalisasikan untuk beban bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan jumlah lansia yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saldo Belanja Bantuan Sosial LRA dan Beban Bantuan Sosial LO tahun 2023 serta perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.318 Nilai Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA dan Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial – LRA	3.898.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
8.1.6.01	Beban Bantuan Sosial - LO	3.898.000.000,00
	Selisih	0,00

Tidak terdapat selisih antara Belanja Bantuan Sosial LRA dan Beban Bantuan Sosial LO tahun 2023.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Bantuan Sosial tahun 2023:

Tabel 5.319 Rincian Nilai Beban Bantuan Sosial per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.6.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	3.898.000.000,00
Jumlah		3.898.000.000,00

5.4.2.1.f Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.320 Nilai Realisasi Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang	11.494.581.415,04	11.643.279.820,82

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp11.494.581.415,04. Rincian realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11.643.279.820,82 maka mengalami penurunan sebesar Rp148.698.405,78 atau turun 1,28%.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyisihan Piutang tahun 2023:

Tabel 5.321 Rincian Nilai Beban Penyisihan Piutang per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.7.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.115.963.274,88
8.1.7.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	834.721.568,69
8.1.7.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	123.365.289,25
8.1.7.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	6.225.096.530,27
8.1.7.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	195.434.751,95
Jumlah		11.494.581.415,04

5.4.2.1.g Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.322 Nilai Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.856.703.150,59	60.237.520.764,85

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp56.856.703.150,59 dan tahun 2022 sebesar Rp60.237.520.764,85 jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp3.380.817.614,26 atau turun 5,61%.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023:

Tabel 5.323 Rincian Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per Akun Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.01	Beban Penyusutan Alat Besar	9.637.023.280,99
8.1.8.01	Beban Penyusutan Alat Angkutan	16.730.039.026,32
8.1.8.01	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.489.640.843,28
	Jumlah	56.856.703.150,59

5.4.2.1.h Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.324 Nilai Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.031.896.292,00	15.236.335.035,00

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp20.031.896.292,00 dan tahun 2022 sebesar Rp15.236.335.035,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp4.795.561.257,00 atau naik 31,47% yang merupakan beban penyusutan bangunan gedung. Perbandingan realisasi antara tahun 2022 dan tahun 2023 karena ditahun 2023 terdapat pengadaan dan hibah gedung bangunan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023:

Tabel 5.325 Rincian Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per Akun Tahun 2023 (Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	20.031.896.292,00
	Jumlah	20.031.896.292,00

5.4.2.1.i Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.326 Nilai Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.772.294.498,98	86.737.559.767,49

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp121.772.294.498,98 dan tahun 2022 sebesar Rp86.737.559.767,49 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp35.034.734.731,49 atau naik 40,39%. Perbandingan realisasi antara tahun 2022 dan tahun 2023 karena ditahun 2023 terdapat pengadaan dan hibah jalan, jaringan dan irigasi yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya..

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023:

Tabel 5.327 Rincian Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.03	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	15.191.531.864,00
8.1.8.03	Beban Penyusutan Bangunan Air	5.108.672,00
8.1.8.03	Beban Penyusutan Instalasi	41.422.799,00
8.1.8.03	Beban Penyusutan Jaringan	106.534.231.163,98
	Jumlah	121.772.294.498,98

5.4.2.1.j Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.328 Nilai Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.213.222,42	(96.380.432,29)

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp40.213.222,42 dan tahun 2022 sebesar Rp96.380.432,29 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp136.593.654,71 atau 141,72%. Perbandingan realisasi Beban penyusutan aset tetap lainnya tahun 2023 dan tahun 2022 karena pengadaan aset tetap lainnya tahun 2023 lebih besar dibanding tahun sebelum.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023:

Tabel 5.329 Rincian Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.04	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	40.213.222,42
	Jumlah	40,213,222,42

5.4.2.1.k Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.330 Nilai Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.679.675.919,16	1.347.845.110,05

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp1.679.675.919,16. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.347.845.110,05 terdapat kenaikan sebesar Rp331.830.809,11 atau naik 24,62%. Perbandingan antara tahun 2023 dan tahun 2022 karena ditahun 2023 terdapat lebih banyak aset tidak berwujud dibanding tahun sebelum.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023:

Tabel 5.331 Rincian Nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.679.675.919,16
	Jumlah	1.679.675.919,16

5.4.2.1.l Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Saldo Beban Penyusutan Properti Investasi - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.332 Nilai Realisasi Beban Penyusutan Properti Investasi LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Properti Investasi	103.631.374,11	0,00

Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2023 sebesar Rp103.631.374,11. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat realisasi. Perbandingan antara tahun 2023 dan tahun 2022 karena ditahun 2022 tidak ada properti investasi.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2023:

Tabel 5.333 Rincian Nilai Beban Penyusutan Properti Investasi per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.06	Beban Penyusutan Properti Investasi	103.631.374,11
	Jumlah	103.631.374,11

5.4.2.1.m Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori beban diatas. Saldo Beban Lain-Lain tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.332 Nilai Realisasi Beban Lain-Lain LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Lain-Lain	462.780.739,10	0,00

Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp462.780.739,10. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat realisasi. Perbandingan antara tahun 2023 dan tahun 2022 karena ditahun 2022 tidak ada Beban Lain-Lain.

Di bawah ini terdapat tabel rincian dari Beban Lain-Lain tahun 2023:

Tabel 5.333 Rincian Nilai Beban Lain-Lain per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah
8.1.8.06	Beban Lain-Lain	462.780.739,10
	Jumlah	

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Saldo Kegiatan Non Operasional - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.334 Nilai Realisasi Kegiatan Non Operasional LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Non Operasional	71.536.196.294,43	0,00

Realisasi Kegiatan Non Operasional LO tahun 2023 sebesar Rp71.536.196.294,43 mengalami kenaikan sejumlah realisasi tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan atau surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Kegiatan Non Operasional terdiri atas:

Tabel 5.333 Rincian Kegiatan Non Operasional per Akun Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	
8.2.1.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	96.094.664.970,86
8.3.1.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	(24.558.454.676,43)
8.3.3.1	8.3.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Jumlah		71.536.196.294,43

Penjelasan terkait Kegiatan Non Operasional per akun Tahun 2023 sebagai berikut:

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO sebesar Rp96.094.664.970,86 merupakan penyesuaian nilai aset tanah sebesar Rp84.449.553.000,00 dan koreksi atas akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp11.645.111.970,86 atas Piutang Pajak, Retribusi, dan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 yang dibayarkan oleh pihak-pihak terkait pada Tahun 2023;
- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO sebesar Rp24.558.454.676,43 merupakan defisti atas penghapusan aset lain-lain sebesar Rp24.558.454.676,43 berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 418/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 18 Desember 2023 pada Kecamatan Rp1.745.374.527,00, Keputusan Wali Kota Tuminting 419/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 18 Desember 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp8.892.323.000,00, Keputusan Wali Kota Nomor 420/KEP/B.02/BKAD/2023 tanggal 18 Desember 2023 pada Dinas Perhubungan senilai Rp17.004.667.967,87, Keputusan Wali Kota Nomor 421/KEP/B.02/BKAD/2023 Tanggal 18 Desember 2023 pada Bagian Umum senilai Rp2.636.294.755,56, Keputusan Wali Kota Nomor 422/B.02/BKAD/2023 tanggal 23 Desember 2023 pada Bagian Kerja Sama senilai Rp306.368.700,00, dan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.6/KEP/B.02/BKAD/1263/2023 tanggal

- 7 September 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp78.800.000,00.
- 3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO sebesar Rp14.000,00 merupakan koreksi atas nilai persediaan karcis retribusi pelayanan persampahan yang hilang pada tahun 2023 di Kecamatan Tuminting sebesar Rp14.000,00.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa didapat dari Saldo Surplus/Defisit Kegiatan Operasi dan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional. Saldo Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.335 Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	404.913.168.433,95	261.828.308.331,86

Realisasi Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 mengalami surplus sebesar Rp404.913.168.433,95. Dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah Rp261.828.308.331,86 mengalami kenaikan sebesar Rp143.084.860.102,09 atau naik 54,65%.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Saldo Surplus/Defisit Pos Luar Biasa - LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.336 Nilai Surplus/Defisit Pos Luar Biasa LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	811.775.148,00	5.254.738.800,00
Surplus/Defisit Pos Luar Basa	(811.775.148,00)	(5.254.738.800,00)

Realisasi Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp811.775.148,00 mengalami kenaikan sejumlah Rp4.442.963.652,00 atau 84,55% dibandingkan dengan tahun 2022 sejumlah Rp5.254.738.800,00.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp811.775.148,00 terdiri dari:

- Pengembalian Dana BOS TA. 2022 atas sisa dana sekolah merger sebesar Rp803.452.576,00'
- Sisa Dana DAK Non Fisik PK2UMK Tahun Anggaran 2022 potong langsung DAU Oktober 2023 sesuai KMK NO.29/KM.7/2023 sebesar Rp981.800,00'
- Sisa Dana DAK Non Fisik Adminduk Tahun Anggaran 2021 potong langsung DAU Oktober 2023 sesuai KMK NO.29/KM.7/2023 sebesar Rp7.340.772,00'

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.337 Nilai Surplus/Defisit LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/Defisit LO	404.101.393.285,95	256.573.569.531,86

Realisasi Surplus - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp404.101.393.285,95 atau naik sebesar Rp147.527.823.754,09 atau naik 57,50% dibandingkan dengan tahun 2022. Kegiatan Operasional Tahun 2023 lebih besar dari Tahun 2022 karena adanya peningkatan pendapatan dan adanya penghematan.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Penjelasan pos-pos arus kas didasarkan pada jenis aktivitas dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.556.456.910.380,65 dan tahun 2022 sebesar Rp1.518.581.906.124,74. Jika dibandingkan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp37.875.004.255,91 atau 2,49%. Perbedaan arus kas masuk pada tahun 2022 dan tahun 2023 dipengaruhi naiknya pendapatan pajak, transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah yang melebihi tahun 2022.

Tabel 5.338 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktifitas Operasi

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.1.1	Pajak Daerah	369.470.655.658,36	318.619.315.077,17
5.5.1.1.2	Retribusi Daerah	18.981.775.388,00	18.736.286.962,00
5.5.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.970.605.466,00	2.965.570.703,00
5.5.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14.985.957.566,29	11.508.755.943,57
5.5.1.1.5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.947.263.026,00	989.162.838.208,00
5.5.1.1.6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.433.072.334,00	131.958.415.413,00
5.5.1.1.7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
5.5.1.1.8	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.667.580.942,00	45.630.723.818,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.556.456.910.380,65	1.518.581.906.124,74

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.272.971.057.287,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.212.435.651.862,06. Jika dibandingkan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp60.535.405.424,94 atau 4,99%. Perbedaan arus kas keluar pada tahun 2022 dan tahun 2023 dipengaruhi naiknya belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang melebihi tahun 2022.

Tabel 5.339 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktifitas Operasi

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.2.1	Belanja Pegawai	586.938.577.305,80	592.491.807.529,00
5.5.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	581.630.263.139,20	560.338.936.215,06
5.5.1.2.3	Belanja Bunga	17.090.246.155,00	11.792.961.630,00
5.5.1.2.4	Belanja Hibah	82.599.102.406,00	40.959.707.688,00
5.5.1.2.5	Belanja Bantuan Sosial	3.898.000.000,00	1.597.500.000,00

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.2.6	Belanja Tak Terduga	814.868.281,00	5.254.738.800,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.272.971.057.287,00	1.212.435.651.862,06

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.340 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	283.485.853.093,65	306.146.254.262,68

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi sebesar tahun 2023 Rp283.485.853.093,65 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp306.146.254.262,68 mengalami penurunan sebesar Rp22.660.401.169,03 atau turun 7,40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi, yaitu selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi (PAD, Transfer Pusat, maupun Transfer Provinsi) dengan arus kas keluar dari belanja operasi (Belanja Pegawai, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Barang dan Jasa). Hal itu mengartikan pula bahwa belanja operasi mampu dibiayai dengan pendapatan operasi yang diperoleh selama Tahun 2023.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi dengan arus kas keluar dari belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5.341 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk dari Aktivitas Operasi	1.556.456.910.380,65	1.518.581.906.124,74
Arus Keluar dari Aktivitas Operasi	1.272.971.057.287,00	1.212.435.651.862,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	283.485.853.093,65	306.146.254.262,68

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Tidak ada transaksi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada tahun 2023 maupun tahun 2022.

Tabel 5.342 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.1.1	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
5.5.2.1.2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
5.5.2.1.3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.5.2.1.4	Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
5.5.2.1.5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Tabel 5.343 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.806.080.000,00	4.648.762.000,00
5.5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.399.056.283,00	42.971.412.083,61
5.5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.072.927.886,00	208.704.289.954,67
5.5.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.448.932.428,00	227.037.193.461,00
5.5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.917.205.718,00	1.470.369.695,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	276.644.202.315,00	484.832.027.194,28

Jumlah saldo per 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa terdapat Kenaikan kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi dibandingkan tahun 2022, yaitu selisih antara arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap dengan arus kas keluar berupa belanja modal. Hal itu mengartikan pula bahwa arus kas keluar berupa belanja modal yang tidak diimbangi dengan arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap, namun dapat dibiayai dari arus kas masuk dari aktivitas operasi.

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap dengan arus kas keluar berupa belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5.345 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Keluar dari Aktivitas Investasi	276.644.202.315,00	484.832.027.194,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(276.644.202.315,00)	(484.832.027.194,28)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan pada tahun 2023 maupun tahun 2022 berasal dari:

Tabel 5.346 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(Dalam rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.1.1	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	203.864.585.686,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	203.864.585.686,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.347 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	8.000.000.000,00
5.5.3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.099.532.196,00	27.099.532.196,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	27.099.532.196,00	35.099.532.196,00

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.348 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(27.099.532.196,00)	168.765.053.490,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari penerimaan pinjaman daerah dengan arus kas keluar berupa penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.349 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	0,00	203.864.585.686,00
Arus Keluar Kas	27.099.532.196,00	35.099.532.196
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	(27.099.532.196,00)	168.765.053.490,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.350 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.253.839.805,00	126.530.648.825,00

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.351 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Iuran Wajib Pegawai	23.280.591.779,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	22.560.302.862,00

No	Uraian	Jumlah
3	Pajak Penghasilan Ps 22	1.745.098.322,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	891.917.077,00
5	Pajak Penghasilan Ps 25	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	6.357.352.517,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	45.415.227.248,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	3.350.000,00
9	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00
	JUMLAH	100.253.839.805,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.352 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	102.503.996.898,00	126.462.427.143,0 0
5.5.4.2.2	Koreksi SiLPA	(109.445.095,00)	0,00
5.5.4.2.3	Kiriman Uang Keluar	(1.571.418.831,00)	
	Jumlah Arus Keluar Kas	100.823.132.972,00	126.462.427.143,0 0

Sedangkan untuk Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.353 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Iuran Wajib Pegawai	23.316.337.766,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	22.597.027.508,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	1.748.522.248,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	929.395.259,00
5	Pajak Penghasilan Ps 25	35.000,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	6.725.485.164,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	47.162.842.168,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	24.351.785,00
9	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00
10	Koreksi SiLPA	(109.445.095,00)
11	Kiriman Uang Keluar	(1.571.418.831,00)
	Jumlah	100.823.132.972,00

Terdapat Kiriman Uang Keluar dalam arus keluar kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp1.571.418.831,00 yang merupakan sisa dana di SKPD yang berasal dari SP2D yang belum tersalurkan ke penerima sampai akhir tahun 2023, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.209.993.331,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.425.500,00 yang dicatat sebagai utang belanja.

5.5.4.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.354 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas	100.253.839.805,00	126.530.648.825,00
Arus Keluar Kas	100.823.132.972,00	126.462.427.143,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(569.293.167,00)	68.221.682,00

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.355 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris	100.253.839.805,00	126.530.648.825,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	100.253.839.805,00	126.530.648.825,00
Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris	100.823.132.972,00	126.462.427.143,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	102.503.996.898,00	126.462.427.143,00
Koreksi SiLPA	(109.445.095,00)	0,00
Kiriman Uang Keluar	(1.571.418.831,00)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(569.293.167,00)	68.221.682,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas didapatkan dari penjumlahan arus kas bersih dari setiap aktivitas. Untuk tahun 2023 terjadi penurunan kas sejumlah Rp20.827.174.584,35 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.852.497.759,60 terjadi penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.356 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

			1 /
Kode	Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	283.485.853.093,65	306.146.254.262,68
5.5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(276.644.202.315,00)	(484.832.027.194,28)
5.5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	(27.099.532.196,00)	168.765.053.490,00
	Pendanaan/Pembiayaan		
5.5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas	(569.293.167,00)	68.221.682,00
	Transitoris/Non Anggaran		
	Jumlah	(20.827.174.584,35)	(9.852.497.759,60)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas tahun 2023 merupakan saldo akhir kas di tahun 2022 dengan jumlah Rp54.980.292.341,56 dan saldo awal kas tahun 2022 merupakan saldo akhir kas di tahun 2021 dengan jumlah Rp64.832.790.101,16, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.357 Rincian Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

			(
Kode	Saldo Awal Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.6.1	Kas di Kas Daerah	51.728.764.884,56	62.498.754.128,16

Kode	Saldo Awal Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.6.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.000.000,00	122.559.845,00
5.5.6.3	Kas di Bendahara Penerimaan	4.564.774,00	216.052.934,00
5.5.6.4	Kas Dana BOSP	854.503.050,00	128.282.549,00
5.5.6.4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.655.427,00	34.337.883,00
5.5.6.6	Kas Lainnya	2.351.804.206,00	1.832.802.762,00
	Jumlah	54.980.292.341,56	64.832.790.101,16

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas merupakan jumlah kas per 31 Desember 2023 sejumlah Rp34.153.117.757,21 yang diperoleh dari saldo awal kas sebesar Rp54.980.292.341,56 dengan penurunan bersih kas selama tahun 2023 sebesar Rp20.827.174.584,35. Dengan rincian Saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOSP, dan Kas Lainnya, seperti disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.358 Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	
Kas di Kas Daerah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	35.000.000,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	229.537.431,00	4.564.774,00	
Kas Dana BOSP	21.019.882,00	854.503.050,00	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	194.680.758,00	5517.084,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	542.634.032,00	138.343,00	
Kas Lainnya	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00	
Jumlah	34.153.117.757,21	54.980.292.341,56	

Saldo Akhir Kas Terdiri dari:

a. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Tabel 5.359 Saldo Kas di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56

Tabel 5.360 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

Rekening	31 Des 2023	31 Des 2022
PT Bank SulutGo Cabang Manado 01101.12.000095-3	31.560.512.075,21	51.905.895.281,36
Utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus dibayar	0,00	(177.777.460,00)
Kelebihan Pencairan SP2D	0,00	539.072,00
Rekening Giro BRI atas Dana Swakelola Sekolah yang disetor ke Kasda 07-03-2023	0,00	107.991,20
Jumlah	31.560.512.075,21	51.728.764.884,56

b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel 5.361 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	35.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo, dibandingkan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp35.000.000,00 merupakan Uang Persediaan pada Kecamatan Bunaken yang tidak digunakan dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 Januari 2023.

Tabel 5.362 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

(Dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	TA 2023	TA 2022	Tanggal Setor ke RKUD	Keterangan
1	Kecamatan Bunaken		35.000.000,00	Januari 2023	Uang Persediaan

c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tabel 5.363 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	
Kas di Bendahara Penerimaan	229.537.431,00	4.564.774,00	

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2023 sebesar Rp229.537.431,00 dan pada tahun anggaran 2022 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.564.774,00.

Tabel 5.364 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022	Tanggal Setor
		Pajak PBB	16.724.040,00	0,00	02/01/2024
		Pajak Hotel	3.482.572,00	0,00	02/01/2024
	Badan	Pajak Reklame	64.762.500,00	0,00	02/01/2024 26/02/2024
1	Pendapatan Daerah	ВРНТВ	143.930.319,00	0,00	
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	638.000,00	0,00	04/01/2024
		Pajak Restoran	0,00	4.564.774,00	02-01-2023
		Jumlah	229.537.431,00	4.564.774,00	

d. Saldo Akhir Kas Dana BOSP

Tabel 5.365 Saldo Kas Dana BOSP

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Dana BOSP	21.019.882,00	854.503.050,00

Terdapat Saldo Kas Dana BOSP tahun 2023 sebesar Rp21.019.882,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.366 Rincian Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Satuan Pendidikan	Saldo 31 Des 2022	Total Penerimaan	Total Pengeluaran	Setoran Ke RKUD	Pendapatan Jasa Giro	Saldo 31 Des 2023
SD Negeri	840.705.264,00	17.949.634.100,00	17.969.526.685,00	805.332.835,00	137.426,00	15.617.270,00
SMP Negeri	13.797.786,00	12.070.650.326,00	12.080.271.400,00	1.083.022,00	2.308.922,00	5.402.612,00
SD Swasta	0,00	17.580.854.721,00	17.580.854.721,00	0,00		0,00
SMP Swasta	0,00	10.278.295.685,00	10.278.295.685,00	0,00		0,00
Jumlah	854.503.050,00	57.879.434.832,00	57.908.948.491,00	806.415.857,00	2.446.348,00	21.019.882,00

e. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tabel 5.367 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	194.680.758,00	5.517.084,00

Terdapat saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp194.680.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.368 Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	TONGKAINA	103.746,00	460.892.764,00	460.380.688,00	615.822,00
2	WAWONASA	311.847,00	1.049.290.710,00	1.049.552.459,00	50.098,00
3	TIKALA BARU	15.628,00	1.749.567.445,00	1.569.574.412,00	180.008.661,00
4	TUMINTING	80.000,00	2.299.910.375,00	2.299.990.375,00	0,00
5	SARIO	2.089.957,00	679.863.038,00	681.939.357,00	13.638,00
6	MINANGA	0,00	833.882.029,00	833.882.029,00	0,00
7	PANIKI BAWAH	0,00	1.655.453.331,00	1.655.441.645,00	11.686,00
8	WENANG	311,00	837.866.759,00	837.866.551,00	519,00
9	BAILANG	0,00	756.210.672,00	756.210.672,00	0,00
10	RANOTANA WERU	870,00	1.347.567.215,00	1.347.568.085,00	0,00
11	BENGKOL	0,00	701.336.498,00	701.336.498,00	0,00
12	BAHU	4.275,00	1.704.459.858,00	1.704.464.133,00	0,00
13	TELING ATAS	2.041.115,00	1.146.518.911,00	1.135.269.499,00	13.290.527,00
14	RANOMUUT	847.691,00	1.532.815.305,00	1.532.988.130,00	674.866,00
15	KOMBOS	20.497,00	1.442.460.994,00	1.442.475.382,00	6.109,00
16	BUNAKEN	1.147,00	326.020.742,00	326.013.057,00	8.832,00
	Jumlah	5.517.084,00	18.524.116.646,00	18.334.952.972,00	194.680.758,00

f. Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas

Tabel 5.367 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Dana BOK Puskesmas	542.634.032,00	138.343,00

Terdapat saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp542.634.032,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.368 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Saldo 31 Des 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2023
1	TONGKAINA	0,00	443.444.000,00	428.660.242,00	14.783.758,00
2	WAWONASA	13.714,00	443.486.000,00	375.530.084,00	67.969.630,00
3	TIKALA BARU	0,00	426.888.000,00	407.924.901,00	18.963.099,00
4	TUMINTING	100.000,00	476.297.000,00	469.162.496,00	7.234.504,00
5	SARIO	0,00	492.677.000,00	442.129.355,00	50.547.645,00
6	MINANGA	0,00	542.082.000,00	483.550.657,00	58.531.343,00
7	PANIKI BAWAH	0,00	492.658.000,00	468.121.229,00	24.536.771,00
8	WENANG	0,00	493.152.000,00	465.188.782,00	27.963.218,00
9	BAILANG	861,00	410.554.000,00	383.858.279,00	26.696.582,00
10	RANOTANA WERU	0,00	509.071.000,00	484.782.326,00	24.288.674,00
11	BENGKOL	0,00	459.824.000,00	323.438.258,00	136.385.742,00
12	BAHU	21.000,00	492.663.000,00	492.271.026,00	412.974,00
13	TELING ATAS	2.270,00	443.461.000,00	404.247.403,00	39.215.867,00
14	RANOMUUT	0,00	377.708.000,00	354.888.434,00	22.819.566,00
15	KOMBOS	0,00	426.843.000,00	416.765.336,00	10.077.664,00
16	BUNAKEN	498,00	558.402.000,00	546.195.503,00	12.206.995,00
	Jumlah	138.343,00	7.489.210.000,00	6.946.714.311,00	542.634.032,00

g. Saldo Akhir Kas Lainnya

Tabel 5.369 Saldo Kas Lainnya

 $(Dalam\ Rupiah)$

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00

Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.604.733.579,00 dan kas lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.351.804.206,00. Adapun rincian saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.370 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

SKPD	31 Des 2023	31 Des 2022	Tanggal Setor/ Pengembalian	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah/PPKD	0,00	2.137.735.481,00	Januari - Maret 2023	Saldo Utang PFK

SKPD	31 Des 2023	31 Des 2022	Tanggal Setor/ Pengembalian	Keterangan
Dinas Kesehatan	33.314.748,00	36.291.265,00	Januari – Februari 2024	Saldo Utang PFK dari Dana Kapitasi FKTP
PPKD	0,00	177.777.460,00	-	Utang PFK sampai dengan 2021 yang masih harus dibayar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.209.993.331,00	0,00	Januari 2024	Utang PFK Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.425.500,00	0,00	Januari 2024	Utang PFK Lainnya
Jumlah	1.604.733.579,00	2.351.804.206,00		

5.5.8 Saldo Akhir Kas - Neraca

Jumlah Saldo Akhir Kas (SiLPA) ditambah Utang PFK maka akan didapatkan Saldo Akhir Kas Neraca sebesar Rp34.153.117.757,21 dengan rincian di bawah ini:

Tabel 5.371 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas dikurangi Saldo Akhir PFK

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023
Saldo Akhir Kas (SiLPA)	32.480.051.813,21
Utang PFK SKPD	33.314.748,00
Utang PFK BUD	68.332.365,00
Kiriman Uang Keluar	1.571.418.831,00
Saldo Akhir Kas – Neraca	34.153.117.757,21

Untuk Saldo Akhir Kas di Neraca dengan perhitungannya yaitu Saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOSP dan Kas Lainnya adalah Sebesar Rp34.153.117.757,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.372 Rincian Saldo Akhir Kas

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kenaikan/Penurunan Kas	(20.827.174.584,35)	(9.852.497.759,60)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Dana BOSP, Kas Lainnya	54.980.292.341,56	64.832.790.101,16
Saldo Akhir Kas	34.153.117.757,21	54.980.292.341,56

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Manado untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas awal tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.373 Saldo Ekuitas Awal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	4.801.884.667.143,84	4.505.900.939.996,77

Saldo awal ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.801.884.667.143,84 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2022 dan saldo awal ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.505.900.939.996,77 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2021. Terdapat kenaikan antara saldo awal ekuitas tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp295.983.727.147,07 atau naik 6,57%.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Saldo surplus/defisit-LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.374 Saldo Surplus/Defisit LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/Defisit-LO	404.101.393.285,95	256.573.569.531,86

Surplus/defisit – LO sebesar Rp404.101.393.285,95 merupakan surplus atas kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional dan surplus dari pos luar biasa (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2023, dibanding tahun 2022 sebesar Rp256.573.569.531,86 terdapat kenaikan sebesar Rp147.527.823.754,09 atau naik 57,50%.

5.6.3 KOREKSI EKUITAS

Saldo koreksi ekuitas tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.375 Saldo Koreksi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas	(5.479.440.507,90)	39.410.157.615,21
Jumlah	(5.479.440.507,90)	39.410.157.615,21

Koreksi Ekuitas pada Pemerintah Kota Manado Tahun 2023 sebesar Rp5.479.440.507,90 dan tahun 2022 sebesar Rp39.410.157.615,21, jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp44.889.598.123,11 atau turun 113,90%.

Rincian atas Koreksi Ekuitas tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.376 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Nilai Ekuiats Aset Tetap	(5.671.846.943,00)	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Piutang	159.689.367,92	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Persediaan	(1.728.040,00)	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Kewajiban	34.445.107,18	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	39.410.157.615,21
TOTAL	(5.479.440.507,90)	39.410.157.615,21

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.377 Saldo Ekuitas Akhir

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Akhir	5.200.506.619.921,89	4.801.884.667.143,84

Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Manado per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.200.506.619.921,89 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kota Manado per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.801.884.667.143,84 terdapat kenaikan sebesar Rp398.621.952.778,05 atau naik 8,30%.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM

Kota Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Letak astronomisnya antara 1°30′-1°40′ Lintang Utara dan antara 124°40′ - 126°50′ Bujur Timur. Luas wilayah Manado sebesar 157,26 Km2. Kecamatan Mapanget merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 58,21 Km2 atau 37,01 persen dari wilayah Manado. Wilayah kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas keseluruhan 157,26 Km2, di mana wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken seluas 81 1,21 Ha, Pulau Manado Tua seluas 1.056,02 Ha dan Pulau Siladen seluas 27,95 Ha. Wilayah Perairan Teluk Manado memiliki bathimetri yang bervariasi dari landai sampai drop-off, dengan kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sainpai 1.000 m pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Sedangkan di Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken *drop-off* ini mencapai ratusan meter dan merupakan komunitas terumbu karang dengan ekosistim *underwater* yang spesial dan eksotis.

Dalam tatanan hukum pemerintahan pembentukan Kota Manado telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada awalnya sebagai Kotapraja Manado yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lalu pada tahun 1965 Kotapraja Manado disempurnakan menjadi Kotamadya Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 kemudian disempurnakan lagi menjadi Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada tahun 1999 Kotamadya Manado diubah menjadi Kota Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6.2. ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah
- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali

- g. Tata kerja yang jelas
- h. Fleksibilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, terdapat perubahan nama perangkat daerah dan penggabungan perangkat daerah, susunan lengkap perangkat pemerintahan daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 yang adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Dinas Kebakaran
- 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
- 7. Dinas Perhubungan
- 8. Dinas Lingkungan Hidup
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
- 11. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13. Dinas Ketenagakerjaan
- 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 15. Dinas Pariwisata
- 16. Dinas Pemuda dan Olahraga
- 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 18. Satuan Polisi Pamong Praja
- 19. Sekretariat Daerah
- 20. Bagian Tata Pemerintahan
- 21. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 22. Bagian Hukum
- 23. Bagian Administrasi Pembangunan
- 24. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 25. Bagian Perekonomian
- 26. Bagian Sumber Daya Alam
- 27. Bagian Organisasi
- 28. Bagian Kerja Sama
- 29. Bagian Umum
- 30. Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 31. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 32. Sekretariat DPRD
- 33. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 34. Inspektorat
- 35. Badan Pendapatan Daerah
- 36. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

252

- 37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 38. Kecamatan Bunaken
- 39. Kecamatan Malalayang
- 40. Kecamatan Mapanget
- 41. Kecamatan Sario
- 42. Kecamatan Singkil
- 43. Kecamatan Tikala
- 44. Kecamatan Tuminting
- 45. Kecamatan Wanea
- 46. Kecamatan Wenang
- 47. Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 48. Kecamatan Paal Dua
- 49. Dinas Pangan
- 50. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 51. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 52. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan
- 53. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 54. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Manado terdiri dari 11 wilayah kecamatan 87 kelurahan, dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Tikala. Manajemen Pemerintahan Kota Manado untuk periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Andrei Angouw dan Bapak Wakil Wali Kota dr.Richard Sualang yang terpilih melalui Pilkada Tahun 2019. Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 21 Dinas, 6 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Inspektorat, 11 Kecamatan, serta 1 Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar), dan 1 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

6.3. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan pokok dan operasional Pemerintah Kota Manado tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. penanganan bidang kesehatan.
- f. penyelenggaraan pendidikan.
- g. penanggulangan masalah sosial.
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. pengendalian lingkungan hidup.

- k. pelayanan pertanahan.
- 1. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan pemerintah mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Di samping itu adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari proses pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado, oleh sebab itu dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian kinerja tahun 2023 diperlukan peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Manado ke depan.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kota Manado bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado ini diperiksa dan diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ijinkan saya atas nama Pemerintah Kota Manado menyampaikan terimakasih, atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Daerah dan BPK Republik Indonesia Perwakilan di Sulawesi Utara, atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado setiap tahunnya. Diharapkan kerjasama yang baik tersebut dapat lebih ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Manado.

WALI KOTA MANADO

ANDREI ANGOUW